



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI GORONTALO

LAPORAN KINERJA

KANWIL DJPB PROVINSI
GORONTALO
TAHUN 2020

Pulau Cinta, Gorontalo



(0435) 826694
(0435) 824412



pk.gorontalo029@gmail.com



08124404984
08997713984



www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/gorontalo/id

**KANWIL DJTJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI GORONTALO**

KATA PENGANTAR

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara diterbitkan sebagai upaya dalam menghubungkan antara aspek penganggaran sebagai sumber daya dengan aspek akuntabilitas dalam rangka menerapkan konsep anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) secara utuh dalam sistem penganggaran. Selanjutnya untuk lebih baiknya pelaksanaan akuntabilitas pemerintah sekaligus penyelarasan antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana disebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja (LAKIN).

LAKIN sebagai salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, LAKIN juga menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Gorontalo merupakan sebagai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, menyusun LAKIN yang berisi berbagai capaian kinerja atas target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sehingga seluruh pihak yang mempunyai kepentingan dapat mengetahui hasil dan capain atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan selama tahun 2020.

Semoga LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020 dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada pihak eksternal dan secara internal dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo di masa yang akan datang.

Gorontalo, 29 Januari 2021
Plt. Kepala Kanwil,



Iwan Handoko

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai instansi vertikal di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Renstra Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mempunyai tugas untuk mendukung dan mengawal visi dan misi Ditjen perbendaharaan yang meliputi visi yaitu **“menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”**, dan misi yaitu: (1) Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal; (2) Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel; (3) Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu; (4) Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan; (5) Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern; (6) Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Dari visi dan misi Ditjen Perbendaharaan tersebut agar dapat mudah tercapai dirumuskan lah sasaran strategi dan diselaraskan kedalam suatu Peta Strategi yang terdiri dari 9 Sasaran Strategis yaitu: (1) Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif; (2) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien; (3) Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal; (4) Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan; (5) Pengelolaan kas dan fasilitasi investasi yang prudent dan optimal; (6) Monev Perbendaharaan yang optimal; (7) Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu; (8) Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal; (9) Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal; kesemuanya itu dikelompokkan kedalam 4 perspektif yaitu : *Stakeholder* Perspektif, *Customer* Perspektif, *Internal Process* Perspektif dan *Learning and Growth* Perspektif.

9 Sasaran Strategis dirinci lebih spesifik kedalam 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis atau kinerja. Setiap IKU disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai, dan semuanya itu dituangkan kedalam Kontrak Kinerja yang akan dituangkan dalam sebagai gambaran pelaksanaan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2020, secara keseluruhan capaian kinerja DJPb Provinsi Gorontalo sudah sangat baik di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dicapai adalah sebesar 107,47. Dari 19 IKU Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020, seluruhnya telah memenuhi target

dengan rincian capaian sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai target antarlain:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 91,50 dari target 88;
2. Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil terealisasi sebesar 94,04 dari target 90;
3. Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil terealisasi sebesar 99,65 dari target 94;
4. Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil terealisasi sebesar 4,76 dari target 4,55;
5. Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100%;
6. Rata-rata nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN terealisasi sebesar 97,78 dari target 88;
7. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 93 dari target 87;
8. Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI terealisasi sebesar 100% dari target 100%;
9. Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil terealisasi sebesar 100% dari target 80%;
10. Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program terealisasi sebesar 98 dari target 82;
11. Nilai kualitas laporan reuiu pelaksanaan anggaran Kanwil terealisasi sebesar 95,67 dari target 90;
12. Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN terealisasi sebesar 98,12 dari target 80;
13. Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah terealisasi sebesar 92,62 dari target 78;
14. Nilai rata-rata hard competency pegawai terealisasi sebesar 90,22 dari target 77;
15. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 88,25 dari target 83;
16. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* terealisasi sebesar 91,14 dari target 83;
17. Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan terealisasi sebesar 78,7 dari target 74;
18. Persentase pengelolaan BMN yang optimal terealisasi sebesar 98,15% dari target 92%
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil terealisasi sebesar 97,49% dari target 95%;

B. Indikator Kinerja yang tidak mencapai target adalah:

1. (N I H I L)

Pada sisi pengelolaan anggaran, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah merealisasikan penyerapan DIPA TA 2020 untuk semua jenis belanja sebesar 97.37% yaitu Rp. 3.366.368.074. dari total pagu

sebesar Rp. 3.457.411.000. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian *output* serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo juga telah menghasilkan berbagai capaian membanggakan selama tahun 2020, antara lain Peringkat Tiga Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Tingkat Wilayah Terbaik Semester I Tahun 2020 Kategori Kanwil Kecil, Peringkat Lima Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2020 Kategori Kanwil Kecil, Peringkat Enam Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinasi Kuasa BUN Kantor Wilayah DJPb Tahun 2019 Kategori Kanwil Kecil, Peringkat Sepuluh Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Terbaik (LKPK-TW dan LSKP-TW) Tahun 2019 Kategori Kanwil Kecil, Peringkat Sepuluh Implementasi Pengelolaan Kinerja berbasis *Strategy Focussed Organization* Tahun 2020, Peringkat Dua Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah.

Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai inovasi atas manajemen dan pelayanan, peningkatan integritas pegawai, dan peningkatan pengelolaan kinerja. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai akan terus ditingkatkan untuk dapat mengantarkan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii	
DAFTAR ISI	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	2
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
	C. Peran Strategis	6
	D. Sistematika Laporan	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	8
	A. Rencana Strategis	9
	B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	12
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
	A. Capaian Kinerja Organisasi	20
	B. Realisasi Anggaran	104
	C. Kinerja Lainnya	108
BAB IV	PENUTUP	131
LAMPIRAN		
	▪ Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2020	
	▪ Rencana Kinerja Tahunan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2020	
	▪ Rencana Kerja dan Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2020	

BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. PERAN STRATEGIS
- D. SISTEMATIKA LAPORAN

**A. LATAR
BELAKANG**

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo adalah instansi vertikal eselon II Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insransi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Provinsi membawahi 2 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu KPPN Tipe A1 Gorontalo dan KPPN Tipe A2 Marisa dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Gorontalo dan 6 Kabupaten/ Kota meliputi Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Boalemo. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo melaksanakan tugasnya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai visi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**B.TUGAS,
FUNGSI,
DAN
STRUKTUR
ORGA-
NISASI**

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan lingkup kerja satuan kerja dan pemerintah daerah yang berada di Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan, serta menyelenggarakan fungsi- fungsi:

- a. penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan anggaran;
- c. penyusunan rewiu belanja pemerintah (*spending review*) dan rewiu pelaksanaan anggaran;
- d. pembinaan teknis sistem akuntansi;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
- f. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
- g. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) ;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- i. pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman dan kredit program di daerah;
- j. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
- k. pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah; ·
- l. pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) ;
- m. pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
- n. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
- o. pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Infrmasi Publik (KIP);
- p. pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- q. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
- r. pelaksanaan kepatuhan internal; dan
- s. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo didukung oleh unit-unit eselon III, yang meliputi 1 Bagian, 4 Bidang dan 2 KPPN. Unit-unit tersebut bekerja sesuai reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif dan fokus. Adapun susunan organisasi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo terdiri dari :

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I;
- c. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II;
- d. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- e. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, dukungan sarana dan prasarana kerja, melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, tata usaha, rumah

tangga, kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, penganggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta melaksanakan penyusunan revidi atas pelaksanaan dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran daerah, investasi pemerintah, pinjaman, kredit program, dana transfer, dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, serta melaksanakan Kajian Fiskal Regional, analisis kinerja anggaran belanja daerah, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah, serta layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah.

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), melaksanakan penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP), melaksanakan penyusunan statistik keuangan sesuai dengan *Government Finance Statistics* (GFS), serta melaksanakan analisis atas laporan keuangan.

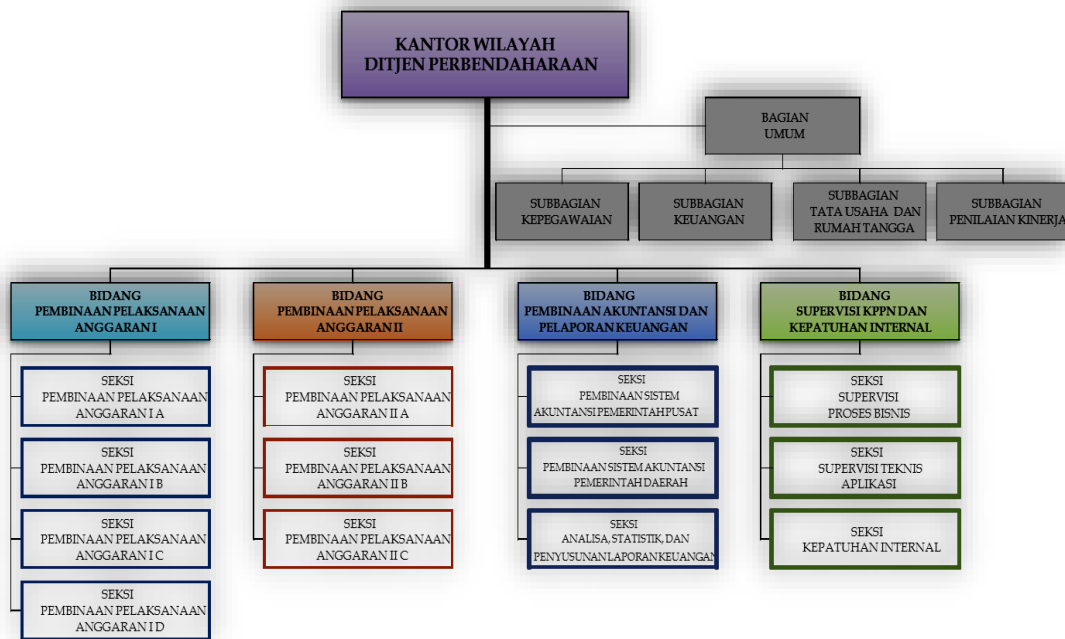
Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, melaksanakan koordinasi mutu pelayanan dan inovasi, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, pembinaan pertanggungjawaban bendahara dan pengelolaan rekening pemerintah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*) serta pelaporan pelaksanaan tugas Pembinaan Pengelola Perbendaharaan (*treasury relationship representative*).

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, di wilayah kerjanya membawahi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di wilayah Provinsi Gorontalo, antara lain:

1. KPPN Gorontalo berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 58 Kota Gorontalo;
2. KPPN Marisa berkantor di Jalan Pelabuhan Marisa Kabupaten Pohuwato.

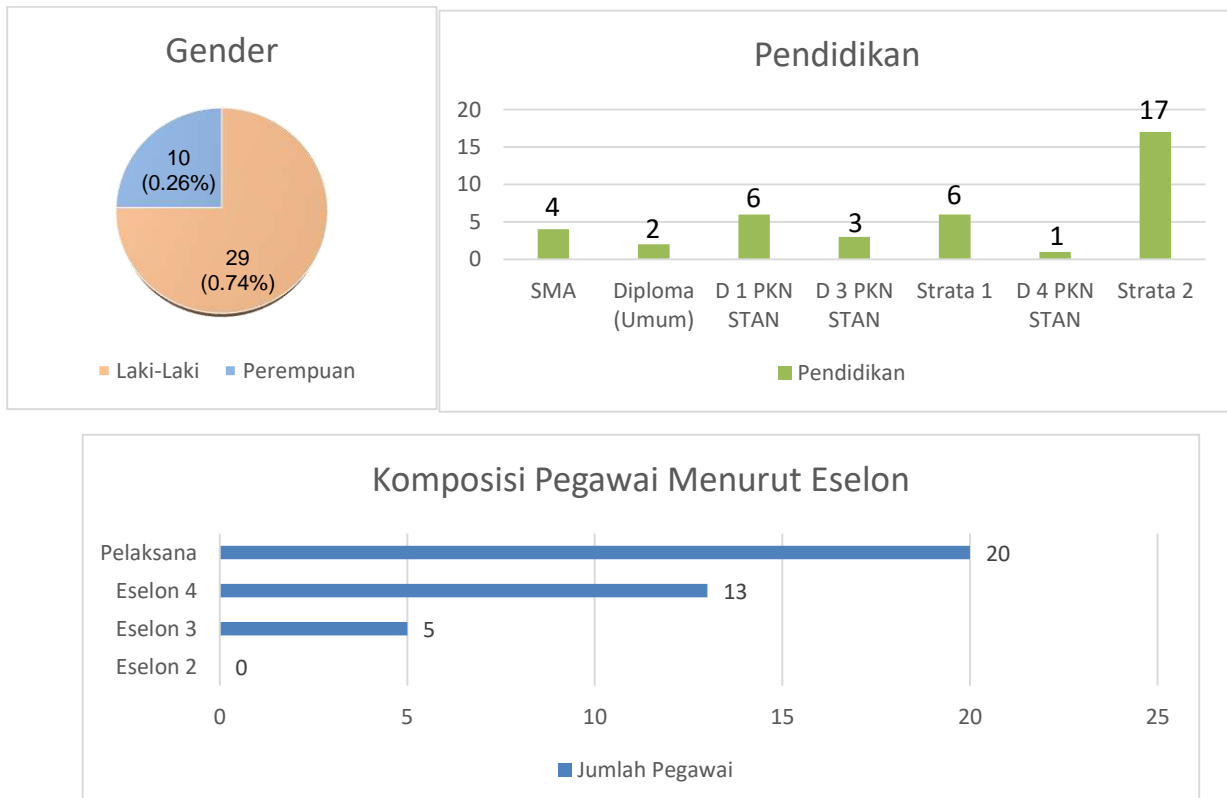
Sebagai bagian dari unsur Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada hakekatnya merupakan representasi dari Kementerian Keuangan dalam melaksanakan amanat seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam hal penyelenggaraan penerimaan dan belanja negara. Oleh karena itu, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan tugas/kegiatannya berdasarkan/sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi seperti pada bagan di bawah berikut ini

GAMBAR 1.1
Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo



Sumber Daya Manusia Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Jumlah SDM Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo terdiri dari berbagai macam kompetensi menjadi tantangan dalam pengelolaan SDM terutama dalam menempatkan staf pelaksana dalam rangka mengisi formasi yang dibutuhkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik. SDM Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2020 adalah sejumlah 39 orang dengan rincian sebagai berikut:



C. PERAN STRATEGIS

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai pengelola perbendaharaan negara di wilayah kerjanya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mempunyai posisi yang strategis yaitu:

1. Sebagai Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Gorontalo;
2. Sebagai wakil Ditjen Perbendaharaan di daerah yang mengemban fungsi Kuasa BUN di Daerah;
3. Sebagai ujung tombak Pelayanan Ditjen Perbendaharaan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Mengingat peran strategis yang diembannya ini, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seluruh komponen Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo harus senantiasa berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku, serta mampu menguasai bidang tugasnya dan memiliki pengetahuan dan keterampilan (*hard skill*) serta integritas/moralitas (*soft skill*) yang memadai dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan sekaligus meningkatkan kualitas hasil kerja.

Keberhasilan mengemban peran strategis dipengaruhi oleh unsur di luar lingkup organisasi dalam hal ini adalah budaya kerja serta komunikasi maupun koordinasi dengan mitra kerja yang terjalin dengan baik. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo juga mengambil peran penting dalam mendukung salah satu visi pembangunan yang diselenggarakan pemerintah dengan cara aktif bertugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, khususnya alokasi anggaran untuk program-program prioritas yang memiliki manfaat ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo juga mengambil peran penting dalam mewujudkan program pemerintah antara lain:

1. Mengentaskan kemiskinan di Provinsi Gorontalo, Kanwil DJPb berperan dalam upaya membina pengelolaan bantuan langsung ke masyarakat serta pembinaan layanan kredit usaha mikro (Umi).
2. Kanwil DJPb berperan dalam mensukseskan program pembangunan kawasan perdesaan melalui pembinaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
3. Kanwil DJPB mendukung Program Percepatan Penanganan Covid-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional yang ada di Provinsi Gorontalo.

Dengan dukungan pimpinan terkait manajerial organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Konsep keterpaduan menjadi lebih komprehensif dan menyentuh fungsi-fungsi lain di

dalam organisasi. sehingga memberikan kemudahan dalam penyelesaian tugas-tugas keseharian yang sebelumnya dilaksanakan secara manual sehingga mampu meningkatkan peran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi dalam menciptakan kondisi fiskal negara yang sehat dan berkesinambungan.

D.SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Wilayah DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Kinerja Lain-Lain

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Perjanjian Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020, Rencana Kinerja Tahunan 2020, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai unit vertikal dibawah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo harus mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi dan mampu mengikuti segala dinamika perubahan yang terjadi, baik perubahan struktur, sistem, budaya kerja maupun perubahan-perubahan lainnya yang bersifat strategis. Dalam rangka menghadapi perubahan kondisi nasional yang cepat dan dinamis, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang mengacu pada Rancana Strategis (Renstra) Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024, Kanwi DJPb mendukung dan mengawal visi Ditjen Perbendaharaan yaitu :

Visi dan Misi Ditjen Perbendaharaan

“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Ditjen Perbendaharaan menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan yang meliputi:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, dengan bersinergi dengan unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya, Ditjen Perbendaharaan menjalankan arah kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
2. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali;
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ditjen Perbendaharaan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan lima tujuan Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal;
2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel;
3. Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
4. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai best

practice;

5. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Ditjen Perbendaharaan, telah ditetapkan sembilan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Ditjen Perbendaharaan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L dengan target sebesar 88;
 - b. Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil dengan target sebesar 90;
 - c. Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil dengan target sebesar 94.
2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien dengan indikator kinerja:
 - a. Indeks kepuasan satker terhadap layanan kanwil dengan target sebesar 4,55 (skala 5);
3. Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 100%;
4. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan dengan indikator kinerja:
 - a. Rata-rata nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN dengan target sebesar 90;
 - b. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi dengan target sebesar 87;
 - c. Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI dengan target sebesar 100%;
5. Pengelolaan kas dan fasilitasi investasi yang prudent dan optimal dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil dengan target sebesar 80%;
 - b. Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan target sebesar 82
6. Monev perbendaharaan yang optimal dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai kualitas laporan reuiu pelaksanaan anggaran Kanwil dengan target sebesar 90;
 - b. Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN dengan target sebesar 80;
7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah dengan target sebesar 78;
8. Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai rata-rata hard competency pegawai dengan target sebesar 77;

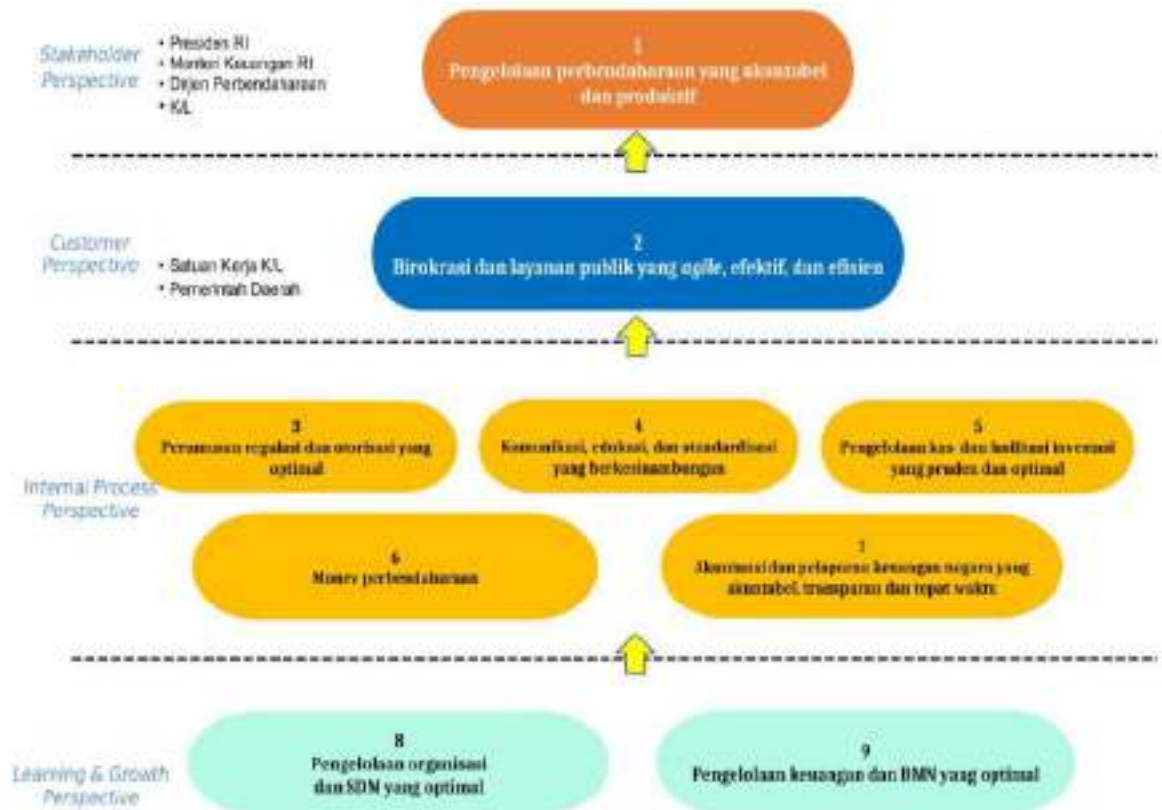
- b. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dengan target sebesar 83;
 - c. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization dengan target sebesar 83;
 - d. Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan dengan target sebesar 74;
9. Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal dengan indikator kinerja:
- a. Persentase pengelolaan BMN yang optimal dengan target sebesar 92%;
 - b. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil dengan target sebesar 95%

B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja tahun 2020 yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, dijabarkan dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 19 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum menjadi hubungan sebab akibat dalam Peta Strategi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020 tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1

Peta Strategi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020



Peta Strategi
Perbendaharaan
Gorontalo Tahun
2020

Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. Stakeholders Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. Customer Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3. Internal Process Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4. Learning and Growth Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sembilan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif dapat untuk tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Stakeholders perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

a. Pengelola perbendaharaan negara yang akuntabel dan produktif

Pengelolaan perbendaharaan artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan juga untuk mendukung pengelolaan pembiayaan dalam rangka mencukupi kebutuhan kas dalam pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas wajib dikelola secara akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pengelolaan perbendaharaan juga diharapkan dilakukan secara produktif, yaitu dapat menjadi nilai tambah dalam membangun pondasi kokoh atas fundamental ekonomi negara Indonesia. Namun demikian, pengelolaan perbendaharaan dan risiko tersebut harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efektif, dan efisien.

2. *Customer perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

a. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan adminisitratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

3. *Internal process perspective* terdiri atas 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:

a. Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh Kanwil DJPb dalam rangka pengelolaan perbendaharaan. Optimal adalah sesuai dengan kebutuhan, implementatif, dan tidak

saling bertentangan. Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan.

b. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

c. Pengelolaan kas dan fasilitasi investasi yang pruden, efisien, dan optimal

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden. Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah. Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

d. Monev perbendaharaan yang optimal

Dalam rangka memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditetapkan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran

kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder. Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

e. Akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini.

4. *Learning and growth perspective* terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

a. Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu memwadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

b. Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN

Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Pada tahun 2020, 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88
		1b-N Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	90
		1c-N Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	94
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,55 (skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal	3a-N Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-N Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	90
		4b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87
		4c-N Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%
5.	Pengelolaan kas dan fasilitasi investasi yang pruden dan optimal	5a-N Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil	80%
		5b-N Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82
6.	Monev Perbendaharaan	6a-N Nilai kualitas laporan reuiu pelaksanaan anggaran Kanwil	90
		6b-N Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa pada KPPN	80
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	78
8.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal	8a-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		8c-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83
		8d-N Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	74
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9a-N Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%
		9b-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2020, dalam upaya mencapai 9 (sembilan) sasaran strategis tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo didukung pendanaan yang dibagi ke dalam 4 (empat) jenis kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
Pendanaan Per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

No	Kegiatan	Anggaran
Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah (015.08.09.1706)		
1.	Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Statistik Tingkat Wilayah (1706.003)	Rp. 103.951.000
2.	Dokumen Hasil Layanan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah (1706.009)	Rp. 68.583.000
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1706.951)	Rp. 654.685.000
4.	Layanan Perkantoran (1706.994)	Rp. 2.316.585.000
	Jumlah	Rp. 3.143.804.000

Adapun rincian atas pendanaan dan kinerja lebih lanjut diuraikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran, pada Lampiran III LAKIN ini.

BAB III

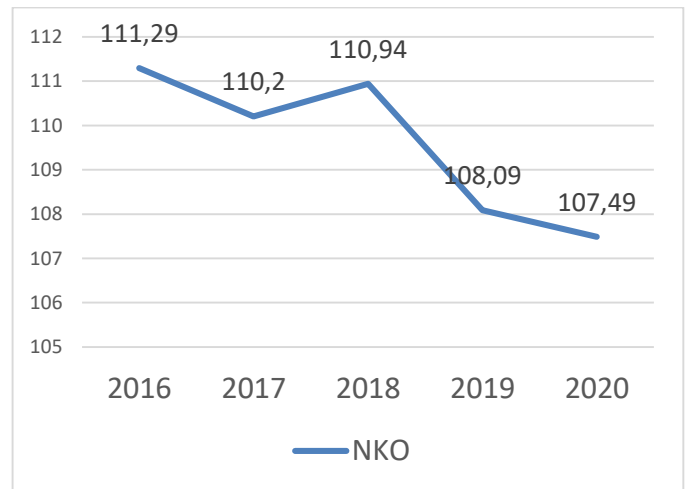
AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. KINERJA LAINNYA

A. **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI** Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah sebesar 107,49**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

PERSPECTIVE	BOBOT	NILAI
STAKEHOLDER	25%	104,74
CUSTOMER	15%	104,62
INTERNAL PROCESS	30%	111,36
LEARNING AND GROWTH	30%	107,28
NILAI KINERJA ORGANISASI		107,47

TABEL 3.1
Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif
Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, seluruh perspektif mendapat nilai di atas 100 dengan nilai tertinggi terdapat pada *Internal Process Perspective*. Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada Grafik 3.1. **GRAFIK 3.1** NKO Ditjen Perbendaharaan



Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.1, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, NKO Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengalami dinamika naik dan turun. Namun pada tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 0,74. Kemudian, pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan sampai dengan angka 107,49. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan mendasar pada naiknya target namun secara umum hasil yang diperoleh telah melampaui seluruh target yang ditetapkan. Capaian 19 IKU tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Penjelasan capaian IKU secara detail dijelaskan pada tabel berikut :

TABEL 3.2
Capaian IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (bobot)	Target	Realisasi	Nilai
<i>Stakeholder Perspective (25%)</i>				26,18%
1	Pengelola perbendaharaan negara yang akuntabel dan produktif			104,74%
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	91,50	103,98%
1b-N	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	90	94,04	104,48%
1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	94	99,65	106,01%
<i>Customer Perspective (15%)</i>				15,69%
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			104,62%
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,55	4,76	104,62%

Capaian IKU Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020

<i>Internal Process Perspective (30%)</i>				33,41%
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal			100%
3a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan			105,17%
4a-N	Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	90	97,78	108,64%
4b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87	93	106,89%
4c-N	Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%	100%	100%
5	Pengelolaan kas dan fasilitasi investasi yang pruden dan optimal			119,76%
5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil	80%	100%	120%
5b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82	98	119,51%
6	Monev Perbendaharaan yang optimal			113,15%
6a-N	Nilai kualitas laporan reuiv pelaksanaan anggaran Kanwil	90	95,67	106,30%
6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa pada KPPN	80	98,12	120%
7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu			118,74%
7a-N	Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	78	92,62	118,74%
<i>Learning and Growth Perspective (30%)</i>				32,18%
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal			109,68%
8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	77	90,22	117,17%
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	88,25	106,33%
8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	83	91,14	109,81%
8d-N	Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	74	78,70	106,35%
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal			104,65%
9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%	98,15%	106,68%
9b-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%	97,49%	102,62%
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				107,47%

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, realisasi seluruh IKU Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo (19 IKU) telah mencapai target yang telah ditentukan. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Pengelola perbendaharaan negara yang akuntabel dan produktif

Pengelolaan perbendaharaan artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan juga untuk mendukung pengelolaan pembiayaan dalam rangka mencukupi kebutuhan kas dalam pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas wajib dikelola secara akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama:

TABEL 3.3

Capaian IKU pada Sasaran Strategis

Pengelola perbendaharaan negara yang akuntabel dan produktif

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	91,5	103,98%
1b-N	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	90	94,04	104,49%
1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	94	99,64	106,01%

Uraian IKU tersebut adalah :

1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh variabel-variabel antara lain:

- (1) kesesuaian dengan perencanaan,
- (2) efektivitas pelaksanaan anggaran,
- (3) efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan
- (4) kepatuhan terhadap regulasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L** disusun dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran satker. Selain itu, IKU ini bertujuan untuk mengetahui kinerja satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L didapatkan dengan menggabungkan nilai keempat variabel tersebut dengan penjelasan masing-masing variabel sebagai berikut :

- 1. Kesesuaian dengan Perencanaan** dihitung dari 3 (tiga) variable yaitu :
 - a. Revisi DIPA (REV) dengan bobot 5%
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (HAL3) dengan bobot 5%
 - c. Pagu Minus (MIN) dengan bobot 5%

Revisi DIPA: dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per satker. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat pergeseran (dalam hal pagu tetap). indeks kinerja terkait revisi DIPA yang dihitung dengan menggunakan formula = $(100/\text{Rasio Revisi DIPA})$, dengan ketentuan: (i) Rasio Revisi DIPA merupakan Total Revisi DIPA/Jumlah DIPA; (ii) Total Revisi DIPA merupakan jumlah frekuensi revisi DIPA secara kumulatif s/d periode triwulan bersangkutan dan (iii) Jumlah DIPA merupakan jumlah DIPA Petikan satker dikali dengan batasan maksimal frekuensi revisi DIPA yang diperkenankan s/d periode triwulan bersangkutan yaitu 1x untuk Triwulan I, 2x untuk Triwulan 2, 3x untuk Triwulan III, serta 4x untuk Triwulan IV. Revisi yang diperhitungkan dalam pengukuran capaian IKU adalah seluruh revisi pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap (kode jenis revisi 2XX) yang dilaksanakan oleh Kanwil, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Dengan ketentuan, apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai lebih dari 100, maka nilainya dikonversi menjadi 100.

Deviasi Halaman III DIPA: indeks kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, dihitung dengan formula = $1 - \text{rata2 per bulan} [(j\text{real}-j\text{renc})/j\text{renc}]$, dengan ketentuan: (i) $j\text{real}$ merupakan nilai total realisasi anggaran, (ii) $j\text{renc}$ merupakan jumlah rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, (iii) hasil $[(j\text{real}- j\text{renc})/j\text{renc}]$ maksimal bernilai 1, serta (iv) dalam kondisi hasil $[(j\text{real}-j\text{renc})/j\text{renc}]$ menunjukkan #DIV/0, maka nilainya dikonversi menjadi 1 apabila ada nilai realisasi dan menjadi 0 apabila tidak ada nilai realisasi. (v) hasil $[(j\text{real}-j\text{renc})/j\text{renc}]$ bernilai absolut (mengabaikan tanda plus atau minus).

Pagu Minus: indeks kinerja terkait pagu minus, dihitung dengan formula = $1 - \sum \text{Pagu minus} / \sum \text{Pagu}$.

2. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dihitung dari 4 (empat) variable yaitu :

- a. Penyerapan Anggaran (REAL) dengan bobot 15%
- b. Penyelesaian Tagihan (TAG) dengan bobot 12%
- c. Konfirmasi Capaian Output (KCO) dengan bobot 10%
- d. Retur SP2D (RTR) dengan bobot 5

Penyerapan Anggaran: indeks penyerapan anggaran DIPA K/L, yang dihitung dengan formula = $\%Real/\%Target$, dengan ketentuan: (i) $\%Real$ merupakan Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L (kumulatif) adalah perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L dengan total pagu, dan (ii) $\%Target$ merupakan nilai target $\%$ penyerapan DIPA K/L (kumulatif), dengan besaran $Q1=15\%$, $Q2=40\%$, $Q3=60\%$, $Q4=90\%$. Apabila hasil $\%Real/\%Target$ lebih besar dari 1 karena $\%Real > \%Target$, maka nilai capaian dikonversi menjadi 1.

Penyelesaian Tagihan: indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian tagihan, yang dihitung dengan formula = $\sum \text{Tagihan LS non BP Kontraktual yang disampaikan tepat}$

waktu/ Σ Total Tagihan LS non BP Kontraktual. Dengan ketentuan: Tagihan dianggap tepat waktu apabila diselesaikan pembayarannya paling lama 17 HK setelah muncul hak (BAST/BAP/BAPP).

Konfirmasi Capaian Output: indeks kinerja terkait capaian output dihitung secara bulanan berdasarkan rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola oleh Satker. Output yang terkonfirmasi adalah data output yang dinilai wajar (rasional/tidak bersifat anomali). Ketidakwajaran (anomali) dinilai berdasarkan perbandingan antara realisasi volume keluaran dan progress capaian output yang diisi oleh Satker dengan data lainnya seperti penyerapan anggaran dan rencana (target) output.

Retur SP2D: indeks kinerja terkait level retur SP2D yang dihitung dengan formula = $1 - (\Sigma \text{retur SP2D} / \Sigma \text{SP2D terbit})$.

3. Efisiensi Pelaksanaan kegiatan dihitung dari 2 (dua) variable yaitu :

- a. Pengembalian/Kesalahan SPM (SPM) dengan bobot 5%
- b. Perencanaan Kas (RPD) dengan bobot 5%

Pengembalian/Kesalahan SPM: indeks kinerja terkait pengembalian SPM yang diajukan satker, yang dihitung dengan formula = $\text{JSPM Benar} / \text{JSPM}$, dengan ketentuan: (i) JSPM Benar merupakan Jumlah SPM benar yang diproses menjadi SP2D s/d Triwulan tertentu (kumulatif), dan (ii) JSPM merupakan Jumlah total SPM yang diajukan Satker ke KPPN dan telah diterima oleh Middle Office s/d Triwulan tertentu (kumulatif).

Perencanaan Kas (RPD): indeks kinerja terkait akurasi penyampaian RPD harian satker K/L, yang dihitung dengan formula = $\Sigma \text{Renkas Akurat} / \Sigma \text{Renkas}$, dengan ketentuan: (i) $\Sigma \text{Renkas Akurat}$ merupakan jumlah total data RPD harian yang disampaikan tepat waktu, dan (ii) ΣRenkas merupakan total data RPD yang disampaikan kepada KPPN.

4. Kepatuhan terhadap regulasi dihitung dari 4 variable yaitu :

- a. Data Kontrak (KTR) dengan bobot 15%
- b. Pengelolaan UP dan TUP (PUP) dengan bobot 8%
- c. Rekon LPJ Bendahara (LPJ) dengan bobot 5%
- d. Dispensasi Penyampaian SPM (DSPM) dengan bobot 5%

Data Kontrak: indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyampaian data kontrak, dihitung dengan formula = $\Sigma \text{Kontrak yang disampaikan tepat waktu} / \Sigma \text{Total Kontrak}$. Dengan ketentuan, data kontrak dinyatakan disampaikan tepat waktu apabila disampaikan maksimal 5 HK setelah kontrak ditandatangani..

Pengelolaan UP: indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP, yang dihitung dengan formula = $\Sigma \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu} / \Sigma \text{Total SPM GUP}$. Dengan ketentuan, Pertanggungjawaban UP dinyatakan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu apabila disampaikan tidak lebih dari 1 bulan sejak tanggal SPM UP atau

tanggal SPM GUP terakhir.

Rekon LPJ Bendahara: indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara, yang dihitung dengan formula = $\frac{\sum \text{LPJ yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total LPJ yang harus disampaikan}}$. Dengan ketentuan, Penyampaian LPJ Bendahara dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 10 setelah bulan pelaporan.

Dispensasi Penyampaian SPM: indeks kinerja terkait dispensasi penyampaian SPM, yang dihitung dengan formula = $1 - \frac{\sum \text{Dispensasi SPM}}{\sum \text{SPM yang disampaikan ke KPPN}}$.

Dengan demikian, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L dapat diformulasikan secara lengkap adalah sebagai berikut:

$$\text{IKPA} = [5\% (\text{REV}) + 5\% (\text{HAL3}) + 5\% (\text{RTR}) + 20\% (\text{REAL}) + 20\% (\text{TAG}) + 5\% (\text{SPM}) + 5\% (\text{RPD}) + 10\% (\text{KTR}) + 10\% (\text{PUP}) + 5\% (\text{LPJ}) + 5\% (\text{DSPM}) + 5\% (\text{MIN})] \times 100$$

Keterangan:

IKPA	=	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L
REV	=	Indeks kinerja terkait revisi DIPA
HAL3	=	Indeks kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA
RTR	=	Indeks kinerja terkait level retur SP2D
REAL	=	Indeks penyerapan anggaran DIPA K/L
TAG	=	Indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian tagihan
SPM	=	Indeks kinerja terkait pengembalian SPM yang diajukan satker
RPD	=	Indeks kinerja terkait akurasi penyampaian RPD harian satker K/L,
KTR	=	Indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyampaian data kontrak
PUP	=	Indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP
LPJ	=	Indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara
DSPM	=	Indeks kinerja terkait dispensasi penyampaian SPM
MIN	=	Indeks kinerja terkait pagu minus

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 88 sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020. Target IKU tersebut sama dengan target yang ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perbendaharaan 2020-2024. Target tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target yang tertera Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo 2015-2019 yaitu 75% (satuan penilaian masih persentase). Dengan menimbang pergerakan ekonomi tahun 2020, target IKU tahun 2020 tersebut masih menantang. Mulai triwulan II tahun 2018, perhitungan capaian IKU ini mengalami perubahan mengikuti formula pada Aplikasi OMSPAN dengan penambahan variable pagu minus dan dispensasi SPM. Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2020 adalah 91,50. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2020 triwulanan, yaitu 91,76 pada triwulan III dan 91,24 pada triwulan IV. Adapun capaian triwulan I dan triwulan II adalah N/A sehubungan dengan adanya relaksasi pelaksanaan anggaran akibat Covid-19.

TABEL 3.4

Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2020

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	88	88	88	88	88	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	N/A	N/A	91,76	91,24	91,50	
Nilai Capaian	N/A	N/A	104,27	103,68	103,97	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, realisasi tahunan IKU tersebut sebesar 91,50 telah melampaui target yaitu 88 (dengan nilai capaian 103,97) sesuai yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2020 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yang tertera pada tabel 3.5.

TABEL 3.5

Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2020

Tahun	Realisasi					Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	
2020	N/A	N/A	91,76	91,24	91,50	88
2019	92,18	94,11	94,41	96,68	94,35	88
2018	87,06%	89,08%	92,39%	94,55%	90,77%	80%
2017	92,71%	95,58%	98,12%	96,81%	95,81%	75%
2016	88,26%	98,38%	100,24%	95,63%	96,20%	75%

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi tahunan IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus melampaui targetnya. Adapun realisasi dari tahun ke tahun terjadi penurunan disebabkan terdapat penyempurnaan parameter penilaian terhadap perhitungan nilai IKU ini dari tahun ke tahun.

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi selama lima tahun rencana jangka menengah Kanwil DJpb Provinsi Gorontalo yang dituangkan dalam Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.6.

TABEL 3.6

Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2020 dengan Renstra

Tahun	Realisasi Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb	Keterangan
2020	91,50	-	88	<i>Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun renstra sehingga tidak terdapat target</i>
2019	94,35	75%	80%	
2018	90,77%	75%	80%	
2017	95,81%	75%	75%	
2016	96,20%	75%	75%	

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal dan menjadi tantangan di antaranya:

1. Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang sedikit banyak memberikan dampak pada kelancaran pelaksanaan IKU ini.
2. Banyak satuan kerja yang belum memahami kepentingan penilaian IKPA, faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian dan cara perhitungan yang telah ditetapkan pada IKPA.
3. Pemahaman satker terkait batas waktu penyampaian data kontrak ke KPPN masih rendah sehingga banyak keterlambatan.
4. Masih terdapat beberapa satker yang terlambat dalam melakukan pertanggungjawaban UP/TUP.
5. Dibeberapa satker masih terjadi deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana dalam HAL 3 DIPA.

6. Masih terdapat beberapa satker yang terlambat menyelesaikan tagihan LS Non Kontraktual lebih dari 17 hari kerja setelah ditandatanganinya BAST/BAP/BAPP.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran antara lain:

1. Tidak ada sanksi dalam peraturan terkait, sehingga pelanggaran dilakukan berulang-ulang oleh satuan kerja;
2. Kepatuhan/ketertiban/disiplin satker yang masih rendah dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan anggaran, khususnya terkait percepatan penyelesaian tagihan jatuh tempo dan uang persediaan (UP);
3. Tidak konsistennya K/L dalam melaksanakan perencanaan.
4. Pada saat melakukan pembinaan langsung ke Satker ataupun pelaksanaan FGD dan sosialisasi para peserta ataupun yang bisa ditemui hanyalah pihak operator/bendahara dan paling tinggi PPK. Pihak KPA paling susah ditemui/hadir dikarenakan kesibukannya ataupun sering tidak berada di tempat yang membuat pelaksanaan kegiatan tidak berlangsung optimal.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Ke Seluruh satker terkait pentingnya pengelolaan keuangan yang baik melalui penilaian IKPA.
2. Menyarankan penambahan petugas Konversi di Front Office
3. Menghimbau dan mengingatkan satker baik melalui kegiatan sosialisasi, notifikasi melalui WAG dan juga penyebaran Flyers gambar di WA agar satker terus meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
4. Melakukan pemantauan/pengawasan melalui aplikasi OM SPAN ataupun MEBE PA kemudian melakukan himbuan kepada seluruh satker untuk dapat meningkatkan nilai IKPA baik secara langsung maupun via grup wa pembinaan
5. Meningkatkan perhatian satuan kerja dengan memberikan informasi terkait IKPA pada Front Office saat satuan kerja berkonsultasi atau melakukan revisi.

Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (*action plan*) untuk meningkatkan capaian mendatang IKU tersebut yang dilakukan selama tahun 2020 (penanggung jawab: Bidang PPA I), yaitu dengan:

1. Bersama-sama dengan KPPN melakukan pemetaan satker-satker yang sering mengajukan SPM salah dan melakukan rotasi petugas FO KPPN
2. Melakukan monitoring dan pembinaan capaian IKPA satuan kerja berdasarkan pegangan masing-masing seksi baik melalui kegiatan sosialisasi, *on the spot*, surat menyurat maupun via group WA pembinaan.

3. Melakukan peningkatan Awareness satuan kerja di Front Office Kanwil DJPb khususnya kedisiplinan dan pengelolaan APBN yang baik yang berimplikasi pada IKPA yang secara akumulasi di perhitungkan hingga tingkat Kementerian.
4. Melakukan Evaluasi dan Pembinaan kepada Satuan kerja dengan perolehan IKPA dibawah rata-rata untuk dapat meningkatkan Perolehan IKPA diatas target minimal.
5. Memberikan apresiasi dan penghargaan dengan memberikan penganugerahan pada acara *Treasury Award*

Untuk diketahui bahwa IKU Nilai Kinerja Pelaksanaa Anggaran K/L merupakan IKU baru di tahun 2019 sekaligus menjadi penyempurna dari IKU sebelumnya yakni Presentase Kinerja Pelaksanaa Anggaran K/L. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berharap agar perkembangan capaian IKU ini dapat terus diperbaiki dan mencapai hasil yang memuaskan.

1b-N Nilai
kualitas
Laporan
Kajian
Fiskal
Regional
Kanwil

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memiliki fungsi pembinaan, koordinasi dan supervisi, serta menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai Pengelola Fiskal. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat memiliki data, informasi dan kemampuan untuk menganalisis dan menyajikan laporan kajian fiskal tingkat wilayah (regional). Sesuai ketentuan SE-61/PB/2017, setiap Kanwil DJPb menyusun Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) secara periodik (triwulanan) dan menyampaikan laporan tersebut kepada kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Kajian Fiskal Regional pada Kanwil DJPb, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian dan penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata kanwil dalam menyelesaikan dan meningkatkan kualitas Kajian Fiskal tingkat wilayah. Penilaian KFR dilakukan secara Semesteran. Terdapat beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam penilaian KFR, meliputi: Ketepatan waktu penyampaian laporan (5%); Kesesuaian dengan petunjuk dan contoh penyajian sebagaimana diatur dalam SE (10%); Kelengkapan, relevansi, dan kualitas data (35%); Kualitas analisis (40%); Teknik penyajian dan estetika (10%). Kategori nilai Kajian Fiskal Regional Kanwil adalah sebagai berikut:

- Level 5 = 91-100 (Excellent)
- Level 4 = 75-90 (Good)
- Level 3 = 61-74 (Fair)
- Level 2 = 41-60 (Poor)
- Level 1 = 0-40 (Unqualified)

Pengisian realisasi disesuaikan dengan siklus dan karakteristik Laporan KFR yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU semester I tahun 2020 merupakan hasil penilaian Laporan KFR tahunan 2019, dan untuk realisasi IKU semester II tahun 2020 merupakan hasil penilaian Laporan KFR semester I tahun 2020. Selanjutnya nilai realisasi IKU tersebut diperoleh dari hasil penilaian Laporan Kajian Fiskal Regional oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi setiap periode).

Target tahun 2020

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 90 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020. Target tersebut meningkat dari target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya (2019), yaitu 89. Target IKU tersebut juga lebih kecil dibandingkan dengan target yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 (ditargetkan 90,25).

Realisasi tahun 2020

Realisasi IKU Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil Tahun 2020 adalah 94,04. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil tahun 2020 semester I yaitu 94,73 semester II sebesar 93,94. Realisasi IKU per semester tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7.

TABEL 3.7

Perhitungan Realisasi IKU Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil Tahun 2020

URAIAN	Semester I	Semester II
Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	94,73	93,94
Rata-rata semester I-II	94,04	

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.8.

TABEL 3.8

Capaian IKU Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil tahun 2020

Ket.	Smt I	Smt II	Tahunan	Pol/KP
Target	90	90	90	Maximize/ Average
Realisasi	94,73	93,34	94,04	
Nilai	105,26	103,71	104,48	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 94,04 tersebut melampaui target IKU sebesar 90 dengan nilai capaian 104,48 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2020 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9.

TABEL 3.9

Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil Tahun 2016 s.d. 2020

Tahun	Realisasi			Target Tahunan
	Smt I	Smt II	Tahunan	
2020	94,73	93,34	94,04	90
2019	96,90	94,92	95,57	89
2018	93,77	95,05	94,41	87
2017	93,02	94,31	93,67	85
2016	94,13	94,2	94,17	82

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU mengalami dinamika naik dan turun mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Perbandingan realisasi IKU dalam rentang 2016 s.d. 2019 selaras dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.10.

TABEL 3.10

Perbandingan Realisasi IKU Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil s.d. 2020 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb	Keterangan
2020	94,04	-	-	tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada Renstra DJPb Tahun 2015-2020
2019	95,57	90,25	-	
2018	94,41	90	-	
2017	93,67	87,5	-	
2016	94,17	85	-	

Perbandingan realisasi IKU tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi s.d. 2020 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

Meskipun target IKU tercapai, untuk mendapatkan capaian maksimal diperlukan effort lebih terutama terkait pemenuhan kelengkapan data dan optimalisasi ruang peningkatan kualitas dalam analisis yang dilakukan. Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian IKU ini antara lain adalah dari 7 komponen penilaian KFR, 1 komponen telah mendapat nilai maksimal, terdapat 2 komponen yang masih perlu ditingkatkan lagi capaiannya, yaitu Aktivitas Kemanfaatan dan Kualitas Data. Sementara 4 komponen lainnya sudah memiliki nilai yang cukup tinggi dan mendekati nilai maksimal.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Menerapkan hasil feedback KFR pada periode sebelumnya untuk memperbaiki aspek yang kurang.
2. Koordinasi dengan pihak eksternal maupun internal untuk mendapatkan data yang lebih detail dan akurat untuk bahan penyusunan KFR.
3. Meningkatkan kualitas analisis dengan lebih banyak menggunakan analisis kuantitatif
4. Memperkaya bahan bacaan mengenai isu terkini untuk meningkatkan kualitas literasi para pegawai agar dapat memperbaiki kualitas KFR.
5. Mempelajari berbagai kebijakan pemerintah dan laporan berkala yang dikeluarkan lembaga dan jurnal akademik untuk menambah referensi dan kedalaman analisis KFR.
6. Meningkatkan kualitas desain grafis laporan dengan tetap berpedoman terhadap SE-61/PB/2017

Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (*action plan*) untuk meningkatkan capaian mendatang IKU tersebut yang dilakukan selama tahun 2020 (penanggung jawab: Bidang PPA II), yaitu dengan:

1. Melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian Kajian Fiskal Regional periode sebelumnya untuk memperbaiki aspek yang kurang dan meningkatkan aspek yang sudah baik.
2. Koordinasi dengan pihak eksternal maupun internal untuk mendapatkan data yang lebih detail dan akurat untuk bahan penyusunan KFR.
3. Memperkaya bahan bacaan mengenai isu terkini untuk meningkatkan kualitas literasi para pegawai agar dapat memperbaiki kualitas KFR
4. Mempelajari berbagai kebijakan pemerintah dan laporan berkala yang dikeluarkan lembaga dan jurnal akademik untuk menambah referensi dan kedalaman analisis KFR.
5. Mengikuti webinar statistika, dan juga mengikuti e-learning ekonomi untuk meningkatkan

teknik analisis dan kemampuan pegawai dalam mengolah data.

6. Meningkatkan kualitas desain grafis laporan dengan tetap berpedoman terhadap SE-61/PB/2017.
7. Meningkatkan koordinasi tim yang baik dan terarah agar laporan dapat selesai sebelum waktu yang ditentukan
8. Menambah aktifitas Kemanfaatan KFR dengan tetap berpedoman kepada ND-536/PB.2/2019

1c-N Nilai
kualitas LK
BUN
tingkat
Kanwil

Berdasarkan 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKABUN-Kanwil melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKKABUN-Kanwil berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan LK UAKABUN-Daerah seluruh KPPN di wilayah kerjanya. LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tersebut secara periodik (triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Dit. PK (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada Kanwil DJPb, Dit. APK memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu (1) ketepatan waktu (10%), (2) Akurasi Data (75%), (3) Kelengkapan Dokumen (5%), (4) Partisipasi (10%). Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Kanwil adalah sebagai berikut:

- Level 4 = 95-100 (Sangat Baik),
- Level 3 = 80-94 (Baik)
- Level 2 = 65-79 (Cukup)
- Level 1 = 0-64 (Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2020, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tahun 2019. Selanjutnya nilai realisasi IKU tersebut diperoleh dari hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat kanwil yang dilakukan oleh Direktorat APK. Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

**Target tahun
2020**

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 94 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020. Target IKU tahun 2020 sama dengan target tahun sebelumnya namun lebih besar dibandingkan dengan target tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 (ditargetkan 92).

**Realisasi
tahun 2020**

Realisasi IKU Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil Tahun 2020 adalah 99,65 berdasarkan hasil penilaian dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-263/PB/2020 Tentang Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan

Tingkat Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Serta Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Khusus Pinjaman Dan Hibah Tahun 2019.

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.11.

TABEL 3.11

Capaian IKU *Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil* tahun 2020

Target/ Realisasi	Tahunan	Pol /KP
Target	94	Maximize/ <i>Take Last Known</i>
Realisasi	99,65	
Nilai	106,01	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.11, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99,65 tersebut melampaui target IKU sebesar 94 (dengan nilai capaian 106,01) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2020 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12.

TABEL 3.12

Perbandingan Capaian IKU *Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil* Tahun 2016 s.d. 2020

Tahun	Realisasi	Target
2020	99,65	94
2019	99,47	94
2018	98,77	93
2017	97,63	93
2016	97,40	93

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan seluruh realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 telah memenuhi target yang telah ditentukan. Dengan demikian, capaian IKU di tahun 2020 (sebesar 99,65) diharapkan dapat menjadi pemacu peningkatan capaian di tahun berikutnya.

Perbandingan realisasi IKU dalam rentang 2016 s.d. 2020 selaras dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.13.

TABEL 3.13

Perbandingan Realisasi IKU *Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil* s.d. 2020 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2020	99,65	-	-	<i>tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target</i>
2019	99,47	92	-	
2018	98,77	92	-	
2017	97,63	92	-	
2016	97,40	92	-	

**Perbandingan
Realisasi IKU
tahun 2020
dan tahun
sebelumnya**

**Perbandingan
Realisasi s.d.
2020 dengan
Renstra
Kanwil DJPb
Provinsi
Gorontalo dan
Renstra DJPb**

**Isu,
permasalahan,
tindakan, dan
action plan**

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut adalah :

1. Dari penilaian LK BUN tersebut, terdapat dua unsur penilaian yang hasilnya belum optimal, yaitu:
 - Akurasi Data (75%) >> Capaian sebesar 74,67
 - Partisipasi (15%) >> Capaian sebesar 14,98%
2. Penilaian "Akurasi Data" berdasarkan data pada analisis LK dan CaLK, sedangkan penilaian "Partisipasi" mencakup: status rekonsiliasi (BAR siap download), penyelesaian TDK, pagu minus, saldo tidak normal, serta aset belum diregister.

Dengan demikian, dapat disimpulkan akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Beberapa data suspend atau Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) yang belum terselesaikan;
2. Beberapa satker yang tidak menyelesaikan rekonsiliasi sampai final (s.d. status BAR Siap Donwload);
3. Masih terdapat pagu minus, saldo tidak normal, aset belum diregister dan selisih TK/TM pada beberapa satker.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Melakukan pembinaan penyusunan LKBUN pada KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa;
2. Melakukan analisa secara komprehensif atas LK UAKBUN-D KPPN sebagai sumber utama penyusunan LKBUN Tingkat Kanwil;
3. Mengimbau satker agar menyelesaikan status rekonnya sampai final.
4. Pembentukan Tim Saber Rekon untuk asistensi/pembinaan on the spot pada satker yang rekonsiliasinya belum optimal.

Rekomendasi Rencana Aksi (*action plan*) yang dilakukan pada tahun 2020 untuk meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut (penanggung jawab: Bidang PAPK), yaitu dengan:

1. Secara aktif melakukan follow-up atas permasalahan penyusunan LKBUN yang dihadapi oleh KPPN;

Meningkatkan koordinasi dengan KPPN dan UAPPA-W lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo melalui media Zoom dan WhatsApp, atau asistensi/pembinaan secara on the spot dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.

Sasaran Strategis 2:

Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan adminisratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.14.

TABEL 3.14

Capaian IKU pada SasaranStrategis

Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, efisien

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,55	4,76	104,61

2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil merupakan salah satu IKU *Kemenkeu-Two* Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2020. IKU ini disusun untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. IKU ini merupakan nilai kepuasan pengguna layanan atas layanan unggulan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo terhadap pihak eksternal. Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap layanan revisi DIPA yang diberikan oleh Kanwil. Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing Kanwil dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh Bidang PPA I. Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 yaitu 5 = Sangat Puas; 4 = Puas; 3 = Cukup Puas; 2 = Kurang Puas; 1 = Tidak Puas. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target tahun 2020

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 4,55 dengan periode pelaporan tahunan. Target tersebut meningkat dari tahun 2019 sebesar 4,53. Target IKU tersebut lebih besar dari target yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 (target sebesar 4,18). Rincian skor indeks untuk aspek layanan revisi DIPA serta sarana dan prasarana yang diteliti dalam hasil survei tersebut pada tahun 2020 ditunjukkan pada

Realisasi tahun 2020

Tabel 3.15

TABEL 3.15

Rincian Skor Indeks Kepuasan atas Layanan Tahun 2020

No	Aspek Layanan	Indeks
1	Kinerja Layananan Revisi Dokumen Anggaran	4,76
2	Sarana dan Prasarana	4,77
Indeks Kepuasan Masyarakat		0,95 (sangat puas)

*tidak terdapat biaya untuk memperoleh layanan pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, melalui survei kepuasan pengguna layanan tersebut dapat diketahui bahwa target IKU *Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil* tahun 2020 dapat dipenuhi dengan capaian ditunjukkan pada Tabel 3.16.

TABEL 3.16Capaian IKU *Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil*

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	4,55	-	-	4,55	Maximize/ Take last known
Realisasi	-	4,76	-	-	4,76	
Nilai capaian	-	104,61	-	-	104,61	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.16, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4,76 tersebut (yang diperoleh pada triwulan II) melampaui target IKU sebesar 4,55 (dengan nilai capaian 104,61) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

Capaian IKU sebesar 4,76 tersebut merupakan yang tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun sebelumnya

Secara berturut-turut capaian IKU tersebut tahun 2016 s.d. 2020 yaitu : 4,33, 4,45, 4,69, 4,74 dan 4,76 sehingga dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan capaian IKU tersebut setiap tahunnya sejak tahun 2016 s.d tahun 2020 kecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan. Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2016 s.d 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.17.

TABEL 3.17Perbandingan Capaian IKU *Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil* Tahun 2016 s.d. 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Target	4.09	4.09	4.52	4,53	4,55
Indeks Realisasi	4,33	4,45	4,69	4,74	4,76

Dari tabel 3.17, dapat diketahui bahwa realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami kenaikan secara berturut-turut dan yang tertinggi berada di tahun 2020 dengan perolehan nilai 4,76.

Realisasi IKU pada tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi dari Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi IKU *Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil* dengan Renstra 2015-2020

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb	Keterangan
2020	4,76	-	4	<i>Tahun 2015-2019 dan Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target</i>
2019	4,74	4,18	4,15	
2018	4,69	4,15	4,12	
2017	4,45	4,12	4,09	
2016	4,33	4,09	4,06	

Perbandingan Realisasi s.d. 2020 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama terkait pencapaian IKU tersebut pada tahun 2020 adalah:

1. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, proses layanan dan penyelesaian revisi membutuhkan waktu yang lebih lama serta ketidakmampuan petugas dalam memberikan solusi permasalahan seperti terkait aplikasi RKAKL dan perbedaan penafsiran peraturan akan mempengaruhi tingkat kepuasan satker terhadap layanan Kanwil. Proses layanan secara online selama pandemic Covid ini mengacu pada SOP layanan terbaru sesuai dengan SE nomor 25/PB/2020. Setiap akhir minggu Kanwil selalu mengirimkan laporan BCP tingkat Es I agar apabila terdapat kendala permasalahan khususnya di layanan utama dapat segera dieskalasi di tingkat pusat.
2. Terwujudnya ruang layanan yang memadai dalam mendukung penyediaan layanan perbendaharaan negara.

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait pencapaian IKU tersebut adalah:

1. Bidang PPA I seringkali mengadakan mini GKM untuk para pegawainya untuk mendiskusikan ketentuan-ketentuan dalam PMK dan Perdirjen Perbendaharaan terkait revisi dan Aplikasi RKAKL sehingga dapat meningkatkan pengetahuan para pegawai dan pelayanan yang diberikan. Selain itu secara proaktif bidang PPA I juga membangun komunikasi dengan Dit PA pusat maupun dengan Dit. PSP di DJA terkait Peraturan Revisi dan permasalahan revisi.
2. Membuat forum komunikasi informasi dengan bidang PA I di Kanwil lain untuk menanyakan permasalahan dan menyamakan persepsi pelaksanaan aturan.
3. Koordinasi dan komunikasi secara efektif dengan seluruh stakeholder, aktif melakukan pembinaan baik melalui wag, sosialisasi ZOOM dan lainnya agar tidak mempengaruhi kualitas layanan ke satker selama menghadapi pandemi wabah covid. Kanwil DJPb Gorontalo juga telah melaksanakan peningkatan mutu layanan melalui diklat service excellent dengan pihak perbankan. Bidang PPA I juga telah melaksanakan bimtek terkait Aplikasi SAKTI modul penganggaran ke satker untuk meningkatkan pengetahuan satker terkait penggunaan aplikasi revisi
4. Pemenuhan sarana prasarana ruang front office sesuai dengan protocol kesehatan layanan tatap muka sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/328/2020.

Adapun secara umum rekomendasi rencana aksi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 dalam upaya meningkatkan Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil (Penanggung Jawab : Bidang PPA I dan Bagian Umum) adalah dengan terus berupaya meningkatkan fasilitas baik berupa layanan maupun sarana prasarana yang mendukung sesuai dengan perkembangan kebijakan standar layanan.

Sasaran Strategis 3:
Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh Kanwil DJPb dalam rangka pengelolaan perbendaharaan. Optimal adalah sesuai dengan kebutuhan, implementatif, dan tidak saling bertentangan. Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan.

TABEL 3.18
 Capaian IKU pada Sasaran Strategi
Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
3a-CP	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	101,93

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

3a-CP
Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu

Revisi dokumen pelaksanaan anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA. Berdasarkan PMK 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2020, untuk usulan revisi anggaran yang dapat ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menetapkan surat pengesahan revisi anggaran, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap. Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah revisi DIPA yang diselesaikan tepat waktu dan jumlah usulan revisi DIPA yang diterima dari satker. Dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{revisi DIPA yang diselesaikan tepat waktu}}{\sum \text{Usulan pengesahan revisi DIPA yang diterima dari satker}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan IKU tersebut, digunakan polarisasi data maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target tahun 2020

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020 adalah sebesar 100%, baik untuk target IKU tahunan maupun triwulanan. Target tersebut sama dengan target tahun 2019 (sebesar 100%).

Realisasi tahun 2020

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 adalah 100% yang diperoleh dari rata-rata Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.19.

TABEL 3.19

Capaian IKU *Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu* Tahun 2020

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Maximize/ Average
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	
Nilai Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun sebelumnya

Perbandingan IKU dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20

Perbandingan Capaian IKU *Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu* Tahun 2016 s.d. 2020

Target/Realisasi	2020	2019	2018	2017	2016
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan Realisasi s.d. 2020 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

Realisasi IKU pada tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 sedangkan tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.21.

TABEL 3.21

Perbandingan Realisasi IKU *Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu* s.d 2020 dengan Renstra.

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2020	100%	-	-	<i>tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target</i>
2019	100%	100%	-	
2018	100%	100%	-	
2017	100%	100%	-	
2016	100%	100%	-	

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama yang terjadi dalam pencapaian IKU tersebut antara lain adalah Keterlambatan proses penyelesaian revisi, dikarenakan adk yang dikirimkan dalam aplikasi SatuDJA gagal diupload di Aplikasi CW SPAN. Seringkali SPAN dan nadine terdapat maintenance yang berimbas proses pengesahan DIPA menjadi terlambat.

Akar permasalahan pencapaian IKU yang dapat disimpulkan dalam hal ini adalah Kesalahan proses create ADK pada aplikasi SAKTI oleh satker dan juga maintenance server dan data base pada Nadine dan juga CW SPAN.

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi IKU tersebut di antaranya :

1. *Broadcast message* pada grup pengelolaan satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo;
2. Melakukan pendampingan penggunaan aplikasi SAKTI;
3. Konsultasi dengan Puslay DJA, PA dan juga Pengembang Nadine.

Adapun rekomendasi rencana aksi yang telah dilakukan selama tahun 2020 adalah melakukan

refreshment penggunaan aplikasi SAKTI

Sasaran Strategis 4:
Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.22

TABEL 3.22
 Capaian IKU pada Sasaran Strategis

Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
4a-N	Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	90	97,78	108,64%
4b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87	93	106,90%
4c-N	Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%	100%	100%

4a-N Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan wajib melakukan pembinaan dan supervisi pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kepuasan masyarakat, Kanwil melalui tim Pembinaan dan Supervisi KPPN melakukan penilaian dan mapping kinerja KPPN dilingkup wilayah kerjanya berdasarkan indikator-inikator pada setiap unsur berikut:

1. Efektivitas & Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

3. Representasi Kementerian Keuangan Di Daerah
4. Tugas Khusus (Special Mission)
5. Tata Kelola Internal
6. Inovasi Dan Prestasi

Selanjutnya, paling lambat 31 Juli tahun berkenaan dan 31 Januari tahun berikutnya, Kepala Kanwil menyampaikan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan laporan dari Kanwil tersebut, Setditjen Perbendaharaan melakukan penilaian atas Laporan Kinerja KPPN lingkup Kantor Wilayah.

Pengisian realisasi IKU bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU Semester I tahun 2020 merupakan hasil pembinaan semester II tahun 2019 . Sedangkan realisasi IKU Semester II tahun 2020 merupakan rata-rata hasil pembinaan semester I tahun 2020.

Dalam perhitungan IKU tersebut, digunakan polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

**Target IKU
Tahun 2020**

Target IKU tersebut sebagaimana terdapat pada Kontrak Kinerja Tahun 2020 adalah 90. Target lebih tinggi dari periode sebelumnya yaitu 88 namun dengan wording yang berbeda.

**Realisasi IKU
Tahun 2020**

Realisasi IKU Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil tahun 2020 adalah 96,77. Capaian ini diperoleh dari rata-rata nilai kantor pusat dan nilai kedua KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Perhitungan IKU tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.23.

TABEL 3.23

Perhitungan IKU Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil tahun 2020

Target/ Realisasi	Semester I	Semester II	Tahunan	Pol /KP
Target	90	90	90	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	98,14	97,42	97,78	
Nilai Capaian	109,44	108,24	108,64	

Dengan demikian, realisasi IKU tersebut telah memenuhi target pada tahun 2020, yaitu sebesar 97,78 dengan nilai capaian 108,64, sebagaimana telah ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020. Perbandingan IKU Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu tahun 2016 s.d. 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.24.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun sebelumnya

TABEL 3.24

Perbandingan Capaian IKU Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil tahun 2016 s.d. tahun 2020

Target/Realisasi	2020	2019	2018	2017	2016
Target	90	88	90	85	80
Realisasi	97,78	96,77	97,36	96,49	100,84

Realisasi IKU pada tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 sedangkan tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra sehingga tidak ada target sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.25.

Perbandingan Realisasi s.d. 2020 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

TABEL 3.25

Perbandingan Realisasi IKU Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2020	97,78	-	-	tidak terdapat penargetan IKU
2019	96,77	75	-	tersebut pada Renstra DJPb Tahun 2015-
2018	97,36	75	-	2019 dan Tahun
2017	96,49	75	-	2020 Kanwil tidak
2016	100,84	75	-	menyusun Renstra sehingga tidak ada target

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.25, nilai realisasi tahunan IKU untuk tahun 2016 s.d. 2019 tersebut telah memenuhi target tahunan yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019.

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut adalah pedoman pembinaan dan supervisi terbaru adalah Perdirjen Perbendaharaan No. PER-24/PB/2019 dengan perubahan yang signifikan.

Akar permasalahan dalam hal ini yaitu beberapa komponen sangat berbeda dengan pedoman pada Perdirjen sebelumnya, terutama dalam hal tugas-tugas baru KPPN dan perhitungan nilai kinerja KPPN. Pada beberapa subkomponen, tidak adanya petunjuk teknis dari kantor pusat terhadap ketentuan yang mengatur mengenai output yang dihasilkan KPPN, misalnya Laporan RPA tingkat KPPN dan Analisis PNBP.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Melakukan monitoring harian secara rutin melalui OMSPAN terhadap kinerja KPPN sesuai dengan pedoman pembinaan KPPN.
2. Monitoring tindak lanjut atas hasil pembinaan yang sudah dilakukan pada periode semester II tahun 2019.

3. Pembinaan KPPN Marisa sudah dilakukan pada tanggal 18 Mei- 5 Juni 2020
4. Pembinaan KPPN Gorontalo sudah dilakukan pada tanggal 8-26 Juni 2020
5. Penyusunan LHPS PK KPPN
6. Monitoring Kinerja KPPN secara mingguan
Telah melakukan internalisasi Perdirjen Nomor: PER-24/PB/2020 kepada seluruh pegawai Kanwil DJPb Prov. Gorontalo, KPPN Gorontalo, dan KPPN Marisa secara daring pada tanggal 24 September 2020.
7. Telah membentuk Tim Pembinaan dan Supervisi Periode II Tahun 2020 (Keputusan Kakanwil DJPb Provinsi Gorontalo Nomor KEP-55/WPB.29/2020 tanggal 5 Oktober 2020).
8. Telah melakukan pembinaan dan supervisi periode II tahun 2020 di KPPN Marisa tanggal 12-23 Oktober 2020
9. Telah melakukan pembinaan dan supervisi periode II tahun 2020 di KPPN Gorontalo tanggal 9-20 November 2020
10. Dalam proses penyusunan LHPS Periode II tahun 2020.
11. Knowledge sharing terkait tugas-tugas KPPN yang menjadi objek baru dalam pembinaan dan supervisi Semester II tahun 2020.

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan pada tahun 2019 (penanggung jawab: Bidang SKKI), yaitu :

1. Melakukan monitoring kinerja KPPN melalui OMSPAN
2. Melakukan monitoring berkala atas temuan permasalahan yang masih berulang
3. Terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan KPPN
4. Meningkatkan monitoring pada capaian nilai yang belum optimal yang ditemukan selama Pembinaan dan Supervisi KPPN.
5. Meningkatkan koordinasi dengan para bidang/bagian terkait pemenuhan dokumentasi pembinaan yang dilakukan setiap bidang/bagian.

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (*stakeholders*) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb.

Untuk bimtek diukur dengan rata-rata hasil *post test* sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan hasil kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu semesteran) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada periode tersebut dibobot dengan formula sebagai berikut:

Capaian = hasil pos test 60% + hasil kuesioner 40%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan.

Formula perhitungan IKU tersebut adalah rata-rata Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi, dengan pembagian nilai seperti di bawah ini :

$0 < x \leq 20$ = sangat tidak efektif; $20 < x \leq 40$ = tidak efektif $40 < x \leq 60$ = kurang efektif; $60 < x \leq 80$ = efektif; $80 < x \leq 100$ = sangat efektif

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka

rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU Tahun 2020

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 87 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020. Target tersebut lebih tinggi dari target tahun sebelumnya yaitu sebesar 86.

Realisasi IKU Tahun 2020

Pada Bidang PAKP diperoleh dari penyelenggaraan sosialisasi atau bimtek dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Semester I Tahun 2020 Bidang PAKP telah menyelenggarakan dua kali bimtek (Bimtek Aplikasi SAIBA untuk Satker DK/TP dan Bimtek Rekon Kas & Aset untuk SKPD Kabupaten Boalemo) serta satu kali kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan LKKL untuk UAPPAW. Dari seluruh kegiatan tersebut diperoleh nilai rata-rata tertimbang sebesar **92,50**.

Pada Semester II Tahun 2020 Bidang PAKP telah menyelenggarakan dua kali bimtek (Bimtek secara daring kepada seluruh satker UAPPAW lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Bimtek Aplikasi Persediaan dalam rangka menunjang penyusunan LKPD

pada Pemda Kabupaten Pohuwato). Dari kegiatan tersebut diperoleh nilai rata-rata tertimbang sebesar **92,38**.

Pada Bidang PPA I, diperoleh dari kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti :

1. Semester I : Sosialisasi Peraturan Terkini Bidang Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 pada tanggal 10-11 Februari 2019 di Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan 17-18 Februari 2020 di KPPN Marisa. Penyelenggaraan Bimtek SAKTI pada tanggal 12-15 Februari 2020 kepada Satker terdaftar dan masih membutuhkan bimbingan SAKTI. Nilai Survei/Kuesioner Sosialisasi **89,05**.
2. Semester II : Bidang PPA I telah melakukan kegiatan sosialisasi Hibah di bulan Agustus 2020 yang diikuti oleh 90 satker dan juga sosialisasi EPA di bulan Oktober 2020 yang diikuti oleh 91 satker lingkup Kanwil DJPb se Gorontalo. Target yang dicapai dapat melampaui capaian di Smt. I yang seluruh kegiatannya dilakukan dengan menggunakan media online Zoom. Terdapat penyempurnaan dari sisi penyampaian, materi dan narasumber dan juga teknis pelaksanaan survei sehingga nilai yang diperoleh lebih baik. Nilai yang diperoleh yaitu **90,55**.

Pada Bidang SKKI, dengan uraian sebagai berikut :

1. Semester I telah dilaksanakan Bimtek Daring Tata Kelola TIK Perbendaharaan dan quiz Bimtek sebagai upaya pemenuhan tugas tersebut pada tanggal 15 s.d 19 Juni 2020. Materi (78 Slide presentasi) disajikan secara daring oleh Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi dan berisi tentang 4 topik utama yakni Perangkat Lunak, Perangkat Keras, Hai DJPb dan Keamanan Informasi TIK. Hasil Post test untuk seluruh Pegawai KPPN Gorontalo adalah 97.75 dan untuk KPPN Marisa adalah 97.31. Realisasi indeks Efektivitas edukasi dan komunikasi Bidang SKKI semester I tahun 2020 adalah **97.53**
2. Pelaksanaan Bimtek Daring Tata kelola TIK Perbendaharaan dan quiz Bimtek (Semester II) dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 di KPPN Marisa dan 27 November 2020. Pelaksanaa Bimtek Daring Tata Kelola TIK Perbendaharaan dan quiz Bimtek dilaksanakan dengan memberikan materi Supervisi Teknis Aplikasi secara langsung kepada pegawai KPPN dan berisi tentang 4 topik utama tata kelola TIK Perbendaharaan yakni Perangkat Lunak, Perangkat Keras, Hai DJPb dan Keamanan Informasi TIK. Hasil Post test untuk seluruh Pegawai KPPN Gorontalo adalah 95.00 dan untuk KPPN Marisa adalah 97.06. Realisasi indeks Efektivitas edukasi dan komunikasi Bidang SKKI semester II tahun 2020 adalah **96.03**.

Realisasi IKU Tahun 2020

Realisasi atas rata-rata hasil post test dan nilai kuesioner adalah sebesar 93 atau dengan nilai capaian 106,89 dari target IKU yang telah ditetapkan. Capaian IKU tersebut untuk tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.26.

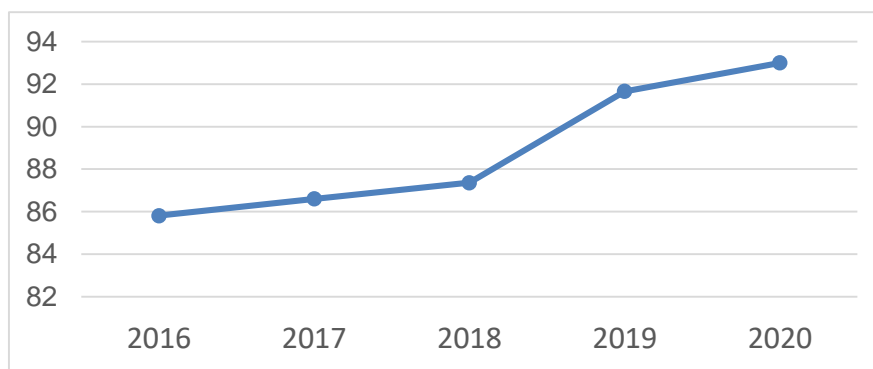
TABEL 3.26

Capaian IKU *Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi* Tahun 2020

Target/ Realisasi	Smt I	Smt II	Tahunan	Pol /KP
Target	87	87	87	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	93,02	92,99	93	
Nilai Capaian	106,92	106,88	106,89	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun sebelumnya

Realisasi *IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi* pada tahun 2020 lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2019 (91,66) serta lebih tinggi daripada realisasi IKU pada tahun 2018 (87,36), tahun 2017 (86,6), dan tahun 2016 (85,81).



Tidak ada target untuk IKU ini pada Renstra Kanwil maupun Renstra DJPb baik 2015-2019 maupun 2020-2024, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.27.

Perbandingan Realisasi s.d. 2020 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

TABEL 3.27

Perbandingan Realisasi IKU *Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi* dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2020	93			Tidak ada target untuk IKU ini pada Renstra Kanwil maupun Renstra DJPb baik 2015-2019 maupun 2020-2024
2019	91,66	-	-	
2018	87,36	-	-	
2017	86,60	-	-	
2016	85,81	-	-	

**Isu,
permasalahan,
tindakan, dan
action plan**

Meskipun telah memenuhi target yang telah ditentukan untuk tahun 2020, terdapat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan meeting online belum secara maksimal menjangkau satker untuk mengisi kuisisioner. Banyaknya permintaan survei sejenis membuat satker enggan untuk mengisi kuisisioner dan kanwil harus seringkali mengingatkan satker agar cepat mengisi kuisisioner yg disampaikan Kanwil
2. Masih belum ada penyelenggaraan kegiatan bimtek di PPA I sehingga belum dapat memperoleh nilai Post dan pretest. Untuk sosialisasi rencana akan dilakukan kegiatan EPA dan akselerasi penyerapan anggaran.
3. Peserta bimtek/sosialisasi kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber.
4. Beberapa satker kurang serius dalam mengisi lembar kuisisioner pelaksanaan sosialisasi.

Dapat disimpulkan akar masalahnya adalah:

1. Adanya perubahan berbagai peraturan, kebijakan, dan sistem terkait akuntansi dan pelaporan keuangan yang terjadi secara cepat
2. Peserta sosialisasi kurang memahami pentingnya hasil penilaian kuisisioner untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU tersebut antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan perbaikan atas kegiatan yang telah diselenggarakan sehingga hasil nilai post test atau nilai kuisisioner dapat meningkat.
2. Mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas *public speaking* dan kemampuan teknis kebijakan/peraturan serta aplikasi terkait akuntansi dan pelaporan keuangan

Selain itu, rekomendasi rencana aksi yang dilakukan terkait pencapaian IKU tersebut selama tahun 2020 (penanggung jawab: Bidang PAPK, Bidang PPA I, dan Bidang SKKI), yaitu:

1. Melakukan evaluasi dan perbaikan atas kegiatan bimtek/sosialisasi yang telah diselenggarakan, sehingga hasil nilai posttest/kuisisioner kedepannya menjadi lebih bagus.
2. Untuk kegiatan bimtek dengan peserta dari Pemda perlu ada penekanan khusus terhadap pokok materi yang disampaikan.

4c-N **Persentase
Tingkat
Implementasi
Aplikasi
SAKTI**

IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2020 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkupnya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI. Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2020, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut:

1. Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode semester I dan II tahun 2020 secara tepat waktu; dan
2. Pencapaian atas jumlah satker yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2020 secara nasional.

Dilaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan yang sudah mengalami adendum sebagaimana Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor : ND-1975/PB.1/2020 tanggal 30 Juni 2020 hal Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Periode Triwulan II Tahun 2020 sebagai berikut:

Tahapan	Tahapan Kegiatan	Target Waktu Pelaksanaan	Porsi
	Koordinasi, Supervisi, dan Monitoring		
Tahap 1	Pendampingan Transaksi awal tahun 2020 (SAKTI desktop)	Triwulan I	3%
Tahap 2	Pendaftaran email kedinasan domain @sakti.mail.go.id (Tahap I)	Triwulan I	3%
Tahap 3	Set up konfigurasi satker dan pendaftaran user SAKTI (Tahap I)	Triwulan I	3%
Tahap 4	Refreshment training SAKTI tahun 2020 (SAKTI Web dan Desktop)	Triwulan I - II	5%
Tahap 5	Pendampingan Migrasi Saldo awal SAKTI tahun 2020 berdasarkan LKKL Unaudited dan Audited (SAKTI Desktop) pada 5 K/L yang ditunjuk.	Triwulan II	6%
Tahap 6	Pendampingan pelaksanaan Revisi DIPA 2020	Triwulan II - IV	30%
Tahap 7	Publikasi Tahap I implementasi SAKTI Web	Triwulan II	4%
Tahap 8	FGD/Sosialisasi Tahap I implementasi SAKTI Web (SAKTI Web full Modul)	Triwulan III	4%
Tahap 9	Pelaksanaan Training Tahap I SAKTI Web (Modul Penganggaran / implementasi redesign Penganggaran) seluruh Satker KL	Triwulan III	5%
Tahap 10	Pendampingan penyusunan RKAKL/DIPA 2021	Triwulan III	10%
Tahap 11	FGD/Sosialisasi Tahap II implementasi SAKTI Web (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan)	Triwulan IV	4%
Tahap 12	Pelaksanaan Training Tahap II SAKTI Web (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan)	Triwulan IV	5%
Tahap 13	Publikasi Tahap II implementasi SAKTI Web	Triwulan IV	4%
Tahap 14	Pendaftaran email kedinasan domain @sakti.mail.go.id (Tahap II)	Triwulan IV	2%
Tahap 15	Set up konfigurasi satker dan pendaftaran user SAKTI (Tahap II)	Triwulan IV	2%
Tahap 16	Pendampingan implementasi SAKTI Web	Triwulan IV	10%

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

**Target IKU
Tahun 2020**

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah 100% sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020 lebih tinggi dari target tahun 2019 (95%). IKU tersebut merupakan IKU yang baru dilaksanakan pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mulai tahun 2018 dan telah ada pada IKU Kantor Pusat DJPb sejak tahun 2016.

**Realisasi IKU
Tahun 2020**

1. Tahap 1, Koordinasi, Supervisi, dan Monitoring Pendampingan Transaksi awal tahun 2020 (SAKTI desktop (N/A). Berdasarkan Nota Dinas dari Dit. SITP Nomor ND-326/PB.8/2020 tanggal 13 Maret 2020 hal Panduan Pelaksanaan IKU Kanwil DJPb (4c-N) dan KPPN (6b-CP) tentang Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI, KPPN Gorontalo, KPPN Marisa dan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo merupakan Unit vertikal Ditjen Perbendaharaan yang pada piloting SAKTI Tahap IV ini hanya memiliki mitra kerja Satker piloting SAKTI WEB. Oleh karenanya, sebagaimana dijelaskan pada ND tersebut diatas, nilai tahapan ini adalah (N/A).
2. Melakukan Koordinasi, Supervisi, dan Monitoring Pendaftaran email kedinasan domain @sakti.mail.go.id, Sejauh ini, progress pendaftaran email kedinasan @SAKTI.mail.go.id pada KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa berjalan dengan lancar, seluruh satker mitra kerja KPPN sangat kooperatif. Sampai dengan 31 Maret 2020 KPPN Gorontalo telah berhasil mendaftarkan 514 email kedinasan dari 223 satker, Jumlah mitra kerja KPPN Gorontalo yang harus memiliki user SAKTI WEB untuk tahun anggaran 2020 adalah 223 satker, jadi total presentase satker mitra kerja KPPN Gorontalo yang telah memiliki email kedinasan @SAKTI.mail.go.id adalah 100 %. Sedangkan untuk KPPN Marisa (dengan posisi cut off yang sama) telah berhasil mendaftarkan 128 email kedinasan dari 41 satker, Jumlah mitra kerja KPPN Marisa yang harus memiliki user SAKTI Web untuk tahun anggaran 2020 adalah 41 satker, total presentase satker mitra kerja KPPN Marisa yang telah memiliki email kedinasan @SAKTI.mail.go.id adalah 100 %. (Tahapan 2 bobot 6%).
3. Melakukan Koordinasi, Supervisi, dan Monitoring Set up konfigurasi satker dan pendaftaran user SAKTI. Progress pendaftaran user SAKTIWEB pada KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa berjalan dengan lancar, seluruh satker mitra kerja KPPN sangat kooperatif. Sampai dengan 30 Juni 2020 KPPN Gorontalo telah berhasil mendaftarkan 678 user SAKTIWEB dari 223 satker, Jumlah mitra kerja KPPN Gorontalo yang harus memiliki user SAKTI WEB untuk tahun anggaran 2020 adalah 223 satker, jadi total presentase satker mitra kerja KPPN Gorontalo yang telah memiliki User SAKTIWEB adalah 100 %. Sedangkan untuk KPPN Marisa (dengan posisi cut off yang sama) telah berhasil mendaftarkan 128 user SAKTIWEB dari 41 satker, Jumlah mitra kerja KPPN Marisa yang harus memiliki user

- SAKTI Web untuk tahun anggaran 2020 adalah 41 satker, total presentase satker mitra kerja KPPN Marisa yang telah memiliki user SAKTIWEB adalah 100 %. (Tahapan 3 bobot 6%).
4. Koordinasi, Supervisi, dan Monitoring Refreshment training SAKTI tahun 2020 (SAKTI Web dan Desktop) Dalam rangka akselerasi proses pendaftaran email kedinasan seluruh satker lingkup Provinsi Gorontalo, set up konfigurasi –user sakti dan refreshment training SAKTI tahun 2020 berupa penyegaran materi modul admin dan modul anggaran. KPPN Gorontalo, KPPN Marisa dan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah mengundang satker mitra kerja masing masing pada acara Bimtek dan Sosialisasi. KPPN Gorontalo melalui surat undangan nomor UND-001/WPB.29/KP0103/2020 tanggal 23 Januari 2020 hal Undangan Bimtek Aplikasi Instansi dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker lingkup KPPN Gorontalo Tahun Anggaran 2020, Sedangkan KPPN Marisa melalui surat undangan nomor UND-006/WPB.29/KP.02/2020 tanggal 23 Januari 2020 hal Sosialisasi Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2020 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2019.Sedangkan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo cq.bidang PPAI telah menyelenggarakan bimtek pendampingan modul anggaran SAKTIWEB kepada 120 Satker terpilih yang dilakukan pada 6-8 Februari 2020. Didalam ketiga acara tersebut satker-satker mitra kerja KPPN yang belum menyelesaikan proses administrasi pendaftaran email kedinasan dihimbau kembali untuk segera mengirimkan berkas-berkas persyaratan yang diperlukan ke KPPN. Pada acara tersebut, KPPN dan Kanwil juga melakukan asistensi / bimbingan dari permasalahan yang ditemui oleh satker dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan email kedinasan dan user SAKTI Web serta pelaksanaan training modul admin dan anggaran kepada satker di lingkup wilayah kerja masing-masing. (Tahapan 4 Bobot 8%)
 5. Tahap 5, Koordinasi, Supervisi, dan Monitoring Pendampingan Migrasi Saldo awal SAKTI tahun 2020 berdasarkan LKKL Unaudited SAKTI Desktop pada 5 K/L yang ditunjuk (N/A). Berdasarkan Nota Dinas dari Dit. SITP Nomor ND-326/PB.8/2020 tanggal 13 Maret 2020 hal Panduan Pelaksanaan IKU Kanwil DJPb (4c-N) dan KPPN (6b-CP) tentang Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI, KPPN Gorontalo, KPPN Marisa dan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo merupakan Unit vertikal Ditjen Perbendaharaan yang pada piloting SAKTI Tahap IV ini hanya memiliki mitra kerja Satker piloting SAKTIWEB. Oleh karenanya, sebagaimana dijelaskan pada ND tersebut diatas, nilai tahapan ini adalah (N/A).
 6. Tahap 6, Koordinasi, Supervisi, dan Monitoring Pendampingan pelaksanaan Revisi DIPA 2020 Triwulan II s.d IV (20% dari 30 %). Salah satu perubahan ketentuan pembobotan dari ND diatas adalah adanya besaran porsi dan perubahan waktu pelaksanaan untuk tahap 6 ini. KPPN dan Kanwil DJPb diminta untuk melakukan pendampingan kepada seluruh satker terhadap hal-hal yang diperlukan dalam proses revisi DIPA tahun 2020 pada SAKTI WEB.

- Mengingat proses revisi DIPA 2020 dapat dilakukan oleh Satker KL sampai dengan Desember 2020, maka kegiatan pendampingan proses revisi DIPA oleh KPPN dan Kanwil juga harus dilakukan pada triwulan II s.d IV. Porsi yang semula hanya berbobot 10 % dan hanya dilakukan pada triwulan II berubah menjadi sebesar 30 % dan harus dilakukan pada triwulan II (10%), triwulan III (10%) dan triwulan IV (10%).
7. Tahap 7, Koordinasi, Supervisi, dan Monitoring Publikasi Tahap I Implementasi SAKTI WEB (4%). Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah membuat ND Penegasan Penyampaian Publikasi SAKTI Kepada KPPN Gorontalo dan Marisa melalui ND-447/WPB.29/BD.04/2020 tanggal 23 Juni 2020 dan KPPN Gorontalo telah menyampaikan flyer Publikasi SAKTI tersebut kepada mitra kerjanya melalui S-467/WPB.29/KP.01/2020 tanggal 29 Juni 2020 sedangkan KPPN Marisa telah menyampaikan flyer Publikasi SAKTI tersebut kepada mitra kerjanya melalui S-203/WPB.29/KP.02/2020 tanggal 26 Juni 2020. Selain itu publikasi Tahap I Sakti WEB juga disebarakan melalui sarana media sosial seperti Facebook, Instagram dan Whatsapp Grup KPPN Gorontalo dan Marisa (4%).
 8. Tahap 8, FGD/Sosialisasi Tahap I Implementasi SAKTI Web (SAKTI Web Full Modul) (4%) Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-825/PB.8/2020 tanggal 02 September 2020 hal Refresment Training SAKTI Web Full Module, KPPN Marisa telah menindaklanjutinya dengan melakukan Focus Group Discussion internal secara online dengan fasilitas zoom dan tatap muka di aula KPPN Marisa yang telah dilaksanakan pada hari Rabu 23 September 2020. Sedangkan untuk KPPN Gorontalo telah melaksanakan FGD serupa pada tanggal 28 September 2020 dengan mengundang seluruh operator dan pejabat pengelola SAKTI pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, KPPN Gorontalo, KPP Pratama Gorontalo, KP2BC Gorontalo, dan KPKNL Gorontalo. Kedua acara tersebut membahas terkait Implementasi Modul Pelaksanaan, Modul Pelaporan SAKTI Web, One Time Password (OTP) dan security awareness SAKTI. (4%)
 9. Tahap 9 , Pelaksanaan Training Tahap I Sakti Web Modul Penganggaran/implementasi Redesign Sistem Penganggaran. Kegiatan Training Tahap I SAKTI Web (modul Penganggaran / implementasi RSP) dilaksanakan melalui zoom video conference, untuk KPPN Marisa kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sesuai dengan Undangan Nomor UND- 10/WPB.29/KP.02/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan untuk KPPN Gorontalo dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sesuai Nota Dinas Nomor ND-161/WPB.29/KP.01/2020 tanggal 13 Juli 2020. Kegiatan dilakukan oleh Trainer Sakti Modul anggaran kanwil, KPPN Marisa dan KPPN Gorontalo. Seluruh Satker Mitra Kerja Lingkup Provinsi Gorontalo telah mengikuti training daring tersebut (5%).
 10. Tahap 10 , Koordinasi, Supervisi, dan Monitoring Pendampingan penyusunan RKAKL/DIPA 2021 (10%). Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-

1907/PB.1/2020 tanggal 24 Juni 2020 hal Perubahan Trajectory / Rincian Kegiatan IKU Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI pada Kanwil dan KPPN, terdapat beberapa perubahan ketentuan. Salah satu perubahan ketentuan adalah adanya besaran porsi dan perubahan waktu pelaksanaan untuk tahap 10 ini. Kanwil, KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa telah melakukan pendampingan Penyusunan RKAKL 2021 via SAKTIWEB secara online dengan fasilitas zoom conference pada tanggal 12 Mei (Marisa) via Surat Tugas Nomor ST-102/WPB.29/2020 dan 19 Mei (Gorontalo) 2020 via Surat Tugas Nomor ST-110/WPB.29/2020 (10%)

11. Pendampingan Implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan) Pendampingan Implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan) (10%) pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap V berdasarkan Nota Dinas Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor ND-1249/PB.8/2020 tentang pemberitahuan Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap V. Untuk KPPN Gorontalo kegiatan dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 dan untuk KPPN Marisa dilaksanakan pada tanggal 04 November 2020.
12. Pendampingan penyusunan DIPA TA 2021 (RSPP) Berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor ND825/PB.8/2020 tanggal 02 September 2020 tentang Refreshment Training SAKTI Web Full Module, KPPN Gorontalo mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada Hari Senin tanggal 28 September 2020 Pukul 13.30 WITA pada Video Conference via Aplikasi ZOOM KPPN Gorontalo Meeting ID 995 639 3917. FGD ini menjelaskan implementasi SAKTI Web pada Kelompok Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan. Peserta Focus Group Discussion adalah Operator/Pemilik User SAKTI pada satuan kerja. (10%) dan KPPN Marisa telah melakukan pendampingan penyusunan DIPA 2021 dengan melakukan site visit pada tanggal 17 dan 18 November 2020 ke beberapa satuan kerja sesuai Surat Tugas Kepala KPPN Marisa nomor ST96/WPB.29/KP.02/2020 tanggal 17 November 2020. Selain itu KPPN Marisa melakukan monitoring penyusunan DIPA Tahun Anggaran 2021 pada FTP.anggaran.kemenkeu.go.id dengan jumlah satuan kerja yang berhasil menyusun DIPA Tahun Anggaran 2021 sebanyak 42 Satuan kerja. (10%)
13. Publikasi Tahap II implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan) kepada satker di luar peserta Piloting SAKTI Tahap I sd V. Publikasi Tahap II implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan) kepada satker di luar peserta Piloting SAKTI Tahap I sd V. (7%) Menindaklanjuti Nota Dinas dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor ND-1105/PB.8/2020 tanggal 06 November 2020 tentang Penyampaian Materi Komunikasi dan Publikasi Sakti Triwulan IV 2020 , KPPN Gorontalo mempublikasikan bahan komunikasi dan publikasi SAKTI berupa Flyer Keunggulan SAKTI Web, Fitur One Time Password, dan Aplikasi Panduan

SAKTI sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengenai SAKTI. (7%) Untuk KPPN Marisa akan segera melakukan publikasi/penyebarluasan informasi terkait SAKTI Web Full Module kepada satuan kerja melalui sarana Surat Kepala KPPN Marisa nomor S330/WPB.29/KP.02/2020 tanggal 10 November 2020 hal Penyampaian Materi Komunikasi dan Publikasi SAKTI Triwulan IV 2020. Selain itu KPPN Marisa juga menyampaikan materi publikasi pada akun media sosial Instagram dan google classroom. 7%

Realisasi tersebut mencapai target yang telah ditetapkan (100%) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.28.

Realisasi tahun 2020

TABEL 3.28

Capaian IKU Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Pol /KP
Target	20%	34%	60%	100%	100%	Maximize/ Take Last Known Value
Realisasi	N/A	44%	63%	100%	100%	
Capaian	N/A	120%	105%	100%	100%	

Perbandingan realisasi IKU 2020 dan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian IKU tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.28. Ditunjukkan bahwa tidak terdapat target (pada Kontrak Kinerja Kemenkeu- Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo) dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2016 dan 2017 karena IKU tersebut baru diterapkan pada tahun 2018.

Tabel 3.29

Perbandingan Capaian IKU Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI tahun 2016 s.d. 2020

Target/Realisasi	2020	2019	2018	2017	2016
Target	100%	95%	90%	-	-
Realisasi	100%	100%	100%	-	-

Perbandingan Realisasi s.d. 2020 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Renstra DJPb

Realisasi IKU tahun 2018 s.d. 2019 mencerminkan realisasi Renstra DJPb Tahun 2015-2019 sedangkan pada Tahun 2020 tidak ada target pada Renstra DJPb dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.30.

TABEL 3.30

Perbandingan Realisasi IKU Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2020	100%	-	-	pada Tahun 2020 tidak ada target pada Renstra DJPb maupun Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
2019	100%	-	86%	
2018	100%	-	86%	
2017	-	-	75%	
2016	-	-	100%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.30, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100% untuk tahun 2020 tersebut telah sesuai dengan target IKU tahunan.

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target tahun 2020, ada beberapa Potensi kendala (faktor yang mungkin menjadi penghambat) dalam pelaksanaannya diantaranya :

1. Tahapan tahapan pada IKU implementasi SAKTI tidak dianggarkan pada DIPA Kanwil.
2. Adanya potensi respons perubahan yang lambat dari perangkat pengelola keuangan SPSW-KL Respons dalam mengakomodir transisi dari aplikasi keuangan existing ke SAKTI

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Tahapan pada IKU implementasi SAKTI tahun 2020 ini digagas sesudah penyusunan RKA-KL 2020, hal ini mengakibatkan banyak tahapan kegiatan yang harus dilakukan secara global terkendala dari sisi pendanaan kegiatan.
2. Lambatnya koneksi jaringan intranet kemenkeu, Koneksi Internet K/L dan tingkat kompetensi SDM IT pada SPSW KL dapat menghambat proses transisi.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Bertanya secara formal lewat HAI-SPAN untuk meminta arahan dari Dit. SITP mengenai juknis detail akan tahapan implementasi SAKTI.
2. Pengenalan Aplikasi SAKTI dari Staff keuangan Kanwil / Trainer SAKTI kepada pegawai Kanwil Lainnya via GKM.
3. Koordinasi bersama antara para pengelola Aplikasi SAKTI Kanwil & KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa
4. Mengikuti Refresment Training SAKTI Manajerial tgl 26 OKT 2020 (ND-1051/PB.8/2020)
5. Mengikuti Vidcon Persiapan Pelaksanaan Migrasi SAKTI Web Full Module Tahap II tgl 5 Nov 2020 (ND-1091/PB.8/2020)
6. Melaksanakan koordinasi supervisis dan monitoring (KSM) atas kegiatan tahap 6 pelaksanaan pendampingan revisi DIPA triwulan IV 2020.

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan pada tahun 2020 adalah dengan optimalisasi FGD SAKTI, EUT SAKTI dan publikasi SAKTI sebagai upaya peningkatan respon perubahan transisi SAKTI.

Sasaran Strategis 5
Pengelolaan kas dan fasilitasi investasi yang pruden, efisien dan optimal

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden. Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah. Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.31.

TABEL 3.31
 Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengelolaan kas dan fasilitasi investasi yang pruden, efisien dan optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas kanwil	80%	100%	120%
5b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82	98	119,51

5a-N
Nilai kualitas laporan revidi pelaksanaan anggaran Kanwil

Uraian mengenai 2 (dua) IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:
 Akurasi Perencanaan Kas Kanwil merupakan rata-rata akurasi perencanaan kas KPPN di wilayah kerjanya. Perencanaan Kas (Renkas) KPPN adalah Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA. Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila realisasi deviasi Rencana Penarikan Dana satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD satker. PPDH adalah Perkiraan Pencairan Dana Harian, yang menjadi pagu pencairan tertinggi KPPN dalam satu hari. Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu. Dengan demikian, dapat diformulasikan perhitungan realisasi IKU sebagai berikut:

TRIWULAN I s.d. TRIWULAN II TAHUN 2020

100% - (Rata - Rata Deviasi RPD harian per periode)

Tingkat deviasi RPD diperoleh dari Laporan Deviasi dari Modul Renkas pada Aplikasi OMSPAN untuk kemudian disesuaikan dengan penyesuaian deviasi RPD. Penyesuaian deviasi adalah:

- a) Pemberian dispensasi RPD atas pengajuan SPM, deviasinya dihitung 0%.
- b) Penyesuaian RPD satker BA BUN yang tidak terealisasi SPM-nya.

- c) Penyesuaian RPD atas SPM-KP yang SPM-nya melebihi batas waktu update RPD Harian (4 hari kerja).
- d) Penghapusan deviasi pada RPD harian akibat satker tidak mengajukan SPM sesuai RPD harian yang telah disampaikan.
- e) Penghapusan deviasi pada beberapa RPD Harian yang nilainya sama di beberapa tanggal yang berurutan, tapi satker hanya mengajukan 1 SPM

TRIWULAN III s.d. IV TAHUN 2020

100% - (80%*Rata-Rata Deviasi RPD harian per periode + 20%*Rata-Rata Deviasi PPDH harian per periode)

Tingkat deviasi RPD diperoleh dari Laporan Deviasi dari Modul Renkas pada Aplikasi OMSPAN untuk kemudian disesuaikan dengan penyesuaian deviasi RPD. Penyesuaian deviasi adalah:

- a) Pemberian dispensasi RPD atas pengajuan SPM, deviasinya dihitung 0%.
- b) Penyesuaian RPD satker BA BUN yang tidak terealisasi SPM-nya.
- c) Penyesuaian RPD atas SPM-KP yang SPM-nya melebihi batas waktu update RPD Harian (4 hari kerja).
- d) Penghapusan deviasi pada RPD harian akibat satker tidak mengajukan SPM sesuai RPD harian yang telah disampaikan.
- e) Penghapusan deviasi pada beberapa RPD Harian yang nilainya sama di beberapa tanggal yang berurutan, tapi satker hanya mengajukan 1 SPM

Tujuan IKU ini adalah untuk mengoptimalkan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan pembinaan dan supervisi terhadap akurasi perencanaan kas satker.

Dalam perhitungan IKU tersebut, digunakan polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU Tahun 2020

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah 80% sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020, IKU ini merupakan IKU baru dan mulai dicantumkan pada tahun 2020.

Realisasi IKU Tahun 2020

Realisasi atas IKU Persentase akurasi perencanaan kas kanwil diperoleh dari modul perencanaan kas pada aplikasi OMSPAN atau laporan akurasi renkas dari KPPN. Capaian IKU tersebut untuk tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.32

TABEL 3.32

Capaian IKU Nilai kualitas laporan reuiu pelaksanaan anggaran Kanwil Tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Pol /KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	N/A	100%	N/A	N/A	100%	
Capaian	N/A	120%	N/A	N/A	120%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.32, realisasi IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 100% dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebesar 80% (dengan nilai capaian 120%). Adapun capaian di triwulan I, III, IV adalah N/A dikarenakan direlaksasi akibat dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan arahan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.

Sebagai catatan, IKU ini adalah IKU yang baru dicantumkan pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two pada tahun 2020 sehingga belum dapat dibandingkan capaiannya dari tahun ke tahun. Sehingga realisasinya belum dapat dibandingkan dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo 2015-2019 dan Renstra DJPb 2020-2024.

Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target tahun 2020, terdapat beberapa hal terkait yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

Berdasarkan ND-3000/PB.1/2020 hal Pengelolaan Kinerja DJPb Periode Tw III dan IV IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas kanwil adalah N/A.

1. Sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan dan Nota Dinas Direktur PKN ND1039/PB.3/2020 tanggal 19 Agustus 2020 disebutkan bahwa Satker dapat mengajukan SPM dengan klasifikasi transaksi besar tanpa menyampaikan RPD harian.
2. Kebijakan PPDH tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 karena upaya percepatan realisasi anggaran K/L di akhir tahun.

Akar permasalahan dari IKU ini adalah adanya pemberian dispensasi penyampaian RPD untuk percepatan penyerapan anggaran turut membantu realisasi capaian untuk IKU ini.

Rekomendasi rencana aksi (action plan) yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020 adalah:

1. Memberikan edukasi terhadap satker meskipun terdapat dispensasi penyampaian, namun informasi RPD tetap diperlukan oleh KPPN dan tetap disampaikan untuk membuat manajemen kas lebih baik
2. Koordinasi dengan KPPN agar satker terus meningkatkan penyampaian informasi RPD dan juga melakukan pemutakhiran data RPD ke KPPN

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah perlu melakukan tindakan terhadap permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah agar kewajiban Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Hukum Lainnya kepada Pemerintah dapat dipenuhi.

Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dimaksudkan untuk menjamin peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pinjaman dan kredit program, peningkatan koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada debitur, dan tercapainya pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran.

Untuk mengukur efektivitas tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah tersebut, diperlukan pengukuran kinerja yang dapat mencerminkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program. Kualitas pelaksanaan pembinaan diukur dari dua aspek, yaitu kualitas pembinaan itu sendiri serta ketepatan waktu penyusunan laporan.

Kualitas pembinaan dimaksudkan untuk mengetahui kesinambungan antara perencanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan pelaksanaan pembinaan dan monitoring yang berupa :

- a. Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman
- b. Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program

Ketepatan waktu laporan dimaksudkan sebagai salah satu alat early warning system (EWS) yang digunakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi dalam menghadapi permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah.

Mekanisme penilaian oleh Kantor Pusat DJPb adalah sebagai berikut:

$$Nilai = \left\{ \left(\sum \text{Kualitas Pembinaan} \times 80\% \right) + \left(\text{Ketepatan Waktu} \times 20\% \right) \right\}$$

$$\text{Kualitas Pembinaan} = \left\{ (A1 \times 10\%) + (A2 \times 15\%) + (A3 \times 5\%) + (A4 \times 70\%) \right\}$$

A1 = Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program

Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program

100 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program dibuat sesuai dan tepat waktu dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017

75 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program dibuat sesuai tetapi tidak tepat waktu dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan

No. PER-19/PB/2017

50 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program tidak dibuat sesuai dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017.

A2 = Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman

100 = Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017

50 = Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017

0 = Tidak dilakukan Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman

A3 = Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu

Tepat waktu adalah debitur melakukan rekonsiliasi pinjaman dengan kanwil sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat akhir Juli untuk Semester I dan akhir Januari tahun berikutnya untuk Semester II, atau mengacu pada kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Andal adalah rekonsiliasi dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi sebagai bentuk persetujuan atas kebenaran data. Komponen penghitungan IKU ini berdasarkan jumlah pinjaman yang harus dilakukan rekonsiliasi, bukan berdasarkan jumlah debitur, mengingat satu debitur dapat mempunyai pinjaman lebih dari satu.

$$\left(\frac{\sum \text{Pinjaman yang direkonsiliasi secara tepat waktu dan andal}}{\sum \text{Pinjaman yang seharusnya direkonsiliasi}} \right) \times 100\%$$

A4 = Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program

100 = Dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017

50 = Dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017

0 = tidak dilakukan monitoring

Tujuan IKU ini adalah Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pinjaman dan kredit program, koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada debitur, dan tercapainya pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran.

Target IKU Tahun 2020

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020 adalah sebesar 82, baik untuk target IKU tahunan maupun semesteran.

Realisasi IKU Tahun 2020

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 adalah 98 yang diperoleh dari penilaian kantor pusat dengan nilai capaian 119,51 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.33

TABEL 3.33

Capaian IKU *Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program* Tahun 2020

Target/Realisasi	Semester I	Semester II	Tahunan	Pol /KP
Target	82	82	82	Maximize/ Average
Realisasi	96	100	98	
Nilai Capaian	107,07	120	119,51	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun sebelumnya

Perbandingan IKU dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34

Perbandingan Capaian IKU *Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program* Tahun 2016 s.d. 2020

Target/Realisasi	2020	2019	2018	2017	2016
Target	82	78	75	97%	95%
Realisasi	98	100	91	N/A	100%

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.43, dapat dikatakan bahwa IKU tersebut memiliki capaian baik dan berhasil memenuhi target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun masing- masing.

Realisasi IKU ini pada tahun 2016 s.d. 2017 ditargetkan dalam Renstra Kanwil DJPb Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.35

TABEL 3.35

Perbandingan Realisasi IKU *Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program* s.d 2020 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2020	98	-	-	pada tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra
2019	100	-	-	
2018	91	-	-	
2017	N/A	97%	-	
2016	100%	95%	-	

Perbandingan Realisasi s.d. 2020 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama yang terjadi dalam pencapaian IKU tersebut antara lain adalah perlunya meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan penyalur dan debitur, serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penyaluran kredit program.

Akar permasalahan pencapaian IKU yang dapat disimpulkan dalam hal ini adalah :

1. Pihak bank tidak melakukan update kredit outstanding, sehingga beberapa debitur yang sudah lunas masih terdapat kredit di SIKP

2. Penetapan penerima subsidi UMKM dalam rangka PEN terkait kredit program ditentukan oleh penyalur, sementara data tsb tidak dapat diperoleh di aplikasi SIKP
3. Kegiatan kerjasama Pembiayaan Umi antara Bone Bolango dan Oegadaian mengalami kendala penyaluran selama semester I 2020 akibat pandemic COVID-19, sehingga dana tersalur per Mei 2020 belum mencapai 100%
4. Pinjaman daeran (RDI/RPD) dan penerusan pinjaman di Provinsi Gorontalo tidka/belum ada.
5. Adanya perubahan metode survei kredit program, yang sebelumnya secara langsung, berubah menjadi via telfon.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan monev, Kanwil telah bekerjasama dengan SKPD dan Penyalur terkait;
2. Berkoordinasi dengan Dit. SMI terkait kebijakan subsidi UMKM dan Penggunaan Aplikasi SIKP
3. Mengikuti sosialisasi dan Bimtek Penyaluran Kredit Program dan Pembiayaan Umi;
4. Monev KUR Sem. I 2020 tidak dapat dilaksanakan akibat Pandemi Covid-19
5. Penyusunan laporan melingkupi kegiatan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo selama Semster I 2020

Rekomendasi Rencana Aksi yang dilakukan pada tahun 2020 (penanggung jawab: Bidang PPA II), yaitu dengan:

1. Melakukan komunikasi yang intensif dengan Dit. SMI khususnya terkait pelaksanaan monitoring kredit program
2. Melakukan update dan pengawasan data realisasi dan penyaluran kredit program khususnya terkait program PEN;
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kredit program, dengan KPPN Gorontalo dan Marisa serta pemda setempat.
4. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan pihak penyalur
5. Melakukan penyusunan laporan sesuai dengan timeline yg ada dan ketentuan yang berlaku

Sasaran Strategis 6:
Monev Perbendaharaan yang optimal

Dalam rangka memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditetapkan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder. Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.36

TABEL 3.36
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Monev Perbendaharaan yang optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
6a-N	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	90	95,67	106,30%
6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	80	98,12	120%

6a-N Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil

Uraian mengenai 2 (dua) IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:
Reviu Pelaksanaan Anggaran merupakan salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya .

Tujuan disusunnya Laporan reviu pelaksanaan anggaran tersebut adalah untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran dari level satuan kerja sampai K/L, menghasilkan rekomendasi kebijakan mekanisme pelaksanaan anggaran, serta menilai apakah belanja pemerintah telah memenuhi tujuan, efisien, efektif dan berbagai indikator lain yang mewakili kinerja atau kualitas.

Sesuai ketentuan SE- 28/PB/2015, laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara periodik (semesteran) dan disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Laporan reviu pelaksanaan anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian dan penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata Kanwil dalam menyelesaikan dan meningkatkan kualitas Laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah. Terdapat beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam penilaian RPA, meliputi: kesesuaian tujuan, ruang lingkup, dan objek reviu RPA; Alur pikir/flow; Kualitas analisis dan inovasi; Ketajaman rekomendasi; Analisis aspek khusus; Format review/sistematika; Penyajian dashboard; Ketepatan waktu; dan Desain/layout.

Kategori kualitas nilai Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil adalah sebagai berikut:

Level 5 = 91-100 (Excellent)

- Level 4 = 75-90 (Good)
- Level 3 = 61-74 (Fair)
- Level 2 = 41-60 (Poor)
- Level 1 = 0-40 (Unqualified)

Pengisian realisasi disesuaikan dengan siklus dan karakteristik Laporan Review Pelaksanaan Anggaran yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU semester I tahun 2020 merupakan hasil penilaian Laporan semester II tahun 2019, dan untuk realisasi IKU semester II tahun 2020 merupakan hasil penilaian Laporan semester I tahun 2020.

Dalam perhitungan IKU tersebut, digunakan polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU Tahun 2020

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah 90 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020, lebih tinggi dari target tahun 2019 (89).

Realisasi IKU Tahun 2020

Realisasi atas Nilai kualitas laporan reuiu pelaksanaan anggaran Kanwil Laporan Reuiu Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada semester I Tahun 2020 dinilai oleh Direktorat PA melalui ND-357/PB/2020 tanggal 15 Mei 2020 dengan nilai melampaui target yang ditetapkan (96,47). Selanjutnya pada semester II Tahun 2020, berdasarkan ND Direktur Jenderal Perbendaharaan No. ND-3/PB/PB.2/2020 tanggal 19 November 2020 untuk Laporan Reuiu Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memperoleh nilai 94,87. Capaian IKU tersebut untuk tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.37.

TABEL 3.37

Capaian IKU Nilai kualitas laporan reuiu pelaksanaan anggaran Kanwil Tahun 2020

Target/ Realisasi	Smt I	Smt II	Tahunan	Pol /KP
Target	90	90	90	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	96,47	94,87	95,67	
Capaian	107,19	105,41	106,30%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.37, realisasi IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 95,67 dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebesar 90 (dengan nilai capaian 106,30).

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun sebelumnya

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2020 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada table 3.38.

TABEL 3.38

Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas laporan reuiu pelaksanaan anggaran Kanwil tahun 2016 s.d. 2020

Tahun	Realisasi			Target Tahunan
	Smt I	Smt II	Tahunan	
2020	96,47	94,87	95,67	90
2019	96,80	96,15	96,48	89
2018	94,65	96,3	95,48	87

2017	94,16	95,72	94,94	85
2016	91,71	92,77	92,44	80

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan seluruh realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Realisasi IKU pada tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi dari Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019, sedangkan tahun 2020 tidak terdapat target karena Kanwil tidak menyusun Renstra dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.39.

TABEL 3.39

Perbandingan Realisasi IKU Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2020	95,67	-	-	Pada Tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra
2019	96,48	95	-	
2018	95,48	95	-	
2017	94,94	95	-	
2016	92,44	95	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.39, dapat diketahui bahwa nilai realisasi IKU untuk tahun 2016 s.d. 2017 tersebut belum memenuhi seluruh target yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019.

Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target tahun 2020, terdapat beberapa hal terkait yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Juknis RPA smt I sangat detail sehingga menyebabkan kanwil sedikit melakukan inovasi/ analisis penyusunan RPA yang nantinya akan mempengaruhi banyaknya pembahasan dan akan menambah jumlah halaman yg telah ditetapkan
2. Terdapat perubahan Petugas Desain yang mempengaruhi hasil desain RPA seperti tahun-tahun sebelumnya

Akar permasalahan dalam hal ini antara lain:

1. Analisis dan penyajian data yang termuat pada Juknis RPA cukup banyak sehingga Kanwil terbatas untuk melakukan inovasi pada detail pembahasan yang akan mempengaruhi pada penilaian nantinya
2. Dengan waktu yang terbatas dan banyaknya penyajian data dan permintaan data unit eksternal yang harus dicantumkan pada RPA juga mempengaruhi kualitas pendalaman analisis.

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Berkoordinasi dengan KPPN untuk mengidentifikasi kendala- kendala pelaksanaan anggaran

2. Mencari dan menggali bahan informasi dari jurnal terkait
3. Mempelajari metode penelitian baru sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan.
4. Mengadakan Bimtek dengan pihak BPS untuk menambah pengetahuan baru pegawai tentang teknis pengolahan data.

Rekomendasi rencana aksi yang dilaksanakan pada tahun 2020 (penanggung jawab: Bidang PPA I), yaitu dengan:

1. Meningkatkan kemampuan analisis pegawai dengan cara FGD maupun mengikuti diklat dan bimtek
2. Melaksanakan identifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran secara lebih rinci, sehingga masih tersedia cukup waktu untuk konfirmasi dan mendalaminya
3. Melaksanakan SE tentang juknis penyusunan RPA dan guideline penyusunan RPA
4. Mempelajari metode penelitian terbaru, diskusi dengan kanwil lain atau juga mempelajari laporan RPA kanwil lain yang lebih baik
5. Mempelajari desain grafis untuk membantu menyelesaikan desain oleh petugas desain
6. Koordinasi yg baik dengan unit pemilik data sehingga data dapat dengan cepat diterima dan segera dilakukan analisis.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa.

Nilai Kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN (PROYEKSI).
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
5. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

SYARAT adalah rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengunggahan/upload melalui aplikasi omSPAN) dokumen persyaratan penyaluran DDD oleh pemda per jenis transfer per bidang/sub bidang per tahap penyaluran dengan mengacu pada ketentuan batas akhir yang disampaikan/dijelaskan/ditetapkan oleh Kantor Pusat mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait maupun Nota Dinas atau Surat resmi dari pejabat Menteri Keuangan/Eselon I/II Kantor Pusat.

Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DDD per jenis transfer per bidang per tahap penyaluran (NIKWPDP DDD) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1,00 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 3 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 2 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 1 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,85 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 1 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,80 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap tepat pada batas waktu yang ditentukan dokumen persyaratan disampaikan.

0,75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi)

SYARAT = Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian = $\sum \text{NIKWPDP DDD} / \text{Jumlah penyaluran DFDD per jenis transfer per bidang per tahap penyaluran yang dilakukan.}$

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SYARAT" bersifat data kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait

PROYEKSI adalah KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan Penyaluran DAK dan Dana Desa serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.

Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa adalah setiap 7 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan menggunakan aplikasi SAKTI.

PROYEKSI = % Akurasi Proyeksi = $100\% - (\text{Rata2 Deviasi Proyeksi Penyaluran DDD per periode})$

Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari:

Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DDD dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut:

1,00 = deviasi per periode 0%;

0,80 = deviasi per periode 1 % sd 15%

0,00 = deviasi per periode di atas 15%.

SSPSPM adalah indeks ketepatan waktu penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran diukur dengan menggunakan 2 variabel, yaitu penyelesaian tagihan dan penyelesaian retur SP2D penyaluran dengan mengacu pada ketentuan serta kriteria sebagai berikut:

- a. penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran dilakukan paling lambat 7 HK setelah dokumen persyaratan

telah diterima oleh KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.

- b. Ketepatan waktu penyelesaian retur SP2D Penyaluran DAK dan Dana Desa berdasarkan PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

$SPPSPM = (\text{Jumlah tagihan DAKDD yang diselesaikan proses pembayarannya tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tagihan DAKDD yang diproses KPPN} \times 0.8) + (\text{Jumlah penyelesaian retur SP2D Penyaluran DAKDD yang diproses secara tepat waktu} / \text{jumlah seluruh retur SP2D DAKDD} \times 0.2).$

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SPPSPM" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

MONEV adalah nilai indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Koordinator KPA penyaluran sesuai ketentuan pelaksanaan monev DAK dan Dana Desa. Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa oleh KPA Penyaluran disampaikan kepada Kanwil dengan tembusan kepada Koordinator KPA melalui alamat email subditpa4@gmail.com paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir.

Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAKDD oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1,00 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,95 = dokumen laporan monev disampaikan 3-2 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,85 = dokumen laporan monev disampaikan 1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,80 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.

0,65 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat sesudah batas waktu yang ditentukan.

0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

LK-UAKPA adalah indeks ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DFDD sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN adalah sebagai berikut:

- a. LK Bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya.

- b. LK Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli TA berjalan.
- c. LK Tahunan disampaikan paling lambat 5 Februari TA berikutnya.
- d. LK Tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April TA berikutnya

LK-UAKPA = prosentase ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN = $\frac{\sum \text{Laporan yang disampaikan tepat waktu pada Triwulan berkenaan}}{\sum \text{Laporan yang harus disampaikan pada Triwulan berkenaan}}$.

LK tingkat UAKPA BUN kepada UAKKPA disampaikan melalui ftp://172.16.2.124/ sesuai batas waktu yang ditentukan di atas (dapat ditentukan lain oleh surat Dirjen Perbendaharaan/Direktur APK)

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka hanya digunakan data pada periode triwulan berkenaan dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).

Penentuan Nilai Indeks ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN kepada UKKPA BUN dihitung dengan ketentuan sbb:

1,00 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,90 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan 3-1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,80 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.

0,50 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan terlambat sd 2 minggu dari batas waktu yang ditentukan.

0,25 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan terlambat diatas 2 minggu dari batas waktu yang ditentukan.

0,00 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan di atas 1 bulan atau tidak disampaikan

Dalam kondisi tertentu, batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/Surat yang diterbitkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah rata-rata Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa yang disalurkan melalui KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa. Dengan demikian, dapat diformulasikan perhitungan realisasi IKU sebagai berikut:

$$\bar{x} \text{ NKP DDD} = \frac{\sum \text{ NKP DDD di KPPN }]}{\text{Jumlah KPPN}}$$

$$\text{NKP DDD} = [0,15 (\text{SYARAT}) + (0,20 (\text{PROYEKSI}) + 0,30 (\text{SPPSPM}) + 0,15 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA})] \times 100$$

Dalam perhitungan IKU tersebut, digunakan polarisasi data maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (trajectory) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU Tahun 2020

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020 adalah sebesar 80, baik untuk target IKU triwulanan maupun tahunan.

Realisasi IKU Tahun 2020

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 adalah 98,12 yang diperoleh dari rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa yang telah memenuhi targetnya dengan nilai capaian 120 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.40

TABEL 3.40

Capaian IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN Tahun 2020

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	80	80	80	80	80	Maximize/ Average
Realisasi	98,89	98,41	98,65	96,52	98,12	
Nilai Capaian	120	120	120	120	120	

Perbandingan IKU dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41

Perbandingan Capaian IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN Tahun 2016 s.d. 2020

Target/Realisasi	2020	2019	2018	2017	2016
Target	80	75	70	-	-
Realisasi	98,12	96,86	87,53	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.41, meskipun IKU ini baru ditetapkan pada tahun 2018, dapat dikatakan bahwa IKU tersebut memiliki capaian baik dan berhasil memenuhi target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun masing-masing.

Tidak terdapat target pada Renstra Kanwil maupun Renstra DJPb untuk capaian IKU ini dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.42

TABEL 3.42

Perbandingan Realisasi IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN s.d 2020 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2020	98,12	-	-	Pada tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra.
2019	96,86	-	-	
2018	87,53	-	-	
2017	-	-	-	
2016	-	-	-	

Isu utama yang terjadi dalam pencapaian IKU tersebut antara lain adalah:

1. Nilai indeks proyeksi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN Gorontalo belum optimal pada Triwulan II 2020
2. Nilai pada variabel LK-UAKPA belum optimal di KPPN Marisa
3. Nilai pada variabel Proyeksi, SPPSPM, dan LK-UAKPA belum optimal di KPPN Gorontalo

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi s.d. 2020 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

su, permasalahan, tindakan, dan action plan

Akar permasalahan pencapaian IKU yang dapat disimpulkan dalam hal ini adalah :

1. Setiap tahunnya Pemerintah daerah selalu melingkupi syarat penyaluran DFDD mendekati batas penyaluran DFDD padahal untuk mendapat nilai optimal pemerintah daerah melingkupi syarat penyaluran 3 bulan sebelum batas penyaluran Tahap I.
2. Proses pengadaan barang dan Jasa lambat sehingga saat dikeluarkannya S-247/MK.07/2020 banyak bidang/subbidang DAK Fisik yang belum memiliki kontrak, hal tersebut mengakibatkan adanya pemotongan pagu DAK Fisik.
3. Beberapa Pemerintah Daerah melaksanakan work from home sehingga mengganggu proses koordinasi antara KPPN/Kanwil dengan Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa yang ada di daerah.
4. Workload KPPN yang besar akibat perubahan proses bisnis dan terdapat berbagai kebijakan penanganan COVID-19 menyebabkan proses penyusunan laporan monev baru dapat diselesaikan mendekati batas waktu yang ditentukan.
5. Terdapat relaksasi penyaluran DAK Fisik sesuai PMK 101 Tahun 2020 yang dapat mempengaruhi tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa;
2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Gorontalo dalam rangka percepatan pemenuhan syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
3. Mengadakan FGD dan Bimtek OM SPAN Terkait penyaluran DAK Fisik TA 2020 dengan mengundang narasumber dari Dit. PA
4. Mengikuti Diklat terkait Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik Tahun 2020
5. Melakukan pengawasan atas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilakukan oleh KPPN
6. Mengikuti Sosialisasi online bersama KPPN dan Pemerintah Daerah terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19
7. Melakukan supervisi pada KPPN Gorontalo untuk membahas capaian dan strategi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran kedepannya.

Rekomendasi Rencana Aksi yang dilakukan pada tahun 2020 (penanggung jawab: Bidang PPA II), yaitu dengan:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara online (vidcon) ataupun dengan media komunikasi

tidak langsung (telepon/whatsapp). Namun apabila dimungkinkan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara langsung

2. Meningkatkan kinerja pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa di KPPN dengan melaksanakan koordinasi serta evaluasi atas pemenuhan seluruh aspek penilaian kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang telah dilaksanakan KPPN
3. Mengingatkan KPPN secara berkala terkait laporan-laporan yang diperlukan terkait tuisi PPA II.

Sasaran Strategis 7: Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.43.

TABEL 3.43
 Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
7a-N	Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	78	92,62	118,74

7a-N Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Government Finance Statistic (GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam reformasi manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 tahun 2004 mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2013, Kanwil Ditjen PBN mengkonsolidasikan seluruh data LKPD dalam wilayah kerjanya untuk selanjutnya dikonsolidasikan dengan data LKPP tingkat wilayah. Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah selanjutnya diproses untuk menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (GFS regional). Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah ini selanjutnya secara periodik (triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) untuk dilakukan penilaian. Kategori nilai Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat Wilayah adalah sebagai berikut:

Level 4 = 90-100 (Sangat Baik)

Level 3 = 60-89 (Baik)

Level 2 = 40-59 (Cukup)

Level 1 = <39 (Kurang)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk mewujudkan laporan GFS tingkat Kanwil DJPb yang berkualitas.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU Tahun 2020

Target IKU tersebut sebagaimana terdapat pada Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2019 adalah 77 dengan periode pelaporan tahunan. Dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 terdapat IKU yang identik dengan IKU ini namun hanya mengukur dari sisi ketepatan waktu penyampaian laporan GFS sehingga tidak dapat dibandingkan secara *apple to apple*. IKU tersebut tidak ditargetkan pada Rencana Strategis (Renstra) DJPb Tahun 2015-2019, Restra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Realisasi IKU Tahun 2020

Realisasi IKU Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah adalah 95,16 berdasarkan hasil penilaian dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai KEP-267/PB/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Kriteria Penilaian dan Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun Pelaporan 2019.

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.44

TABEL 3.44

Capaian IKU Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah tahun 2020

Target/ Realisasi	Tahunan	Pol /KP
Target	78	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	92,62	
Nilai	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.44, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 92,62 tersebut melampaui target IKU sebesar 78 (dengan nilai capaian 120) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2020 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.45

TABEL 3.45

Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah Tahun 2016 s.d. 2020

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi	Target
2020	92,62	78
2019	95,16	77
2018	94,09	75
2017	95,35	70
2016	94,06	60

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU pada tahun 2018 mengalami penurunan. Namun demikian seluruh realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Realisasi IKU pada tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi dari Renstra Kanwil DJPb Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.46

TABEL 3.46

Perbandingan Realisasi IKU *Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah* s.d 2020 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2020	92,62	-	-	Pada tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra.
2019	95,16	3	-	
2018	94,09	3	-	
2017	95,35	3	-	
2016	94,06	3	-	

Isu, permasalahan tindakan, dan action plan

Meskipun realisasi sebesar tersebut telah mencapai target yang ditentukan, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Dari penilaian GFS yang ada, terdapat tiga unsur yang hasil penilaiannya masih perlu ditingkatkan, yaitu :

1. Kualitas Laporan (80%) >> Capaian sebesar 74,49%
2. Estetika Penyajian (2%) >> Capaian sebesar 1,88%
3. Partisipasi (10%) >> Capaian sebesar 8,25%

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda untuk mendapatkan LKPD sebagai sumber data pembuatan GFS.
2. Membentuk Forum Kabid Akuntansi (WA Group) dari seluruh BKD/BKAD Pemda lingkup Provinsi Gorontalo
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dit. APK dan berpartisipasi aktif terkait penyusunan laporan GFS.

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan pada tahun 2020 (penanggung jawab: Bidang PAPK), yaitu :

1. Meningkatkan ketelitian dalam melakukan konsolidasi data dan pencantuman pada face laporan maupun CaLK GFS.
2. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan SAPD pada Pemda untuk meningkatkan akurasi data LKPD.
3. Mengadakan FGD secara rutin dengan Bidang PPA II dalam rangka menjaga kesinambungan/keterkaitan data laporan GFS dan laporan KFR.
4. Secara aktif memberikan saran konstruktif terkait penyusunan GFS ke Dit APK dan mendokumentasikannya dengan tertib

Sasaran Strategis 8:
Organisasi dan SDM yang optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewedahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

TABEL 3.47
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Organisasi dan SDM yang optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	77	90,22	117,17%
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	88,25	106,33%
8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	83	91,14	109,81%
8d-N	Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	74	78,70	106,35%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

8a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai. Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan, yaitu 70% tuis eselon IV yang bersangkutan + 30% tuis/pengetahuan lainnya.

Untuk Kemenkeu-Two Kanwil, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai Kanwil. Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing. Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available). Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol). Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

Realisasi IKU Tahun 2020

Realisasi IKU tersebut tahun 2020, yaitu sebesar 90,22, telah melebihi target yang telah ditetapkan (77) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.48.

TABEL 3.48Capaian IKU *Nilai rata-rata hard competency pegawai* Tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-18	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	77	77	<i>Maximize/ Take Last Known Value</i>
Realisasi	-	-	-	-	-	90,22	90,22	
Capaian	-	-	-	-	-	117,17%	117,17%	

Realisasi tersebut tahun 2020 sebesar 90,22 meningkat dibanding realisasi tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan target dan realisasinya pada Tabel 3.49

TABEL 3.49Perbandingan Capaian IKU *Nilai rata-rata hard competency pegawai* Tahun 2016 s.d. 2020

Target/ realisasi	2016	2017	2018	2019	2020
Target KK	72	75	77	77	77
Realisasi	91,64	91,28	88,72	89,9	90,22

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.49, realisasi IKU tersebut pada tahun 2016 s.d. 2020 masing-masing telah melampaui targetnya.

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.50.

TABEL 3.50Perbandingan Realisasi IKU *Nilai rata-rata hard competency pegawai* s.d. 2020 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2020	90,22	-	-	Pada tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra.
2019	89,9	90	-	
2018	88,72	90	-	
2017	91,28	90	-	
2016	91,64	90	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.50 nilai realisasi tahunan IKU sebesar 90,22 untuk tahun 2020 telah meningkat dari capaian tahun 2019, namun demikian capaian IKU tahun 2019-2020 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan ruang lingkup perhitungan dimana dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo hanya mengukur dari sisi persentase jumlah pegawai yang mendapat nilai *hard competency 'baik'*.

Isu utama yang perlu menjadi perhatian selama pelaksanaan IKU ini adalah

1. Banyak ketentuan-ketentuan baru terkait tuisi pada masing-masing Bidang dan Bagian.
2. Dampak pandemi covid-19 berimbas kepada cara kerja yang meminimalisir tatap muka.

Akar masalah yang menjadi potensi penghambat pelaksanaan IKU ini adalah

1. Pelaksanaan ujian *hard competency* pada akhir tahun, dimana volume pekerjaan meningkat drastis, membuat pegawai kekurangan waktu untuk belajar.
2. Dampak pandemi covid mengakibatkan model pendampingan dalam pemberian pembelajaran kepada staf harus dilakukan dengan metode yang lain.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pemenuhan IKU tersebut, yaitu:

1. Melaksanakan GKM internal, knowledge transfer, maupun coaching and counseling terkait tuisi masing-masing Bidang/Bagian

2. Mengusulkan diklat, FGD, Seminar, studi banding, dan kegiatan sejenis.
3. Memotivasi pegawai untuk terus meningkatkan hard competency.
4. Dilakukan CnC tiap triwulan.

Rekomendasi rencana aksi yang telah dilakukan untuk pemenuhan hard competency di tahun 2020 (penanggung jawab: Bagian Umum), yaitu dengan:

1. Terus mempelajari aturan terkait tuis masing-masing Bidang/Bagian.
2. Melakukan pendampingan untuk melakukan pembahasan materi umum terkait keuangan negara, budaya organisasi, sosial kultural, dan kode etik.
3. Menyusun jadwal GKM Internal dan FGD
4. Melakukan coaching dan counseling secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Penilaian tersebut dilakukan oleh Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Kepatuhan Internal. Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen No. KEP-415/PB/2017 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%)
2. Kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%)
3. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

IKU ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Realisasi IKU ini diperoleh dari hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari kantor Pusat Ditjen Perbandaharaan.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

Target tahun 2020

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 83 dengan periode pelaporan tahunan. Target tersebut sama dengan target tahun 2019 namun lebih besar dari target tahun 2018 (78).

Realisasi tahun 2020

Realisasi IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal adalah 88,25 berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal dari kantor Pusat Ditjen Perbandaharaan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-304/PB/2020 tentang Penetapan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal Tahun 2020. Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.51.

TABEL 3.51
Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal tahun 2020

Target/ Realisasi	Tahunan	Pol /KP
Target	83	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	88,25	
Nilai	106,33	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.51, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 88,25 tersebut melampaui target IKU sebesar 83 (dengan nilai capaian 106,33) yang ditetapkan dalam Kontrak

Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

Perbandingan realisasi s.d. 2020 dengan tahun sebelumnya

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2020 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.52.

TABEL 3.52

Perbandingan Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2016 s.d. 2020

Tahun	Realisasi	Target
2020	88,25	83
2019	86,9	83
2018	93,02	78
2017	89,31	77
2016	82,66	75

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Perbandingan Realisasi s.d. 2020 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi dari Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.53

TABEL 3.53

Perbandingan Realisasi IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal s.d. 2020 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2020	88,25	-	-	Pada tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra
2019	86,9	80	-	
2018	93,02	80	-	
2017	89,31	80	-	
2016	82,66	80	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.53, meskipun realisasi IKU pada tahun 2019 mengalami penurunan namun nilai realisasi tahunan IKU untuk tahun 2016 s.d 2020 telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019.

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Meskipun realisasi sebesar tersebut telah mencapai target yang ditentukan, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu objek penilaian hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal mempunyai cakupan yang luas yang meliputi penerapan manajemen risiko, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, kode etik dan disiplin pegawai serta pengendalian gratifikasi dan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil audit (LHA) aparat pengawas fungsional.

Akar masalah dari isu tersebut adalah :

1. Pedoman penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal diterima pada akhir periode penilaian (Oktober 2020)
2. Tidak/belum semua pegawai yang menangani tugas kepatuhan internal pernah mengikuti pelatihan/workshop/bimtek/diklat dan kegiatan-kegiatan tersebut relative masih jarang dilakukan sehingga persepsi/implementasi dalam pelaksanaan tugas bisa berbeda-beda.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Pemantauan Kode Etik Pegawai metode Desk Review: 31 Januari, 21-22April, 16 Juli dan 26 Oktober 2020.
2. Pemantauan Kode Etik Pegawai metode Inspeksi Mendadak: 19 & 26 Februari, 28 Agustus, 11&12 November 2020; (Inovasi Penertib 11 November 2020);
3. Pemantauan Kode Etik Pegawai metode Pengawasan Diam-diam (Surveillance): 16 & 18 Juni 2020, 17&18 Desember 2020;
4. Pemantauan Kode Etik Pegawai metode Observasi: 11 Maret 2020;
5. Laporan Rekapitulasi Pengendalian Gratifikasi periode bulanan dan triwulanan s.d. Desember 2020;
6. Laporan Penanganan Pengaduan periode bulanan dan triwulanan s.d. Desember (Inovasi Lapor 26) 2020;
7. Penandatanganan Pakta Integritas Pejabat dan Pegawai Tahun 2020: 28 Januari 2020;
8. Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi periode bulanan s.d. Desember 2020
9. Pemantauan Manajemen Risiko periode s.d. triwulan III 2020, Inovasi RabaRis Desember 2020;
10. Pemantauan Pengendalian Utama periode bulanan s.d. Desember 2020;
11. Profiling 5 Pejabat Eselon IV tgl.29 Juli 2020 ND-558/WPB.29/2020.
12. Penyusunan Laporan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal s.d. November 2020;
13. Laporan Pelaksanaan Fraud Risk Scenario (FRS) Tahun 2020;
14. Penanganan Benturan Kepentingan bulanan s.d. Desember 2020;
15. Menyusun Laporan Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK periode bulanan s.d.November 2020
16. Mempelajari peraturan dengan baik
17. Berpedoman pada SOP yang berlaku
18. Mengupayakan setiap kegiatan dilaksanakan tepat waktu dan penyampaian laporan-laporan tugas-tugas KI dilakukan sebelum jatuh tempo
19. Mendorong pegawai untuk mengikuti sosialisasi/diklat/bimtek/ workshop terkait dengan tugas-tugas kepatuhan internal
20. Penilaian Kinerja tugas KI KPPN Gorontalo 99,594 pada 16November 2020;
21. Penilaian Kinerja tugas KI KPPN Marisa 99,388 pada 15 November 2020.

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan pada tahun 2019 (penanggung jawab: Bidang SKKI),

1. Mendorong pegawai untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan laporannya dengan berpedoman kepada pedoman penilaian terbaru
2. Mendorong pegawai untuk mengikuti sosialisasi/diklat/bimtek/workshop terkait dengan tugas-tugas kepatuhan internal.

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2020 (70%).
- b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2019 (30%).

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization** bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di setiap unit lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

Target IKU Tahun 2020

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 83 dengan periode pelaporan tahunan. Target tersebut sama dengan target tahun 2018 (83) namun lebih besar dari target tahun 2018 (81). Target tersebut lebih besar dari target IKU pada Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2015- 2019. Untuk tahun 2019 terdapat perbedaan *wording* IKU yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo yaitu IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja.

Realisasi IKU Tahun 2020

Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* adalah 91,14 berdasarkan hasil penilaian kualitas Pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-303/PB/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Penetapan peringkat penilaian pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020.

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.54.

TABEL 3.54

Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* tahun 2020

Target/ Realisasi	Tahunan	Pol /KP
Target	83	Maximize/ <i>Take Last Known</i>
Realisasi	91,14	
Nilai	109,80	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.54, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 91,14 tersebut melampaui target IKU sebesar 83 (dengan nilai capaian 108,90) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2019 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.55.

TABEL 3.55

Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* Tahun 2016 s.d. 2020

Tahun	Realisasi	Target
2020	91,14	83
2019	93,27	83
2018	94,27	81
2017	89,31	79
2016	86,42	77

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun capaiannya sempat mengalami penurunan, namun secara keseluruhan telah memenuhi target yang telah ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.56

TABEL 3.56

Perbandingan Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* s.d. 2020 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2020	91,14	-	-	Pada tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra
2019	93,27	80	-	
2018	94,27	80	-	
2017	89,31	80	-	
2016	86,42	75	-	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi s.d. 2020 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

**Isu,
permasalahan,
tindakan, dan
action plan**

Terdapat beberapa isu terkait dan menjadi tantangan pencapaian pencapaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*, antara lain :

1. Nota Dinas terkait Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020 baru diterima bulan Juli Tahun 2020 yaitu ND-2036/PB.1/2020 tanggal 6 Juli 2020.
2. Kondisi wabah Covid-19 sedikitnya berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan dokumen terkait Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan berbasis *Strategy Focused Organization (SFO)*.

Akar masalah dari hal tersebut diantaranya adalah ketentuan terkait penyusunan laporan SFO baru diterbitkan di pertengahan tahun sehingga banyak kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan di awal tahun menjadi menumpuk di pertengahan tahun.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pemenuhan IKU tersebut, yaitu:

1. Pelaksanaan Performance Dialogue/DKO setiap bulan
2. Selalu melakukan koordinasi dengan dengan PIC pengelolaan kinerja baik di Kanwil dan KPPN dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja;
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan ke KPPN dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kinerja;
4. Reviu dan kegiatan penyusunan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja dilakukan setiap hari/ setiap kegiatan yang dapat dilaksanakan lebih awal segera dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan volume pekerjaan di tiap akhir periode pelaporan;
5. Koordinasi dengan PIC Kantor dalam rangka peningkatan kualitas laporan untuk periode berikutnya. Pusat

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan di tahun 2020 (penanggung jawab: Bagian Umum), yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan PIC Kantor Pusat agar memperoleh petunjuk dan arahan dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan laporan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.
2. Melakukan GKM/FGD dengan seluruh pegawai Kanwil terkait penyusunan laporan tersebut.

8.1. N
Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan

Program Literasi Perbendaharaan dicanangkan pada tahun 2018 sebagai salah satu program Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2018 dan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-4/PB/2018 tentang Program Perbendaharaan Menulis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Berdasarkan nota dinas Sekretaris DJPb nomor ND-890/PB.1/2020 tanggal 11 Maret 2020 hal Pelaksanaan Pengembangan Literasi Perbendaharaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020, pelaksanaan Literasi Perbendaharaan dilaksanakan secara tahunan dan dikembangkan dengan konsep sebagai berikut:

Tahapan 1, penguatan proses literasi. Nilai diperoleh dari nilai e-learning dengan bobot 25%.

Bukti raw data kegiatan e-learning yaitu nilai yang diperoleh secara online dari aktivitas e-learning.

Tahapan 2, penguatan konten. Nilai diperoleh dari nilai training (IHT) dengan bobot 35%.

Bukti raw data untuk IHT adalah nilai aktivitas yang diberikan oleh trainer IHT.

Tahapan 3, penyusunan tulisan. Nilai diperoleh dari nilai tulisan yang telah dikirimkan dan/atau dipublikasikan dengan bobot 40%.

Bukti raw data berupa dokumentasi yang telah disediakan pada Forum Perbendaharaan dengan tema perbendaharaan negara, keuangan, dan ekonomi yang diterbitkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan, berupa foto, gambar, atau daftar.

IKU ini diukur dengan menghitung pembobotan atas ketiga tahapan di atas.

Target IKU Tahun 2020

Target IKU tersebut adalah 74 sesuai dengan target yang tercantum pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two tahun 2020. Sebagai catatan, IKU ini baru saja ditambahkan ke dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two mulai tahun 2020 sehingga belum dapat dibandingkan capaiannya dari tahun ke tahun maupun dibandingkan dengan Renstra Kanwil DJPb Povinsi Gorontalo dan Renstra DJPb.

Realisasi IKU Tahun 2020

Pada tahun 2020 telah tercapai nilai sebesar 78,70 yang berasal dari rata-rata nilai literasi eselon III dan eselon IV lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.57.

TABEL 3.57

Capaian IKU Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan tahun 2020

Target/ Realisasi	Tahunan	Pol /KP
Target	74	Maximize/ <i>Take Last Known</i>
Realisasi	78,70	
Nilai	106,35	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.57, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 78,79 tersebut melampaui target IKU sebesar 74 (dengan nilai capaian 106,35) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

**Isu,
permasalahan,
tindakan, dan
action plan**

Meskipun pelaksanaan IKU ini telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa isu yang perlu menjadi perhatian di antaranya :

1. Adanya perubahan penugasan literasi dari sebelumnya yang penilaian hanya berdasarkan output tulisan menjadi penilaian yang lebih komprehensif mulai dari e-learning, In House Training (IHT) sampai penilaian hasil tulisan, serta perubahan komposisi hasil penilaian. Pelaksanaan e-learning dan PJJ untuk wilayah Gorontalo berakhir akhir September 2020.
2. Tidak adanya informasi terkait komponen penilaian terhadap tulisan yang dibuat

Adapun akar masalah dari isu tersebut adalah :

1. Semakin terbatasnya waktu yang disediakan untuk melaksanakan literasi yang disediakan
2. Sulit untuk memperbaiki tulisan dikarenakan komponen penilaian yang tidak transparan

Untuk mengatasi isu tersebut, kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah melaksanakan beberapa tindakan di antaranya:

1. Mengikuti e-learning terkait literasi pada tanggal 8 – 11 September 2020
2. Mengikuti In House Training/Pembelajaran Jarak Jauh terkait literasi dalam dua batch yaitu tanggal 21 - 23 September 2020 dan tanggal 28 -30 September 2020

Adapun rencana aksi yang telah dilaksanakan di antaranya mengimplementasikan hasil e-learning dan In House Training ke dalam karya tulis ilmiah dan karya tulis ilmiah populer dan mengirimkan karya tulis tersebut ke media-media yang direkomendasikan.

Sasaran
Strategis 9:

Pengelolaan
keuangan dan
BMN yang
optimal

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi. Dalam pencapaian SS ini, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.59.

TABEL 3.59

Capaian IKU pada Sasaran Strategis

Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
9a-N	Persentase pemenuhan BMN yang optimal	92%	98,15%	106,68%
9b-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%	97,49%	102,62%

11a-N Persentase
pengelolaan
BMN yang
optimal

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Pengelolaan BMN yang optimal diukur melalui beberapa komponen, sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan RP4

Kesesuaian pelaksanaan RP4 diukur dari persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan (pelaksanaan pemanfaatan diukur sampe penerbitan SK sewa), Persentase pelaksanaan Alih Fungsi atas Rencana Penggunaan, dan persentase penghapusan atas rencana penghapusan.

2. Persentase completeness data master aset

Master Aset di aplikasi SIMAN berisi data-data informasi manajemen terkait BMN. Data-data ini kemudian digunakan oleh berbagai plugin di SIMAN seperti sensus BMN, RKBMN, Wasdal, dsb. Pencatatan BMN yang tertib atas aset tersebut penting peranannya dalam mendukung pengambilan keputusan dan monitoring. Profil BMN penting untuk diisi lengkap pada master aset di aplikasi SIMAN. Profil BMN yang perlu dilengkapi untuk bangunan yaitu detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan), foto, batas dan GPS, ruangan, fasilitas, dan konstruksi. Sedangkan untuk tanah yaitu detail BMN (alamat, luas, pengguna), foto, batas dan GPS, dokumen, bangunan, pengelolaan, dan status hukum. Adapun jenis BMN yang menjadi target yaitu Tanah Bangunan Kantor

Pemerintah (Tanah dan Bangunan) dan dan Bangunan Gedung Kantor Permanen.

3. Persentase PNBPN atas pengelolaan BMN

Diukur dari realisasi PNBPN atas pengelolaan BMN dibandingkan dengan target pendapatan PNBPN atas pengelolaan BMN. Data realisasi PNBPN diambil dari Laporan realisasi pendapatan masing-masing unit.

4. Persentase penyelesaian PSP atas penambahan jumlah BMN

Dalam rangka peningkatan pengelolaan data BMN yang optimal pada Kantor Vertikal DJPb, dilakukan evaluasi oleh Kantor Pusat berdasarkan pengukuran sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan

a. Persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan

$$\text{Realisasi a} = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan sewa BMN}}{\text{Jumlah Rencana Pemanfaatan dalam bentuk sewa}} \times 100\%$$

b. Persentase pelaksanaan Alih Fungsi atas Rencana Penggunaan

$$\text{Realisasi b} = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan alih fungsi BMN}}{\text{Jumlah Rencana Penggunaan dalam bentuk alih fungsi}} \times 100\%$$

c. Persentase Pelaksanaan Penghapusan atas Rencana Penghapusan

$$\text{Realisasi c} = \frac{\text{Jumlah BMN yang ditetapkan SK Penghapusan}}{\text{Jumlah BMN dalam rencana penghapusan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi 1} = \frac{\text{Realisasi a} + \text{Realisasi b} + \text{Realisasi c}}{3} \times 100\%$$

2. Persentase completeness data master aset

$$\text{Realisasi 2} = \frac{\text{Jumlah profil master aset yang diisi lengkap}}{\text{Jumlah profil master aset}} \times 100\%$$

3. Persentase PNBPN atas pengelolaan BMN

$$\text{Realisasi 3} = \frac{\text{Jumlah nominal PNBPN atas pengelolaan BMN}}{\text{Jumlah target PNBPN atas pengelolaan BMN}} \times 100\%$$

4. persentase penyelesaian PSP atas penambahan jumlah BMN

$$\text{Realisasi 4} = \frac{\text{Jumlah BMN Kemenkeu yang diusulkan PSP ke Pengguna Barang}}{\text{Jumlah penambahan BMN Kemenkeu berdasarkan laporan SIMAN Semester II 2019}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pemenuhan BMN yang optimal bertujuan untuk mendorong Unit Vertikal DJPb dalam menyusun/merumuskan strategi pengelolaan BMN secara optimal.

**Target IKU
Tahun 2020**

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah 92% sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020.

**Realisasi IKU
Tahun 2020**

Realisasi IKU Persentase pemenuhan BMN yang optimal tahun 2020 adalah 98,15% sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-37/PB.1/2021 hal Penyampaian Nilai Capaian IKU Pengelolaan BMN yang Optimal Tahun 2020.

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.60.

TABEL 3.60
Capaian IKU *Persentase pengelolaan BMN yang optimal* tahun 2020

Target/ Realisasi	Smt I	Smt II	Tahunan	Pol /KP
Target	70%	92%	92%	<i>Maximize/ Take Last Known Value</i>
Realisasi	93,03%	98,15%	98,15%	
Nilai	120%	106,67%	106,67%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.60, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 98,15%% tersebut melampaui target IKU sebesar 92% (dengan nilai capaian 106,67%) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahunan 2020 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.61.

TABEL 3.61
Perbandingan Capaian IKU *Persentase pengelolaan BMN yang optimal* Tahun 2016 s.d. 2020

Tahun	Realisasi			Target Tahunan
	Smt I	Smt II	Tahunan	
2020	93,03%	98,15%	106,67%	92%
2019	84,68%	96,32%	104,69%	92%
2018	95,62%	103,02%	103,02%	91%
2017	90,80%	94,97%	94,97%	90%
2016	93,36%	92,82%	92,82%	80%

Perbandingan Realisasi s.d. 2020 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi dari Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.62.

TABEL 3.62
Perbandingan Realisasi IKU *Persentase pemenuhan BMN sesuai standar* s.d. 2020 dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB
2020	98,15%	-	100%
2019	96,32%	95%	-
2018	103,02%	95%	-
2017	94,97%	95%	-
2016	92,82%	95%	-

Meskipun target IKU tercapai, ada beberapa isu yang perlu mendapat perhatian seperti:

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

1. Berdasarkan ND-1975/PB.1/2020, terdapat Penyesuaian Implementasi IKU Triwulan II Tahun 2020 sebagai dampak bencana Covid-19. Salah satunya yaitu penyesuaian definisi dan formula IKU Pengelolaan BMN yang Optimal.
2. Implementasi Aplikasi RP4 berbasis web yang masih menghadapi beberapa kendala teknis. (proses transisi dari aplikasi RP4 desktop)

Akar masalah IKU tersebut adalah keterbatasan SDM, ketidakstabilan aplikasi, hilangnya data dan proses transisi menjadi penyebab kurang optimalnya pengelolaan BMN sebagaimana disampaikan pada isu utama diatas.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan K anw i l DJPb Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Telah dilaksanakan update master aset pada SIMAN berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang ada.
2. Penyusunan Rencana Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan (RP4) 2021-2022 dan telah disampaikan melalui ND-178/WPB.29/2020 tanggal 6 Maret 2020.
3. Telah disampaikan usulan Pengajuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Selain Tanah dan Bangunan yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan dengan Nilai Perolehan sampai Rp100jt melalui ND-280/WPB.29/2020 tanggal 13 April 2020. Usulan PSP telah disetujui melalui KMK-57/KM.5/PB.1/2020
4. Telah disusun data realisasi kesesuaian pelaksanaan RP4 dan Penyelesaian PSP serta disampaikan melalui ND-464/WPB.29/2020 tanggal 30 Juni 2020

Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (*action plan*) untuk meningkatkan capaian mendatang IKU tersebut yang dilakukan selama tahun 2020 (penanggung jawab: Bagian Umum), yaitu :

1. Tindak lanjut penyelesaian sertifikasi tanah kompleks rumah dinas Jl. Mawar.

2. Melakukan update master aset lanjutan untuk menambah capaian indikator master asset.
3. Mengikuti perkembangan kebijakan implementasi aplikasi RP4 berbasis web.
4. Tindak lanjut penyelesaian IMB rumah dinas.
5. Menambah jumlah SDM dalam rangka optimalisasi pengelolaan BMN

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses. Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

- 1) Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (Value for Money).
- 2) Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.
- 3) Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).
- 4) Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).
- 5) Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.
- 6) Data Kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN.
- 7) Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP.
- 8) Perencanaan Kas (Renkas), sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke

KPPN.

- 9) Penyampaian LPJ, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio LPJ tepat waktu terhadap seluruh LPJ yang disampaikan ke KPPN.
- 10) Pengembalian SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.
- 11) Retur SP2D, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan jumlah SP2D yang terbit.
- 12) Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap).
- 13) Pagu Minus, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya.
- 14) Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

Dengan demikian, perhitungan realisasi IKU tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = [(\% \text{ capaian keluaran} \times 30\%) + (\% \text{ efisiensi} \times 15\%) + (\% \text{ konsistensi} \times 10\%) + (\% \text{ penyerapan anggaran atas pagu netto} \times 15\%)] + [(\% \text{ penyelesaian tagihan} \times 4\%) + (\% \text{ penyampaian data kontrak} \times 3\%) + (\% \text{ pengelolaan UP} \times 4\%) + (\% \text{ perencanaan kas} \times 2\%) + (\% \text{ penyampaian LPJ} \times 2\%) + (\% \text{ pengembalian SPM} \times 3\%) + (\% \text{ retur SP2D} \times 3\%) + (\% \text{ revisi DIPA} \times 5\%) + (\% \text{ pagu minus} \times 2\%) + (\% \text{ dispensasi SPM} \times 2\%)]$$

Dengan porsi bobot seperti di bawah ini:

No.	Komponen Pengukuran			Bobot
Komponen Hasil				
1.	Capaian Keluaran	x	30%	70%
2.	Efisiensi	x	15%	
3.	Konsistensi	x	10%	
4.	Penyerapan anggaran atas pagu netto	x	15%	
Komponen Proses				
5.	Penyelesaian tagihan	x	4%	30%
6.	Penyempaian data kontrak	x	3%	
7.	Pengelolaan UP	x	4%	
8.	Perencanaan Kas	x	2%	
9.	Penyampaian LPJ	x	2%	
10.	Pengembalian SPM	x	3%	
11.	Retur SP2D	x	3%	
12.	Revisi DIPA	x	5%	
13.	Pagu Minus	x	2%	
14.	Dispensasi SPM	x	2%	

1. Capaian Keluaran

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_j}{\text{Target Indikator}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

$$CKK = \prod_{i=1}^m \left(\left(\frac{RVK \text{ ke } i}{TVK \text{ ke } i} \times \left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_j}{\text{Target Indikator}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)$$

2. Efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 90\% + \left(\frac{E}{20} \times 20 \right)$$

3. Konsistensi

$$\% \text{ konsistensi} = \frac{\sum_{i=1}^n \% \text{ konsistensi per bulan}}{n}$$

$$\% \text{ konsistensi per bulan} = \left(1 - \left(\frac{|RPD - \text{Realisasi Penyerapan}|}{RPD} \right) \times 100\% \right)$$

4. Penyerapan Anggaran atas Pagu Netto

$$\text{Penyerapan} = \frac{\text{realisasi penyerapan anggaran atas pagu neto}}{\text{pagu neto}} \times 100\%$$

Pagu neto = Total pagu bruto – (pagu belanja pegawai + self blocking + hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan + pagu dana khusus)

Realisasi penyerapan anggaran atas pagu neto = Total realisasi bruto – (realisasi belanja pegawai + realisasi dana khusus)

Target IKU Tahun 2020 Target IKU *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran* Kanwil untuk tahun 2020 adalah sebesar 95% sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Two tahun 2020. Target tersebut sama dengan target IKU tersebut tahun 2017 dan 2018 Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 dan Renstra DJPb tahun 2020-2024.

Realisasi IKU Tahun 2020 Realisasi IKU *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran* Kanwil Tahun 2020 adalah 96,50%. Persentase tersebut diperoleh dari nilai realisasi terakhir periode pelaporan pada tahun 2020, yaitu nilai pada triwulan IV. Perhitungan nilai tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.63.

TABEL 3.63
Capaian IKU *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran kanwil* Tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Pol /KP
Target	95%	95%	95%	95%	95%	Maximize/
Realisasi	N/A	N/A	98,93%	96,50%	96,50%	Take last
Capaian	N/A	N/A	104,13%	101,57%	101,57%	known value

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2016 s.d. 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.64.

TABEL 3.64
Perbandingan Capaian IKU *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran kanwil* Tahun 2016 s.d. 2020

IKU Tahun	Realisasi						
	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Tahunan
2020	N/A	N/A	N/A	98,93%	98,93%	96,50%	96,50%
2019	99,48%	99,69%	99,59%	99,59%	99,59%	99,37%	99,53%
2018	38,03%	69,67%	69,67%	86,87%	86,87%	96,64%	96,64%
2017	38,56%	49,26%	49,26%	80%	80%	100,06%	100,06%
2016	26,28%	49,89%	49,89%	86,62%	86,62%	103,55%	103,55%

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.65, capaian IKU *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran* kanwil Tahun 2020 berbeda dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya karena jenis penilaian serta target mengalami perubahan. Selain itu, capaian di triwulan I dan I tahun 2020 menunjukkan N/A dikarenakan dampak pandemi Covid-19.

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dan Renstra DJPb 2020-2024 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.66

TABEL 3.66
Perbandingan Realisasi IKU *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran* s.d. 2020 dan Renstra

Tahun	Realisasi IKU	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Keterangan
2020	96,50%	-	95%	Pada tahun 2020 Kanwil tidak menyusun Renstra
2019	99,53%	95%	95%	
2018	96,64%	95%	95%	
2017	100,06%	95%	95%	
2016	103,55%	95%	95%	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi s.d. 2020 dengan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan Renstra DJPb

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan	<p>Isu terkait pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perubahan rumusan dalam perhitungan IKU PKPA menjadi 40% nilai IKPA dan 60% nilai SMART DJA. 2. Terdapat banyak indikator yang harus diperhatikan, yaitu sbb: <ul style="list-style-type: none"> • IKPA terdiri dari 13 indikator, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP TUP, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Konfirmasi Capaian Output, Retur SP2D, Renkas, Kesalahan SPM (Catatan: 2 indikator masih direlaksasi yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA, dan 2 indikator tidak terdapat pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo yaitu Data Kontrak dan Renkas). • SMART DJA terdiri dari 4 indikator, yaitu Realisasi Anggaran, Konsistensi RPD, Capaian Keluaran Kegiatan, dan Efisiensi. 3. Terdapat indikator yang sama antara IKPA dan SMART DJA yang serupa, tetapi berbeda dalam penghitungan, sbb: <ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan di IKPA TW 4 target 90% mendapat nilai 100, untuk SMART DJA semakin tinggi realisasi semakin baik nilai diperoleh. • Indikator halaman III DIPA IKPA untuk saat ini direlaksasi, konsistensi pada SMART DJA tidak ada relaksasi 4. Terdapat indikator yang bertentangan dalam strategi memperolehnya, yaitu antara realisasi dan efisiensi. Dengan capaian output yang sama, realisasi mendapat nilai yang tinggi jika semakin besar, tetapi efisiensi akan mendapat nilai yang tinggi jika belanja semakin sedikit/hemat (efisien). 5. Nilai SMART DJA bergantung pada nilai-nilai Indikator Kinerja Keluaran dan volume keluaran yang diperoleh oleh Bidang/Bagian yang datanya baru tersedia di akhir tahun anggaran <p>Akar masalah IKU tersebut adalah Perubahan formulasi perhitungan IKU PKPA TA 2020 (40% IKPA dan 60% SMART DJA). Indikator tahun 2020 lebih menantang karena pencapaiannya membutuhkan extra effort, terutama dalam pencapaian nilai SMART DJA.</p> <p>Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 untuk mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat antara Bagian Umum dan Bidang setiap awal triwulan untuk membahas rencana kerja dan anggaran setiap triwulan 2. Melakukan revisi penghematan untuk belanja yang tidak dapat terserap (pada triwulan II dan triwulan III), melakukan revisi DIPA setiap triwulan untuk menyesuaikan dengan pemutakhiran halaman III DIPA dan POK dari tiap-tiap Bidang/Bagian, serta melakukan revisi POK pada akhir
---	---

tahun anggaran.

3. Mengisi Capaian Output pada Erekon&LK, LPJ DIPA, RVK/IKK pada SMART DJA secara tepat waktu.
4. Berupaya untuk melakukan pembuatan SPM secara hati-hati untuk menghindarkan dari terjadinya kesalahan SPM dan retur SP2D.
5. Melakukan proses SPM GU, GU Nihil, TUP, dan TUP nihil dengan memperhatikan jangka waktu antara GU sekarang dengan GU sebelumnya tidak lebih dari 30 hari.
6. Melakukan penyelesaian tagihan secara tepat waktu.
7. Sesuai dengan terbitnya IS Efisiensi, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo melakukan efisiensi untuk belanja birokrasi sebesar 10% (belanja perjalanan dinas, percetakan dan konsumsi, dan persediaan).

Rekomendasi rencana aksi yang telah dilakukan pada tahun 2020 dengan penanggung jawab Bagian Umum, yaitu:

1. Melakukan efisiensi belanja birokrasi
2. Optimalisasi penyerapan anggaran
3. Revisi anggaran pada Triwulan IV pada 30 November 2020 dan Update POK pada Desember 2020.
4. Melaksanakan kegiatan terkait indikator sesuai dengan ketentuan (capaian output, SPM, GU, dan penyelesaian tagihan)

LAIN-LAIN

- ❖ Pandemi Covid-19 sedikit banyak berdampak pada keberlangsungan pelaksanaan beberapa IKU selama tahun 2020, namun demikian Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tetap dapat mengawal capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- ❖ Selanjutnya, dalam rangka tetap memonitor perencanaan kinerja tiap tahunnya seluruh unit kerja di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo diminta untuk melaporkan realisasi capaian kinerja tiap triwulanan secara berjenjang.

**B. REALISASI
ANGGARAN**

1. Realisasi DIPA Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo TA 2020

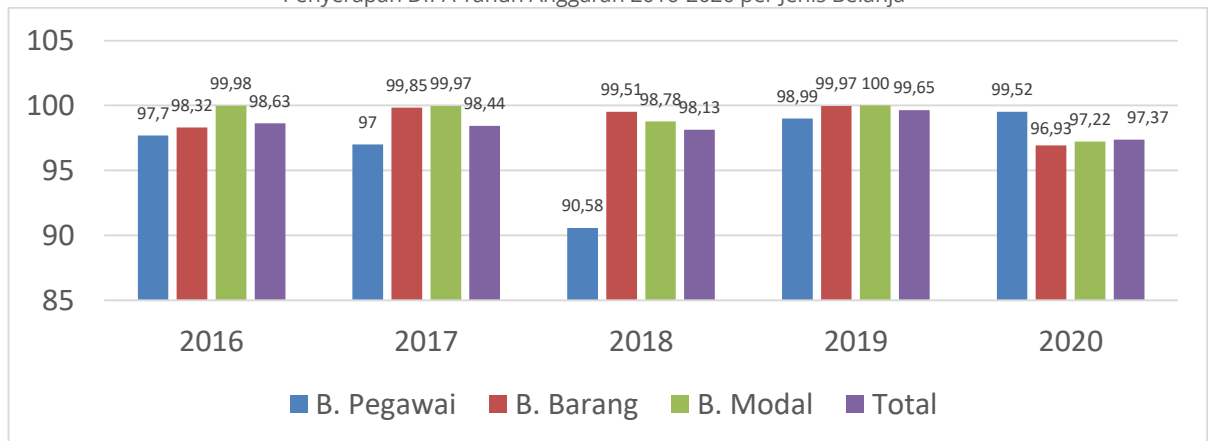
Berdasarkan data per 20 Januari 2021 dengan menggunakan *online monitoring* SPAN, realisasi penyerapan DIPA Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo TA 2020 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 3.366.368.074 atau mencapai 97,37% dari total pagu sebesar Rp 3.457.411.000.

Seluruh kegiatan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2020, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp 509.511.000 (99,52% dari pagu sebesar Rp 511.992.000), belanja barang mencapai sebesar Rp 2.220.352.689 (96,93% dari pagu sebesar Rp 2.290.734.000), dan belanja modal sebesar Rp 636.504.385 (97,22% dari pagu sebesar Rp 654.685.000).

Persentase penyerapan DIPA per jenis belanja tahun 2016 s.d. 2020 ditunjukkan pada Grafik 3.2.

GRAFIK 3.2

Penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2016-2020 per Jenis Belanja



Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.2, persentase penyerapan DIPA secara keseluruhan mengalami dinamika naik dan turun, namun demikian Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tetap berusaha melakukan penyerapan DIPA dari tahun ke tahun secara maksimal.

2. Perbandingan Pagu DIPA dan Realisasi DIPA TA 2020 per Kegiatan

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, pada tahun anggaran (TA) 2020 Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo melaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) output. Adapun realisasi DIPA atas 4 (empat) output tersebut pada TA 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.67.

TABEL 3.67

Realisasi DIPA Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 per Output

Kode	Program / Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi	%
Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah (015.08.09.1706)				
003	Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Tingkat Wilayah	103.951.000	98.808.800	95,05%
009	Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah	68.583.000	52.714.127	76,86%
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	654.685.000	636.504.385	97,22%
994	Layanan Perkantoran	2.316.585.000	2.296.430.242	99,12%
Jumlah		3.143.804.000	3.084.457.554	98,11%

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.67, terdapat satu kegiatan pada DIPA Kanwil yaitu kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah (1706) dan dibagi kedalam empat output dengan realisasi sebesar Rp3.084.457.554 atau sebesar 98,11% dari total pagu. Realisasi DIPA Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020 per output tersebut dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.68.

Tabel 3.68 Perbandingan Realisasi DIPA TA 2018 s.d. 2020 per Jenis Kegiatan

Kode Output	Pagu Revisi	Realisasi	%	Pagu Revisi	Realisasi	%
	2020			2019		
003	103.951.000	98.808.800	95,05%	142.102.000	142.098.426	100%
009	68.583.000	52.714.127	76,86%	450.814.000	449.981.014	99,82%
951	654.685.000	636.504.385	97,22%	319.388.000	319.385.300	100%
994	2.316.585.000	2.296.430.242	99,12%	2.902.862.000	2.896.862.194	98,79%
Jumlah	3.143.804.000	3.084.457.554	98,11%	3.815.166.000	3.808.326.933	99,90%

3. Analisis Efisiensi Penggunaan atas Sumber Daya

Sesuai dengan Inisiatif Strategis yang diselenggarakan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, efisiensi belanja birokrasi merupakan efisiensi atas belanja akun 521211 (belanja bahan), belanja perjalanan (524111,524113,524114), dan belanja persediaan (521811). Efisiensi dihitung dari beberapa komponen:

- Jumlah nilai rupiah yang dihemat
- Realisasi Indikator Kinerja Keluaran
- Realisasi Capaian Keluaran

Jenis belanja (Anggaran Birokrasi) yang diukur pada setiap output meliputi: (i) belanja bahan percetakan dan konsumsi (AKUN 521211 dan 521811); (ii) belanja perjalanan dinas dalam negeri kecuali dalam rangka pelantikan, mutasi, diklat, dan bantuan evaluasi non lokal dalam rangka pemberian dana dukungan pemulihan kepada pegawai yang terkena dampak bencana alam (kelompok AKUN 524); (iii) RDK dan konsinyering (AKUN 524114).

Menentukan nilai tingkat efisiensi yang tepat baru bisa dilakukan setelah semua data tersedia (di akhir tahun karena RVK dan RIKK baru bisa diperoleh akhir tahun).

Hasil efisiensi tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian keluaran i

Berdasarkan perhitungan tersebut, hasil efisiensi pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo untuk tahun 2020 adalah sebesar 17,60% dari pagu objek efisiensi Rp3.143.804.000 dengan perhitungan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.77

TABEL 3.77

Perbandingan pagu dan realisasi serta hasil efisiensi dana belanja barang dan belanja modal

No	Kegiatan/Output	Pagu Belanja Barang dan Modal (objek efisiensi)	Realisasi Belanja Barang dan Modal (objek efisiensi)	Hasil Efisiensi
1706: Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah				
003	Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Tingkat Wilayah	103.951.000	98.808.800	17,60%
009	Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah	68.583.000	52.714.127	
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	654.685.000	636.504.385	
994	Layanan Perkantoran	2.316.585.000	2.296.430.242	
JUMLAH		3.143.804.000	3.084.457.554	

C.
**KINERJA
LAINNYA**

Selain 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) yang diterapkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dengan capaian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2020 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja namun masih terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. INOVASI MANAJEMEN/PELAYANAN

a. Inovasi Bidang Sarana Prasarana



Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan sebagaimana motto layanan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo yaitu "SUPER" Santun, Unggul, Profesional, Efisien dan Ramah, serta untuk meningkatkan kenyamanan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari di ruangan kantor, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menyediakan sarana prasarana yaitu:

- | | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. <i>Activity Based Workplace</i> | 7. Ruang Literasi | 12. <i>Free Wifi</i> |
| 2. <i>Limited Zone</i> | 8. Kotak Saran | 13. Kotak Charger |
| 3. Mesin Antrian | 9. Layar Informasi dan | 14. Kacamata Baca |

serta satuan kerja dan pemda lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada umumnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara/daerah dengan baik.



Acara ini dihadiri juga oleh Bapak Muhdi selaku Plt. Kakanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Bapak Darda Daraba selaku Sekda Provinsi Gorontalo, serta segenap jajaran Pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota dan unit vertikal Kementerian Negara/Lembaga di wilayah Gorontalo. Penganugerahan Treasury Awards terdiri dari 11 kategori dan 33 peraih penghargaan.

c. Bermitra dengan Media Massa Setempat.



Sebagai upaya memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat Gorontalo/ *stakeholder* tentang pengelolaan keuangan negara terutama terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kanwil DJPb Provinsi

Gorontalo berinisiatif menjalin kemitraan secara profesional dengan media massa setempat. Hal ini dilakukan dalam rangka penyampaian informasi dan isu terkini terkait keuangan negara sekaligus memberikan klarifikasi atas *tone* negatif tentang pengelolaan keuangan negara yang beredar di masyarakat. Beberapa media massa

yang dipercaya untuk bermitra dengan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo di antaranya adalah Gorontalo Post, RRI Gorontalo, dan TVRI Gorontalo. Ketiga media massa tersebut dipilih karena diakui sebagai media massa terbesar di Gorontalo dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di Gorontalo. Melalui kemitraan ini diharapkan informasi terkait keuangan negara dapat diperoleh secara langsung dari sumber yang terpercaya sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh lapisan masyarakat.

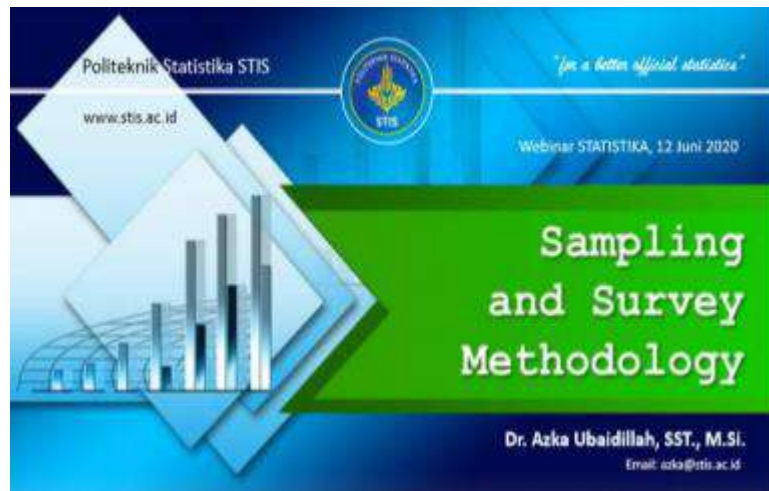
d. Pelatihan Statistika Series melalui Webinar dalam rangka penyusunan RPA berkualitas

Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) disusun mengikuti struktur dan standart pelaporan yang sudah ditentukan oleh kantor pusat. Seluruh data-data terkait pelaksanaan anggaran yang ada, diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis ilmiah sehingga hasil yang diperoleh juga lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka peningkatan kualitas analisis dan juga sebagai bentuk inovasi, laporan RPA juga harus menyajikan metode-metode analisis terbaru dan terkini sehingga dapat memberikan nilai tambah dari kualitas laporan RPA tersebut. Untuk peningkatan kualitas analisis dan juga inovasi dalam RPA, Kanwil DJPb provinsi Gorontalo selalu mencari metode analisis ilmiah terbaru. Hal tersebut diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang ada, berdiskusi dengan pegawai lain, mengundang Narasumber yang kompeten dll. Di tahun 2020 ini, mengingat adanya wabah pandemi Covid-19, banyak pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara daring/online.

Kegiatan Webinar Statistika Series dilakukan secara Online melalui Video Conference dari aplikasi Zoom. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pun mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut juga melalui live Youtube melalui link yang telah disampaikan oleh pihak penyelenggara. Meskipun melalui live Youtube, namun materi yang disampaikan juga dapat bisa dicerna dan dipelajari dengan baik oleh seluruh peserta dari Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Kegiatan berlangsung pada tanggal 10, 12, 20, 27 Juni 2020 dengan materi:

1. Webinar Statistika #1 | Fundamental Of Hypothesis Testing
2. Webinar Statistika #2 | Sampling and Survei Methodology
3. Webinar Statistika #3 | Statistical Methods(ANOVA, MANOVA)

4. Webinar Statistika #4 | Fundamental Of Time Series Data Analysis



e. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bersama Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Gorontalo

Dalam rangka pelaksanaan tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pembina Pelaksanaan Anggaran khususnya APBN dan APBD maka dilaksanakan kegiatan Pembinaan Komprehensif dalam bentuk Virtual Meeting Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Rakorev terkait pembinaan komprehensif dan evaluasi pelaksanaan anggaran pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo bersama



Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dilaksanakan dalam rangka menjalin kerja sama dan harmonisasi hubungan keuangan Pusat dan Daerah dan sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah terkait Belanja APBN, Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa serta Kredit Pogram dan Kajian Fiskal Regional.



Kegiatan Rakorev rutin dilaksanakan setiap triwulan untuk memantau progress penyerapan anggaran dengan harapan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah dapat

menyumbang peningkatan perekonomian di Gorontalo. Seluruh kendala yang menghambat proses penyerapan anggaran akan dibahas untuk memitigasi kemungkinan penyerapan rendah di akhir tahun. Komitmen antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah untuk tetap melaksanakan Rakorev merupakan bentuk nyata dari sinergi yang baik demi Gorontalo yang Sejahtera.



f. Inovasi Terkait Pengelolaan Kinerja (*Miss Kinerja*)

Inovasi terkait pengelolaan kinerja juga telah dilakukan terutama dalam rangka memberikan informasi secara berkala dan tepat waktu sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan pegawai Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengelolaan kinerjanya masing-masing. Aplikasi yang disebut *Miss Kinerja* ini mempunyai fungsi untuk melakukan pengiriman pesan secara otomatis dan terjadwal melalui Aplikasi Whatsapp kepada pejabat/pegawai yang belum melakukan upload dokumen pengelolaan kinerja berdasarkan hasil monitoring pada fitur perekaman dokumen pengelolaan kinerja dalam Aplikasi PBNOpen. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai sarana konsultasi bagi pejabat/pegawai Kanwil DJPb khususnya terkait pengelolaan kinerja dengan pengelola kinerja di Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sehingga dengan adanya aplikasi *Miss Kinerja*, pengelolaan kinerja pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat berjalan dengan sangat baik.



g. Inovasi Terkait Akuntansi Pemerintahan (Sistem Informasi Akuntansi Berdaya Guna (siAYA))



Di era digital seperti saat ini, kebutuhan dan aktivitas yang serba cepat tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi. *Google Site* merupakan suatu *tool* yang digunakan untuk menciptakan *custom website*. Untuk meningkatkan pelayanannya agar dapat diakses oleh semua *stakeholder*, dimana pun dan kapan pun, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo

berinovasi memanfaatkan *google site* yang diberi nama siAYA untuk menyebarluaskan informasi tentang akuntansi pemerintahan. Dengan adanya siAYA para *stakeholder* dengan cepat dan mudah mendapat informasi tentang akuntansi. siAYA sudah diujicobakan kepada para *stakeholder* dan sudah mendapat testimoni dari penggunaannya. Kedepan siAYA akan dikembangkan lebih luas tidak hanya terkait akuntansi tapi semua hal terkait bidang tugas Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

h. Inovasi Terkait Keuangan dan Aset Daerah (Sistem Rekonsiliasi Kas yang Optimal (siReKam))

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sebagai salah satu *stakeholder* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 memiliki permasalahan dalam hal rekonsiliasi Kas dan LPJ Bendahara pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah dimana penyajian data yang dihasilkan dari Aplikasi Sistem Informasi



Manajemen Daerah (SIMDA) belum dapat memberikan LPJ Bendahara dan rekonsiliasi Kas yang sesuai. Dengan adanya Aplikasi siReKam yang berbasis *Microsoft Excell* ini dapat menjembatani kebutuhan akuntansi di seluruh SOPD pada Kabupaten Boalemo. Selain itu, manfaat yang didapat dengan adanya Aplikasi ini adalah memberikan kesamaan

akses bagi seluruh Bendahara SOPD dalam penyusunan LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Kas.

i. Aplikasi Pencegahan Risiko IKPA (PERI IKPA)

Untuk mencapai target ideal IKPA, dibutuhkan inovasi dalam pelayanan pembinaan oleh Bidang PPA I. Inovasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Satker (*customer experience*) dan kebutuhan internal kantor (*internal experience*) yang terus berkembang. Dengan dilatarbelakangi kebutuhan akan inovasi dalam pelayanan pembinaan maka dibuatlah aksi perubahan ini yang berupa inovasi aplikasi pencegahan risiko IKPA. Aplikasi Pencegahan Risiko IKPA (PERI IKPA) adalah aplikasi berbasis web yang dapat dibuka di handpone dan pc/laptop yang berisi peringatan dini (*early warning*) kepada Satker untuk mencegah terjadinya keterlambatan dan/atau ketidaktercapaian Satker atas target nilai IKPA. Aplikasi PERI IKPA selain berisi warning pencegahan ketidaktercapaian setiap indikator pada IKPA, juga berisi nilai IKPA Satker yang dapat dilihat pada menu utama sesuai user kode Satker, dan berisi informasi layanan Kanwil DJPb Gorontalo. Selain itu juga terdapat link konsultasi melalui nomor whatsapp petugas kanwil. Aplikasi PERI IKPA dapat diakses melalui tautan <https://periikpa.com>



j. Penggunaan Aplikasi Trello dalam task management di Bidang PPA II

Ditengah pesatnya perkembangan teknologi, kemudahan dalam beraktivitas menjadi tuntutan yang tidak dapat dipungkiri. Salah satunya adalah perlu kemudahan dalam task management. Banyaknya kegiatan dan beban laporan yang dilaksanakan secara berkala maupun otodidak dalam satu tahun, memaksa para pegawai harus senantiasa peka dan aware terhadap deadline dan beragam laporan dan kegiatan yang harus dilaksanakan di

Bidang PPA II. Namun pada kenyataannya, banyaknya deadline membuat pegawai kebingungan dan loss track terhadap progress kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan sehingga perlu dibuat suatu perubahan. Trello merupakan aplikasi berbasis web untuk berkolaborasi dan mengatur berbagai kegiatan/project dalam satu tempat. Dengan menggunakan trello, para pegawai di Bidang PPA II maupun lingkup Kanwil dapat senantiasa memonitor pekerjaan yang belum terselesaikan dan mengupdate pekerjaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini memudahkan pegawai untuk menatausahakan semua kegiatan dan output pekerjaan. Selain itu trello yang terhubung dengan email dapat membuat reminder deadline pekerjaan dan membuat jadwal kegiatan setiap bulannya yang dapat dikreasikan sesuai kebutuhan. Selain itu, hal ini mempermudah untuk memberikan laporan kepada stakeholders, seperti Kepala Kanwil atau pihak lain yang memerlukan informasi mengenai seluruh kegiatan dan laporan di bidang PPA II.

Untuk mengakses trello, dapat mengunjungi link berikut : <https://trello.com/> lalu login dengan akun yang telah didaftarkan terlebih dahulu.



k. Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Sehubungan dengan perkembangan informasi terkait penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia dan khususnya di Provinsi Gorontalo, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah mengambil langkah-langkah antisipatif dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 pada lingkungan kerja kantor Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo dalam rangka keberlangsungan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan cara :

- 1) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*). Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar disediakan oleh Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo pada lokasi yang strategis yaitu ditempatkan pada 2 (dua) titik lokasi yaitu sebelah kiri dan kanan pintu keluar-masuk kantor yang merupakan satu-satunya akses keluar masuk kantor yang dibuka.



- 2) Upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja.
Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada siapa saja yang memasuki gedung Kantor oleh petugas resepsionis yang berjaga di satu-satunya akses keluar masuk yang dibuka, siapa saja yang hasil pengukuran tubuhnya di atas normal maka tidak

diperkenankan untuk memasuki gedung kantor. Selanjutnya apabila suhu tubuh normal akan diberikan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) untuk selanjutnya dapat memasuki ruang gedung kantor.



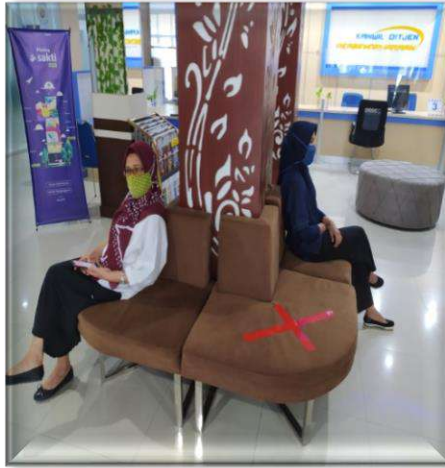
3) Pemasangan Banner protokol layanan tatap muka layanan.

Walaupun seluruh layanan pada Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo dapat dilaksanakan tanpa melalui tatap muka, namun demikian bagi pengguna layanan yang tetap ingin melakukan layanan tatap muka masih diperbolehkan datang ke Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan diantaranya yaitu:

- Wajib menutup mulut dan hidung dengan menggunakan masker;
- Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik atau dengan *hand sanitizer*;
- Pengukuran suhu badan oleh petugas resepsionis;
- Menghindari berada di kerumunan/ menjaga jarak fisik saat menunggu antrian (minimal 1M);
- Menghindari bersentuhan fisik antara petugas *Front Office* dan *Stakeholder*;
- Selalu memperhatikan protokol pencegahan Covid-19 selama berada di tuangan pelayanan



4) Pemasangan tanda pada kursi tunggu layanan



5) Pemasangan sekat dari bahan Akrilik pada meja layanan



6) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan dilakukan seminggu sekali



- 7) Kegiatan Test & Tracing dilakukan secara berkala dengan melaksanakan Rapid Test Antibody dan Antigen untuk mengetahui kondisi para pegawai.



2. INISIATIF PEMBERANTASAN KORUPSI

a. Sosialisasi dan Asistensi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)



Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Sosialisasi dan Asistensi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berlangsung pada tanggal 10 - 11 Februari 2020 diikuti

oleh seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, dengan menghadirkan narasumber Kepala Bagian Kepatuhan Internal, Setditjen Perbendaharaan, Adnan Wimbyarto. Kegiatan ini diselenggarakan untuk

mempersiapkan para pegawai di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam menghadapi akselerasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK tahun 2020. Pada kesempatan ini pula, Kepala Bagian Kepatuhan



Internal, Adnan Wimbyarto memaparkan upaya-upaya Kantor Pusat DJPb dalam mengawal instansi vertikal DJPb di seluruh wilayah Indonesia agar mampu menjalankan pelaksanaan



pembangunan ZI dengan sungguh-sungguh dan secara kontinyu melakukan koordinasi, asistensi dan pembinaan serta memberikan dukungan teknis kepada unit kerja yang mengikuti akselerasi sejak tahun 2013

sampai dengan saat ini. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi unit kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam mengikuti akselerasi Pembangunan ZI menuju

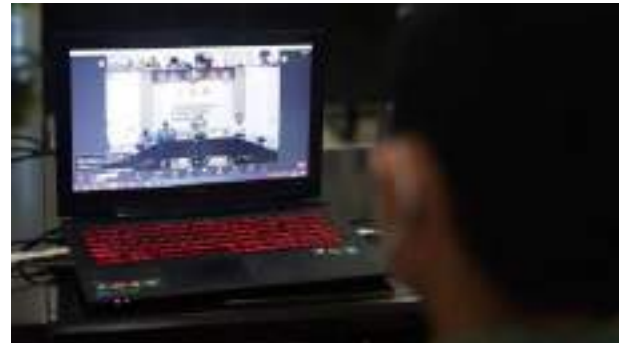
WBK tahun 2020, tidak terbatas hanya sebagai “ritual formalitas” belaka, namun benar-benar nyata mencakup segala dimensi.

b. Semangat Melawan Korupsi Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2020



Semangat maju melawan korupsi pada Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2020 sesuai dengan tema Kementerian Keuangan yakni “Jaga Integritas Diri, Pulihkan Negeri Kala Pandemi”. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah melakukan inisiatif

pemberantasan korupsi dengan melaksanakan kegiatan internalisasi berupa GKM kepada seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo secara daring sekaligus penyematan pin hakordia secara simbolis sebagai tanda bahwa seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo siap melawan korupsi.



3. PENGHARGAAN

a. Peringkat Tiga Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Tingkat Wilayah Terbaik Semester I Tahun 2020 Kategori Kanwil Kecil



Reviu Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan setiap semester dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan belanja pemerintah. Penilaian RPA sendiri dilakukan semesteran dan prestasi yang diraih oleh Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo cukup membanggakan yaitu 5 kali berturut-turut berada di posisi 3 besar untuk penilaian tahun 2017, tahun 2018, hingga tahun 2019. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan oleh Bidang PA I untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih. Seluruh *effort* yang dilakukan oleh tim Bidang PA I tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar anggota tim serta melakukan berbagai inovasi-inovasi baru dalam penyusunan RPA mulai dari analisis pelaksanaan anggaran, metode penelitian hingga desain layout yang diangkat. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : ND- 3/PB/PB.2/2020 tanggal 19 November 2020 hal Penyampaian Hasil Penilaian Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I 2020 Tingkat Wilayah, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berhasil meraih Peringkat Tiga Kategori Kanwil Kecil.

b. Peringkat Lima Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2020 Kategori Kanwil Kecil

Analisis fiskal diharapkan dapat memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan makroekonomi dalam mendukung pencapaian fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait alokasi, distribusi, dan stabilisasi seperti menyediakan informasi untuk penyusunan kerangka ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal/penyusunan APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai alat analisis dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah telah sesuai dengan tujuan

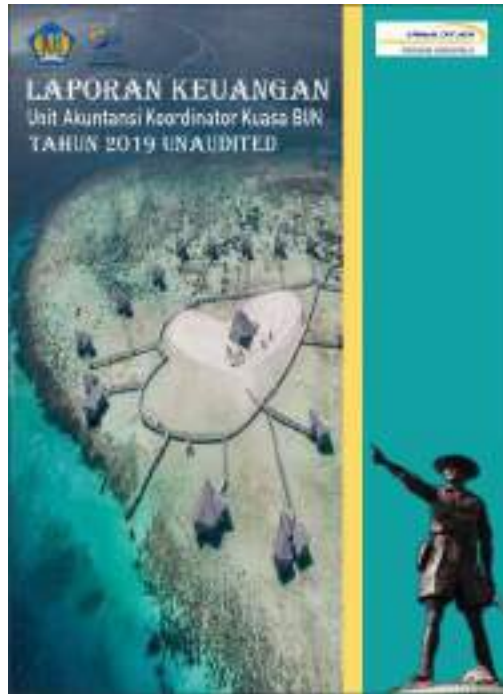


makroekonomi yang telah ditetapkan. Informasi yang tertuang dalam Kajian Fiskal Regional diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan seperti penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, masyarakat serta investor.

Pada periode penilaian ini, berita fiskal regional yang dibahas yaitu "Pembentukan Model Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Gorontalo dengan Menggunakan Engle-Grenger Two Step Method dan Error Correction Mechanism (ECM)" dengan tujuan untuk melihat pengaruh PDRB terhadap Konsumsi Rumah Tangga dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pola konsumsi rumah tangga masyarakat Gorontalo.

Setelah melalui proses penyusunan hingga penilaian, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo meraih peringkat lima pada periode penilaian Triwulan II Tahun 2020 untuk Kategori Kanwil Kecil.

c. Peringkat Enam Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinasi Kuasa BUN Kantor Wilayah DJPb Tahun 2019 Kategori Kanwil Kecil



Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo juga menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tingkat UAKKBUN Kanwil. Sesuai kaidah yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah bahwa laporan keuangan ini digunakan untuk tujuan transparansi, evaluasi kinerja keuangan dan pengambilan keputusan. Penggunaanya baik dari kalangan stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Upaya untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dilakukan dengan melibatkan secara aktif seluruh KPPN dan satker-satker mitra. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor : KEP-263/PB/2020 hal Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan Dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman Dan Hibah Tahun 2019, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berhasil meraih peringkat enam untuk kategori Kanwil Kecil. Semoga atas prestasi yang diraih ini bisa membantu mewujudkan upaya pengelolaan keuangan negara yang lebih baik pada masa kini dan yang akan datang.

d. Peringkat Sepuluh Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Terbaik (LKPK-TW dan LSKP-TW) Tahun 2019 Kategori Kanwil Kecil

Tantangan untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Negara di sektor publik semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan aktivitas ekonomi yang semakin masif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah tidak tinggal diam dan terus melakukan inovasi. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai institusi publik juga terus berbenah. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo kembali menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah.



Upaya ini berguna untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Negara yang modern dan professional, sebagaimana juga dilakukan negara maju sesuai best practices. Guna meningkatkan pemanfaatan informasi keuangan tersebut, Laporan GFS disusun secara regional agar informasinya dapat dimanfaatkan oleh Pemda, Bank Indonesia, BPS dan stakeholder lainnya. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-267/PB/2020 tentang Kriteria Penilaian Dan Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun Penilaian 2019, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berhasil meraih peringkat sepuluh untuk Kategori Kanwil Kecil.

e. **Peringkat Sepuluh Implementasi Pengelolaan Kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* Tahun 2020**



Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya

peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-303/PB/2020 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menduduki peringkat sepuluh dari 34 kanwil seluruh Indonesia.

f. Peringkat Dua Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah.



Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, baik tingkat satker maupun tingkat wilayah lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan untuk memberikan apresiasi kepada penyusun laporan keuangan tingkat wilayah, telah dilakukan penilaian Laporan Keuangan dan Penyusun Laporan Keuangan Tingkat Wilayah tahun 2019. Penilaian tersebut telah mendapatkan penetapan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-260/PB/2020 tanggal 13 November 2020 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan dan Penyusun Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2019. Pada kesempatan ini Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo meraih peringkat dua dari 34 kanwil seluruh Indonesia.

g. Hasil Penilaian Laporan Hasil Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja KPPN Semester I Tahun 2020

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan wajib melakukan pembinaan dan supervisi

pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kepuasan masyarakat, Kanwil melalui tim Pembinaan dan Supervisi KPPN melakukan penilaian dan mapping kinerja KPPN dilingkup wilayah kerjanya berdasarkan indikator-indikator pada setiap unsur berikut:

1. Efektivitas & Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara
3. Representasi Kementerian Keuangan Di Daerah
4. Tugas Khusus (Special Mission)
5. Tata Kelola Internal
6. Inovasi Dan Prestasi

Selanjutnya, Kepala Kanwil menyampaikan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Berdasarkan laporan dari Kanwil tersebut, Setditjen Perbendaharaan melakukan penilaian atas Laporan Kinerja KPPN lingkup Kantor Wilayah. Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor : ND-4167/PB.1/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Hasil Penilaian Laporan Hasil Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja KPPN Semester I Tahun 2020, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo meraih nilai 98 sama dengan Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di bawah Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara dan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam tahun 2020. Target Kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan dan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo merupakan salah satu unit eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang ditinjau dari tugas dan fungsinya memiliki variasi tugas yang beragam. Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo merupakan gabungan dari beberapa tugas dan fungsi yang beragam.

Keberagaman tugas dan fungsi tersebut menjadikan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memiliki peran yang strategis terhadap keberhasilan pencapaian tugas Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, mengingat bahwa dari keseluruhan siklus APBN, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memegang peran yang dinamis berkaitan dengan penyiapan/penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, sistem perbendaharaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Pencapaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di mana seluruh IKU telah mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan. Jumlah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2020 berhasil memperoleh nilai sebesar 107,47. Nilai ini merupakan pencapaian dari total 19 IKU yang ditetapkan.

Meskipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo selalu berusaha untuk memperbaiki diri dalam rangka pencapaian yang optimal atas target-target kinerja, baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya. Upaya yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerjanya di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L melalui Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), *Spending Review*, *Performance Dialogue*, dan monitoring proyeksi dan realisasi belanja K/L;
2. Meningkatkan kualitas LKBUN dengan menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan akuntansi berkelanjutan dan monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP, LKKL, dan LKBUN;
3. Mendorong Satker K/L mitra kerja KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa untuk meningkatkan

kepatuhan dalam rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan;

4. Meningkatkan efektivitas pelatihan teknis perbendaharaan melalui updating materi sosialisasi sesuai perkembangan kebijakan standar dan sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku;
5. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dengan melakukan penyusunan updating langkah-langkah peningkatan kinerja layanan 2021;
6. Meningkatkan akurasi perencanaan kas pemerintah pusat melalui komunikasi intensif dan pelatihan berkesinambungan bagi operator perencanaan kas;
7. Meningkatkan kinerja pelaksanaan *special mission* dengan mendorong seluruh BLU menyampaikan pengesahan pendapatan kepada KPPN secara akurat dan tepat waktu;
8. Meningkatkan kualitas SDM yang *fit for purpose* melalui reassessment dan updating soal dan modul pembelajaran hard competency;
9. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui monitoring penyelesaian tindak lanjut DAMS, survei SFO, dan survei persepsi integritas;
10. Menggiatkan pelaksanaan implementasi SAKTI tahap berikutnya pada seluruh Satker lingkup Kementerian Keuangan dan K/L lainnya;
11. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran DJPb melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kanwil dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian output, efisiensi, serta konsistensi dengan rencana penarikan dana.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dan untuk seluruh jajaran Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.

LAMPIRAN :

- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**
- **RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020**
- **RENCANA KERJA & ANGGARAN
TAHUN 2020**



KONTRAK KINERJA NOMOR: 38/PB/2020

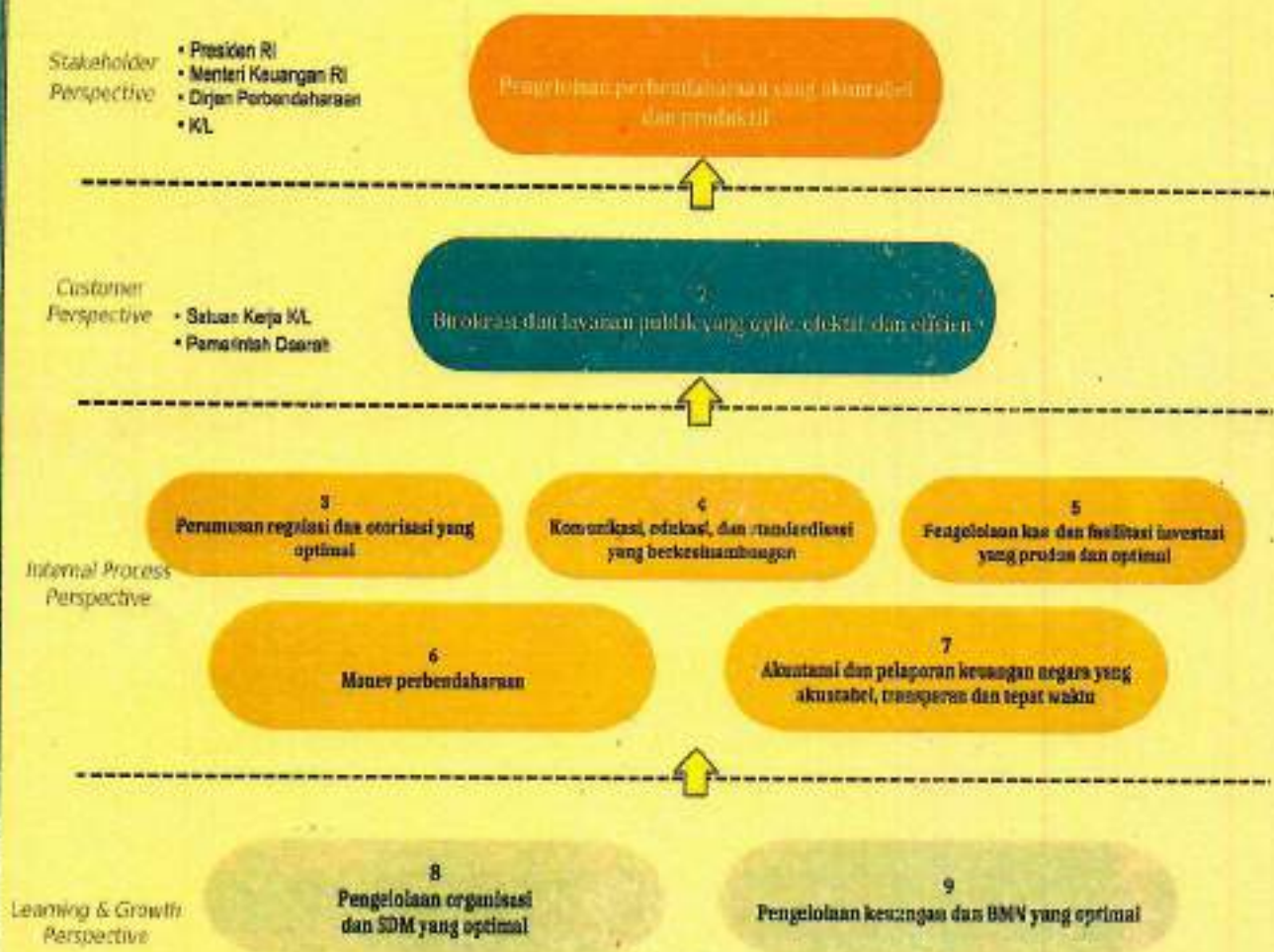
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2020

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI GORONTALO

No (1)	Sasaran Program/ Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88
		1b-N Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	90
		1c-N Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	94
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,55 (skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal	3a-N Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-N Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	90
		4b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87
		4c-N Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%
5.	Pengelolaan kas dan fasilitasi investasi yang pruden dan optimal	5a-N Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil	80%
		5b-N Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82
6.	Monev Perbendaharaan	6a-N Nilai kualitas laporan reuiu pelaksanaan anggaran Kanwil	90
		6c-N Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa pada KPPN	80
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	78
8.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal	8a-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		8c-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83
		8d-N Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	74

9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9a-N Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%
		9b-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%

Program/Kegiatan
 1. Pembinaan pelaksanaan perbendaharaan di wilayah

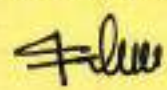
Anggaran
 Rp 4.122.517.000

Atasan Pimpinan Unit Kerja,



Andin Hadiyanto
 NIP 196506091990121001

Gorontalo, 29 Januari 2020
 Pimpinan Unit Kerja,



Fahma Sari Fatma
 NIP 197311041998032002

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

Kode SAKTI	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt I	Q3	sd Q3	Q4	Y
I	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif							
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	88	88	88	88	88	88
1b-N	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	-	90	90	-	90	90	90
1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	-	-	-	-	-	94	94
II	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	-	4,55	4,55	-	4,55	-	4,55
III	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal							
3a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IV	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan							
4a-N	Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	-	90	90	-	90	90	90
4b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87	87	-	87	87	87
4c-N	Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	20%	50%	50%	60%	60%	100%	100%
V	Pengelolaan kas dan fasilitasi investasi yang pruden dan optimal							
5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	-	82	82	-	82	82	82
VI	Monev Perbendaharaan							

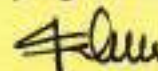
**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

Kode SS/IKU	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
I	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif							
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	88	88	88	88	88	88
1b-N	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	-	90	90	-	90	90	90
1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	-	-	-	-	-	94	94
II	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	-	4,55	4,55	-	4,55	-	4,55
III	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal							
3a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IV	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan							
4a-N	Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	-	90	90	-	90	90	90
4b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87	87	87	87	87	87	87
4c-N	Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	20%	50%	50%	60%	60%	100%	100%
V	Pengelolaan kas dan fasilitasi investasi yang pruden dan optimal							
5a-N	Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil						80%	80%
5b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	-	82	82	-	82	82	82
VI	Monev Perbendaharaan							

Kode SS/IKU	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-N	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	-	90	90	-	90	90	90
6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa pada KPPN	80	80	80	80	80	80	80
VII	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu							
7a-N	Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic (GFS)</i> tingkat wilayah	-	-	-	-	-	78	78
VIII	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal							
8a-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	-	-	-	-	-	77	77
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	83	83
8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	83	83
8d-N	Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	-	-	-	-	-	74	74
IX	Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
9a-N	Persentase pemenuhan BMN yang optimal	-	70%	70%	-	70%	92%	92%
9b-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Gorontalo, 29 Januari 2020

PNS yang dinilai,



Fahma Sari Fatma
NIP 197311041998032002

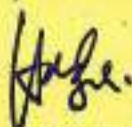
Sasaran Kerja Pegawai

I. PEJABAT PENILAI		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI		
1	Nama	Andin Hadiyanto	1 Nama	Fahma Sari Fatma
2	NIP	196506091990121001	2 NIP	197311041998032002
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama / IVe	3 Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tk. I / IVb
4	Jabatan	Direktur Jenderal	4 Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	5 Unit Kerja	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L		88	100	12 bln	-
2	Mewujudkan nilai Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil yang berkualitas		90	100	12 bln	-
3	Mewujudkan nilai LK Kuasa BUN tingkat Kanwil yang berkualitas		94	100	12 bln	-
4	Memenuhi kepuasan satker terhadap layanan Kanwil		4,55 (skala 5)	100	12 bln	-
5	Mewujudkan penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker secara tepat waktu		100%	100	12 bln	-
6	Mewujudkan KPPN yang mendapatkan nilai kinerja baik sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil		90	100	12 bln	-
7	Mewujudkan edukasi dan komunikasi yang efektif		87	100	12 bln	-
8	Mewujudkan tingkat implementasi aplikasi SAKTI		100%	100	12 bln	-
9	Mewujudkan perencanaan kas kanwil yang akurat		80%	100	12 bln	-
10	Melaksanakan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program secara berkualitas		82	100	12 bln	-
11	Mewujudkan nilai laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil yang berkualitas		90	100	12 bln	-

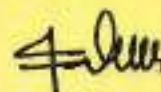
No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
12	Mewujudkan rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa pada KPPN		80	100	12 bln	-
13	Mewujudkan nilai Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah yang berkualitas		78	100	12 bln	-
14	Mewujudkan nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai Kanwil yang baik		77	100	12 bln	-
15	Memenuhi nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal		83	100	12 bln	-
16	Memenuhi nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>		83	100	12 bln	-
17	Mewujudkan pelaksanaan literasi perbendaharaan yang berkualitas		74	100	12 bln	-
18	Memenuhi BMN yang optimal		92%	100	12 bln	-
19	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil		95%	100	12 bln	2.509.121.000

Pejabat Penilai,



Andin Hadiyanto
NIP 196506091990121001

Gorontalo, 29 Januari 2020
PNS yang dinilai,



Fahma Sari Fatma
NIP 197311041998032002

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

No.	SPK/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Lapangan Kegiatan		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	<p>Pelaksanaan Anggaran yang Efektif, Optimal, dan Tepat Waktu</p> <p>IKU: Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil</p>	<p>Optimalisasi transaksi pembayaran non tunai di tingkat wilayah</p>	<p>Meningkatnya transaksi pembayaran non tunai tingkat wilayah</p> <p>Target: Minimal 70% satker wajib KKP di tingkat wilayah memiliki besaran proporsi UP Tunai ≤ 60%</p>	<p>Q1: Edukasi penggunaan, dan keamanan, dan bertanggung-jawaban transaksi non tunai kepada Satker</p> <p>Q2: Money Implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai (KKP) di tingkat wilayah</p> <p>Q3: Koordinasi dengan Stakeholder (BI, Bank Penerbit KKP, OJK, instansi vertikal DJP)</p> <p>Q4: Analisis perkembangan transaksi non Tunai dalam pelaksanaan APBN di tingkat wilayah</p>	<p>Q1: Laporan kegiatan</p> <p>Q2: Laporan kegiatan</p> <p>Q3: Laporan kegiatan</p> <p>Q4: Kajian/ Analisis</p>	<p>Januari s.d Desember 2020</p>	<p>Kepala Kanwil DJPb</p>	<p>Rp 10.394.000</p>

2.	<p>SS: Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal</p> <p>IKU: Nilai rata - rata <i>hard competency</i> pegawai</p>	<p>Pelaksanaan <i>Coaching and Counseling</i></p>	<p>Peningkatan kapasitas pegawai</p>	<p>Q1: <i>Coaching and counseling</i></p> <p>Q2: <i>Coaching and counseling</i></p> <p>Q3: <i>Coaching and counseling</i></p> <p>Q4: <i>Coaching and counseling</i></p>	<p>Q1: 65%</p> <p>Q2: 65%</p> <p>Q3: 65%</p> <p>Q4: 65%</p>	<p>Desember 2020</p>	<p>Seluruh Pejabat Eselon III</p>	<p>Rp 22.000.000</p>
3.	<p>Pelaksanaan Anggaran yang Efektif, Optimal, dan Tepat Waktu.</p> <p>IKU : Nilai Kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil</p>	<p>Peningkatan Kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran melalui <i>Intensize Care</i></p>	<p>Peningkatan Nilai Kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>Smt I : <i>Focus Group Discussion</i> bersama BPS untuk meningkatkan kualitas metode pengolahan data</p> <p>Smt II : Koordinasi terkait penyediaan data dengan pemilik data (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dll)</p>	<p>Smt I : Laporan Kegiatan</p> <p>Smt II : Laporan Kegiatan</p>	<p>Semester I dan Semester II</p>	<p>Bidang PPA I</p>	<p>Rp 12.700.000</p>

Jakarta, 29 Januari 2020

PNS yang dinilai,



Fahma Sari Fatma
NIP 197311041998032002

RENCANA KERJA TAHUNAN

2020



RKT
KANWIL DJPB
GORONTALO



KEMENTERIAN KEDAGANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBERDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI GORONTALO

PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun dalam rangka memberikan panduan bagi jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan kegiatan dalam tahun 2020. Dokumen ini memuat arah pelaksanaan dan pencapaian serta kebijakan pelaksanaan kegiatan organisasi dengan bertolak kepada Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi yang harus dicapai pada tahun 2020.

Dalam rangka mewujudkan kegiatan tersebut untuk pencapaian IKU organisasi yang telah ditetapkan, seluruh unit eselon III lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menyusun rencana kegiatan bersama berdasarkan anggaran yang ada dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat berpola sistematis berkelanjutan dan saling bersinergi sehingga tugas pokok dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berjalan dengan baik untuk pencapaian target kinerja dalam IKU, seirama dengan semakin luasnya rentang potensi dan permasalahan yang melingkupi.

Gorontalo, 3 Februari 2020

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka memberikan panduan bagi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2020 telah disusun Rencana Kerja Tahunan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2020. Dokumen ini memuat rencana kegiatan berdasarkan kalender kegiatan tahun 2020 Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo diselaraskan dengan anggaran dalam DIPA dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 yang telah ditetapkan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada saat ini.

Melalui penyusunan panduan ini diharapkan pelaksanaan kegiatan kerja tahunan Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat selaras dan saling mendukung antar Bagian/Bidang yang ada dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang baik dan tercapainya capaian IKU yang telah ditetapkan di Tahun 2020.

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan dan pertanggung jawaban di bidang perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

1. Penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan anggaran;
3. Penyusunan reviu belanja pemerintah (spending review) dan reviu pelaksanaan anggaran;
4. Pembinaan teknis sistem akuntansi;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
6. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
7. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) ;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
9. Pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman dan kredit program di daerah;
10. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;

11. Pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah; -
12. Pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) ;
13. Pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
14. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
15. Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
16. Pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) ;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan kepatuhan internal; dan
19. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo merupakan unit vertikal eselon II terdiri dari satu Kepala Kantor dibantu oleh 5 (lima) pejabat eselon III, yaitu Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang PPA I, Kepala Bidang PPA II, Kepala Bidang PAPK, dan Kepala Bidang SKKI.

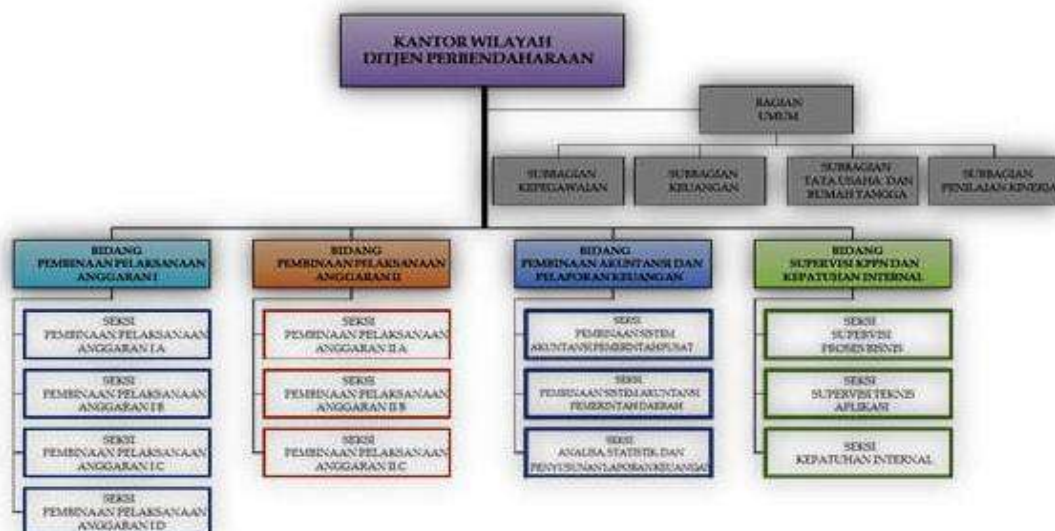
1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016, adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum;
2. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I;
3. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II;
4. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
5. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal.

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANWIL DJPb PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO

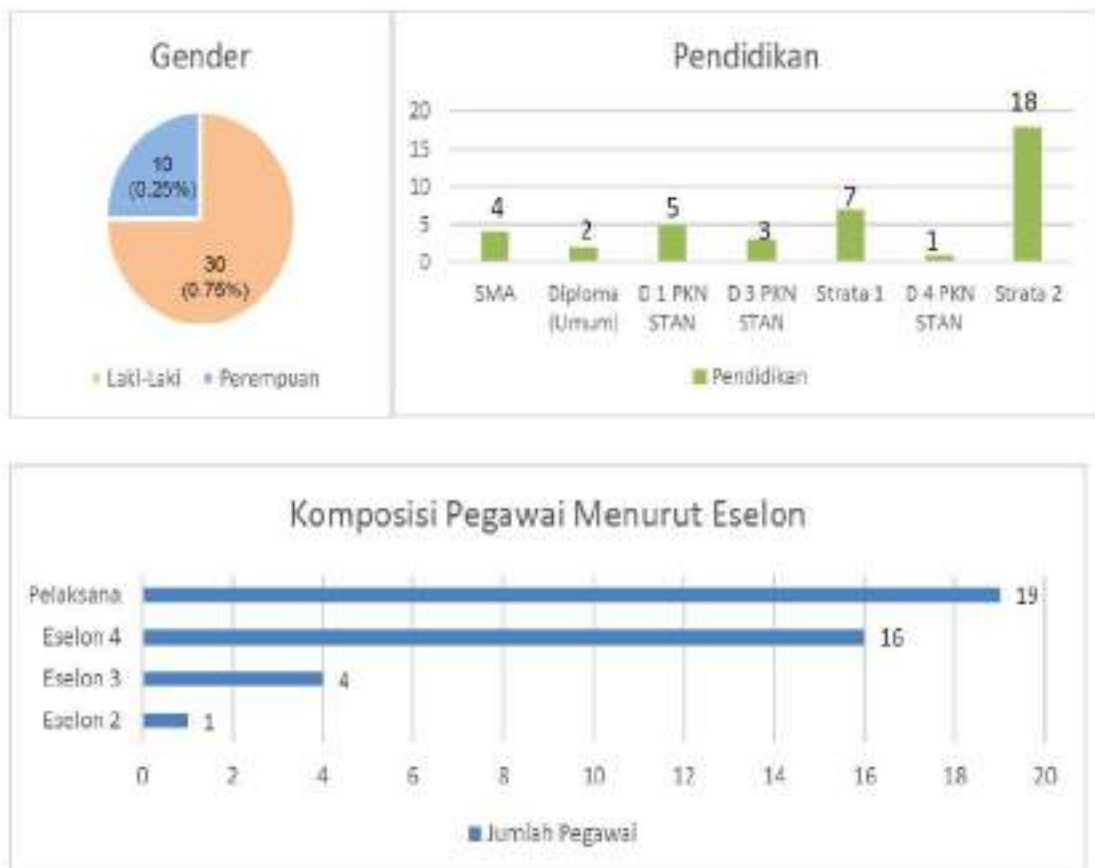


1.3. Profil Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Jumlah SDM Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo terdiri dari berbagai macam kompetensi menjadi tantangan dalam pengelolaan SDM terutama dalam menempatkan staf pelaksana agar sesuai dengan tugas dan keahliannya agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik. SDM Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 40 orang dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 1.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender, Pendidikan dan Eselon

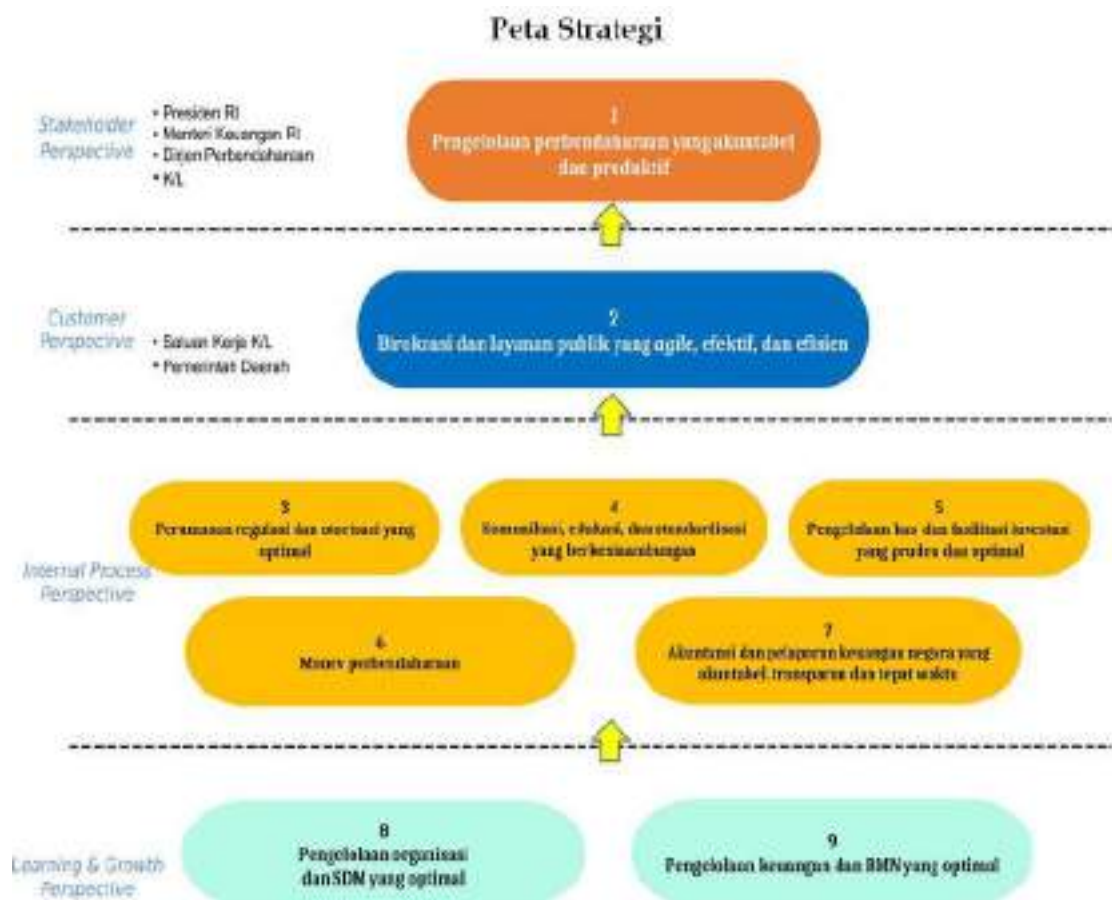


BAB II TARGET KINERJA KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO

2.1 Target Kinerja

Terdapat target kinerja yang telah ditetapkan dan harus dicapai oleh Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada tahun 2020, ada 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) IKU Kemenkeu-*Two* yaitu Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai Pemilik Peta Strategis, dimana Peta Strategis, Sasaran Strategis dan IKU sebagaimana gambar dan tabel berikut :

Gambar 2.1
Peta Strategis Tahun 2020



Tabel 2.1

Sasaran Program. Indikator Kinerja Utama, Target IKU dan Rencana Kegiatan Tahun 2020

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Rencana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi peraturan terbaru Kebijakan Pelaksanaan Anggaran ke Seluruh Satuan Kerja Lingkup Provinsi Gorontalo terkait Reformulasi IKPA 2020. b. Sosialisasi Peraturan kebijakan Pelaksanaan Anggaran Terbaru ke Seluruh Satker.
		1b-N Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	90	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Focus Group Discussion dalam rangka pemantapan hasil KFR Tahunan Tahun 2019 Provinsi Gorontalo. b. Penyelenggaraan diseminasi dalam rangka sosialisasi Profil Keuangan Daerah dan Kajian Fiskal Regional Tahunan Tahun 2019 Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini diselenggarakan bersama dengan Bank Indonesia, BAPPEDA, dan Badan Pusat Statistik di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. c. Penyelenggaraan Focus Group Discussion dalam rangka pemantapan hasil KFR semester I 2020 Provinsi Gorontalo. d. Penyelenggaraan seminar dalam rangka sosialisasi Kajian Fiskal Regional Semester I Tahun 2020 Provinsi Gorontalo
		1c-N Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	94	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Koordinasi Penyusunan LKBUN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Untuk Seluruh KPPN Periode Semester I TA.2020. Peserta Pegawai Bidang PAPK, Pegawai SKKI, Seksi Vera KPPN Gorontalo, Seksi Vera KPPN Marisa. b. Konsultasi LKBUN dalam Rangka Mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi Seluruh Indonesia Semester I 2020 di Jakarta. Peserta Pegawai Bidang PAPK.. c. Diseminasi LKBUN Untuk Peningkatan Kapasitas Penyusun LKBUN dan Sosialisasi Satker Untuk Operator UAKPA di Marisa. Peserta pegawai seksi Vera KPPN Marisa dan Operator Lingkup KPPN Marisa. d. Konsultasi LKBUN dalam Rangka Mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi Seluruh Indonesia Semester II 2020 di Jakarta
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,55 (skala 5)	<ul style="list-style-type: none"> a. Monev langsung Ke Lokasi Satuan Kerja untuk dapat berdialog dan mendapatkan keterangan langsung dari Pejabat Perbendaharaan Satker terkait kendala dan permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi untuk dapat memberikansolusi dan tindak lanjut agar lebih baik lagi. b. Pemberian Penghargaan dan apresiasi kepada Satuan Kerja, Pemda dan Lembaga Jurnalis di Gorontalo dengan nilai capaian yang baik berupa IKPA, LKPP, PNBP dll

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Rencana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal	3a-N Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	a. Sosialisasi PMK terbaru terkait Revisi Anggaran tahun 2020 Ke seluruh Satker Lingkup KPPN Gorontalo. b. Sosialisasi PMK terbaru terkait Revisi Anggaran tahun 2020 Ke seluruh Satker Lingkup KPPN Marisa.
4.	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	4a- N Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	90	Pembinaan dan supervisi rutin yang dilakukan setiap semester dengan berpedoman pada KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa..
		4b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87	a. Bimbingan Teknis Edukasi dan Komunikasi ke KPPN Marisa Semester I 2020 dalam ranah Teknologi Informasi dan Komunikasi. b. Bimbingan Teknis Edukasi dan Komunikasi ke KPPN Gorontalo Semester I 2020 dalam ranah Teknologi Informasi dan Komunikasi
		4c-N Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%	Pendampingan SAKTI WEB TW.I ke KPPN GORONTALO Maret 2020 sinkronisasi dan pengawasan implementasi modul admin dan modul penganggaran Aplikasi SAKTI WEB 2020.
5.	Pengelolaan kas dan fasilitas investasi yang pruden dan optimal	5a- N Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil	80%	Kunjungan Ke KPPN Gorontalo untuk memantau perkembangan deviasi dan pelaksanaan PPDH/renkas selama satu Triwulan ke KPPN
		5b- N Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	82	Monitoring dan Evaluasi Kredit Program (KUR dan UMi) dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit program (KUR dan UMi) di wilayah Provinsi Gorontalo.
6.	Monev Perbendaharaan yang optimal	6a-N Nilai kualitas laporan reuiu pelaksanaan anggaran Kanwil	90	a. Laporan "mini RPA" yang bertujuan untuk percepatan Analisis Pelaksanaan APBN di Tingkat Regional. b. Penyusunan Laporan Review Pelaksanaan Anggaran rutin dengan menganalisis terkait Hasil Capaian dan realisasi Pelaksanaan Anggaran Satker lingkup Regional Tahun 2019 c. Kegiatan One On One Meeting dengan Beberapa Satker terpilih dengan tingkat capaian rendah realisasi dan Output dan nilai IKPA rendah
		6b-N Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	80	a. Penyelenggaraan bimbingan teknis DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2020 berupa pelatihan penggunaan Aplikasi OM SPAN DAK Fisik 2020 . b. Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa Semester I
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	78	FGD GFS dan Pembinaan PSAPD. Tujuan untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder tentang pentingnya memberikan data LKPD dan menggunakan informasi keuangan dalam Laporan GFS. Peserta Kanwil, BPS, BI, BKAD Se-Provinsi Gorontalo, Mahasiswa.

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Rencana Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
8.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal	8a- N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> Pegawai	77	
		8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	a. Pemantauan Kode Etik dan Kepatuhan Pegawai KPPN Gorontalo metode Sidak. b. Pemantauan Kode Etik dan Kepatuhan Pegawai KPPN Gorontalo metode <i>Blind Surveillance</i>
		8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83	a. IKU Triwulan IV (comprehensive report) oleh Pengelola Kinerja dan Usulan Refinement IKU dan IKU tambahan Tahun 2020. b. Penyusunan LAKIN oleh Pengelola Kinerja. c. Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two-Three-Four-Five Tahun 2020. d. Dialog Kinerja Organisasi
		8d-N	Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	74	
9.	SDM yang kompeten	9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%	Rapat koordinasi dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan tahun 2019. Pendampingan Implementasi Aplikasi Nadine dan Marketplace untuk diterapkan di KPPN Gorontalo. Rapat koordinasi dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan Semester I tahun 2020
		9b-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%	Koordinasi antara Bagian Umum dan Seluruh Bidang untuk memastikan tercapainya IKU KPA dan IKPA.

2.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengelola dana DIPA untuk membiayai seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Tahun 2020

No	Output	Kebutuhan Pendanaan
Kegiatan: Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara (015.08.09.1706)		
1	Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (1706.003)	166.918.000
2	Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah (1706.004)	174.284.000
	Hasil Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah (1706.005)	124.736.000
3	Dokumen Hasil Layanan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah (1706.009)	124.522.000
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1706.951)	654.685.000
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker (1706.970)	368.251.000
6	Layanan Perkantoran (1706.994)	2.509.121.000
Jumlah		4.122.517.000

LAMPIRAN:
KALENDER KEGIATAN DAN
RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2020

KALENDER KEGIATAN KANWIL DJPB PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020

Bulan	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Deskripsi Singkat Kegiatan	UIC
Januari	Spending Review Efektifitas 2019	2 - 3 Januari 2020	Kanwil DJPB Prov. Gorontalo	Membuat Laporan Spending Review 2019 pada wilayah kerja masing-masing dalam rangka peningkatan kualitas belanja Pemerintah	Bidang PPA I
	Penyusunan Laporan Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2019	3 Jan 2020	Kanwil DJPB Prov Gorontalo	Flash Report oleh Pengelola Kinerja	Bagian Umum
	Penyusunan Flash Report Analisis Belanja Spasial 2019	6 - 10 Januari 2020	Kanwil DJPB Prov. Gorontalo	Laporan "mini RPA" yang bertujuan untuk percepatan Analisis Pelaksanaan APBN di Tingkat Regional	Bidang PPA I
	Penyusunan LCK Triwulan IV Tahun 2019 dan Reviu Refinement IKU dan Usulan IKU Tambahan Tahun 2020	10 - 12 Januari 2020	Kanwil DJPB Prov Gorontalo	IKU Triwulan IV (comprehensive report) oleh Pengelola Kinerja dan Usulan Refinement IKU dan IKU tambahan Tahun 2020	Bagian Umum
	Pengumpulan Bahan Laporan RPA	10 - 25 Januari 2020	Kunjungan ke beberapa Lokasi Satker yang memiliki kendala penyerapan anggaran yang kurang baik	Monev langsung Ke Lokasi Satuan Kerja untuk dapat berdialog dan mendapatkan keterangan langsung dari Pejabat Perbendaharaan Satker terkait kendala dan permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi untuk dapat memberikan solusi dan tindak lanjut agar lebih baik lagi	Bidang PPA I
	Penyusunan RPA Semester II 2019	10 - 31 Januari 2020	Kanwil DJPB Prov. Gorontalo	Penyusunan Laporan Review Pelaksanaan Anggaran rutin dengan menganalisis terkait Hasil Capaian dan realisasi Pelaksanaan Anggaran Satker lingkup Regional Tahun 2019	Bidang PPA I
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Uji Sertifikasi Bendahara pada KPPN selaku UPS pada KPPN Gorontalo	13 Jan 2020	KPPN Gorontalo	Monev pelaksanaan uji sertifikasi dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dari pusat, sebagaimana diketahui per tanggal 18 Januari 2020 seluruh bendahara harus sudah bersertifikasi. Untuk pelaksanaan uji sertifikasi setelah tanggal 18 Januari menunggu informasi Kantor Pusat	Bidang SKKI
	Sosialisasi	21-22 Januari 2020	Kanwil DJPB	Sosialisasi untuk UAPPA-W dan beberapa Satker prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Tahunan 2019. Peserta Operator UPPAW dan Satker Prioritas.	Bidang PPAK
	Sosialisasi	21-22 Januari 2020	Kanwil DJPB	Sosialisasi untuk Satker DK/TP dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Tahunan 2019. Peserta Operator Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	Bidang PPAK
	Hari Bakti Perbendaharaan	14 - 21 Januari 2020	Kanwil DJPB Prov Gorontalo	Rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan	Bagian Umum
	Rapat Penyusunan Profil Risiko 2019	15 Jan 2020	Ruang Rapat Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Manajemen Risiko terkait Penyusunan Profil Risiko oleh Pengelola Risiko Bagian Umum, Bidang PPAK, Bidang PPA I, Bidang PPA II dan Bidang SKKI	Bidang SKKI
	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019	15-17 Januari 2020	Ruang Rapat Kanwil DJPB Prov Gorontalo	Rapat koordinasi dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan tahun 2019. Laporan oleh UAKPA disampaikan ke Kanwil paling lambat tanggal 27 Januari 2020, dan penyampaian UAPPA-W paling lambat tanggal 3 Februari 2020	Bagian Umum
	DKO Triwulan IV Tahun 2019	16 Jan 2020	Kanwil DJPB Prov Gorontalo	Pembahasan Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2019 yang diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo dan Pengelola Kinerja KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa	Bagian Umum
	Monev dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Nadine dan Marketplace	20-22 Januari 2020	KPPN Marisa	Pendampingan Implementasi Aplikasi Nadine dan Marketplace untuk diterapkan di KPPN Marisa	Bagian Umum
	Sosialisasi	20 -24 Januari 2020	KPPN Marisa	Rapat Koordinasi Penyusunan LKBUN UAKBUN Daerah KPPN Marisa dan Sosialisasi Satker di Lingkup KPPN Marisa	Bidang PPAK
	Bimtek	20 -24 Januari 2020	BKAD Bone Bolango	Pengenalan Aplikasi CaLK Untuk Penyusunan Laporan Keuangan ke Bidang Akuntansi Pemda Bone Bolango. Peserta Pegawai Bidang Akuntansi BKAD Bone Bolango.	Bidang PPAK
	Penyusunan LAKIN	20 - 28 Januari 2020	Kanwil DJPB Prov Gorontalo	Penyusunan LAKIN oleh Pengelola Kinerja	Bagian Umum
	Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two-Three-Four-Five Tahun 2020	20 - 31 Januari 2020	Kanwil DJPB Prov Gorontalo	Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two-Three-Four- Five Tahun 2020	Bagian Umum
	Rakorev TW IV 2019	21 - 31 Januari 2020	Ruang Rapat Kantor Gubernur Prov. Gorontalo	Rapat Koordinasi dengan seluruh Pimpinan Pemerintah Daerah dan Provinsi Terkait melibatkan Pimpinan Kanwil DJPB yang membahas mengenai Progres Pelaksanaan Anggaran rutin Triwulanan lingkup regional dan pencairan TKDD	Bidang PPA I
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran 2020	21 - 31 Januari 2020	Aula Kanwil DJPB Prov. Gorontalo	Sosialisasi peraturan terbaru Kebijakan Pelaksanaan Anggaran ke Seluruh Satuan Kerja Lingkup Provinsi Gorontalo terkait Reformulasi IKPA 2020	Bidang PPA I
Monev dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Nadine dan Marketplace	27-29 Januari 2020	KPPN Gorontalo	Pendampingan Implementasi Aplikasi Nadine dan Marketplace untuk diterapkan di KPPN Gorontalo	Bagian Umum	
Sosialisasi PMK Revisi 2020	3 - 7 Februari 2020	Aula Kanwil DJPB Prov. Gorontalo	Sosialisasi PMK terbaru terkait Revisi Anggaran tahun 2020 Ke seluruh Satker Lingkup KPPN Gorontalo	Bidang PPA I	
Internalisasi Akselerasi Penilaian dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	3 Feb 2020	Kanwil DJPB Prov Gorontalo	Mengadakan Internalisasi Akselerasi Penilaian dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	Bidang SKKI	
Rakor Sem I	3 - 7 Februari 2020	Kanwil DJPB	Rapat Koordinasi Penyusunan LKBUN Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo Untuk Seluruh KPPN Periode Semester I TA.2020. Peserta Pegawai Bidang PPAK, Pegawai SKKI, Seksi Vera KPPN Gorontalo, Seksi Vera KPPN Marisa.	Bidang PPAK	
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas	5 Feb 2020	Kanwil DJpb	Mengadakan pencanangan pembangunan zona integritas	Bidang SKKI	

Februari	Focus Group Discussion Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan Tahun 2019	6 Feb 2020	Aula/Ruang Rapat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	Penyelenggaraan Focus Group Discussion dalam rangka pemantapan hasil KFR Tahunan Tahun 2019 Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini diselenggarakan dengan mengundang para pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dan Narasumber dari pihak eksternal.	Bidang PPA II
	FGD Manajemen Risiko	6 Feb 2020	Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	Diskusi bersama mengenai mitigasi risiko.	Bidang SKKI
	Pembinaan Akuntansi Pemda	10 - 14 Februari 2020	BKAD Boalemo	Pembinaan Aplikasi Pertanggungjawaban Bendahara (SiRekam) dan Rekonsiliasi Aset (SINGKAP) Semester I 2020 di Pemkab. Boalemo. Peserta Pegawai BKAD Boalemo.	Bidang PPAK
	FGD Spending Review Efisiensi 2020	10 - 14 Februari 2020	Aula Kanwil DJPB Prov. Gorontalo	Berupa Kegiatan Fokus Grup Discussion Satuan Kerja terpilih untuk dikonfirmasi kegiatan yang telah disusun pada RKAKL 2020 terkait efisiensi penganggarannya	Bidang PPA I
	Rekonsiliasi dan Koordinasi	10 - 14 Februari 2020	Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	Rekonsiliasi Dana Transfer dan Pertemuan Bidang Akuntansi Triwulan I TA 2020 (Tahunan 2019) Dalam Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Peserta Seluruh Pegawai BKAD Se-Provinsi Gorontalo dan Pegawai Bidang PPAK.	Bidang PPAK
	DKO Bulanan	10 Feb 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	DKO Bulan Januari 2020	Bagian Umum
	Monev Pengisian Kontrak Kinerja dan Manual IKU	10-11 Februari 2020	KPPN Marisa	Monev untuk melihat implementasi pengisian kontrak kinerja dan manual IKU pada KPPN Marisa	Bagian Umum
	Internalisasi Akselerasi Penilaian dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan KI Pusat	13 Feb 2020	Kanwil DJPb	Mengadakan internalisasi Akselerasi Penilaian dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan KI Pusat	Bidang SKKI
	Monev Pengisian Kontrak Kinerja dan Manual IKU	13-14 Februari 2020	KPPN Gorontalo	Monev untuk melihat implementasi pengisian kontrak kinerja dan manual IKU pada KPPN Marisa	Bagian Umum
	Rehabilitasi Rumah Dinas	Februari 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	Penandatanganan Kontrak Rehabilitasi Rumah Dinas.	Bagian Umum
Sosialisasi PMK Revisi 2020	17 - 21 Februari 2020	Aula KPPN Marisa	Sosialisasi PMK terbaru terkait Revisi Anggaran tahun 2020 Ke seluruh Satker Lingkup KPPN Marisa	Bidang PPA I	
Maret	Pembinaan BLU	2 - 6 Maret 2020	BLU UNG Kota Gorontalo	Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satker BLU Bandara. Peserta Pegawai Bidang PPAK dan Pegawai Satker UNG.	Bidang PPAK
	Konsultasi dan Rakornas	2 - 6 Maret 2020	Jakarta	Konsultasi LKBUN dalam Rangka Mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi Seluruh Indonesia Semester I 2020 di Jakarta. Peserta Pegawai Bidang PPAK.	Bidang PPAK
	Diseminasi Profil Keuangan Daerah dan Kajian Fiskal Regional (KFR)	4 Maret 2020	Aula/Ruang Rapat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	Penyelenggaraan diseminasi dalam rangka sosialisasi Profil Keuangan Daerah dan Kajian Fiskal Regional Tahunan Tahun 2019 Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini diselenggarakan bersama dengan Bank Indonesia, BAPPEDA, dan Badan Pusat Statistik di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.	Bidang PPA II
	Monev Satker dg Capaian IKPA, Capaian Output strategis terendah	9 - 20 Maret 2020	Monev Ke Lokasi Satker	Monev langsung Ke Lokasi Satuan Kerja untuk dapat berdialog dan mendapatkan keterangan langsung dari Pejabat Perbendaharaan Satker terkait hasil Capaian IKPA dan capaian Output strategis Satker yang belum optimal	Bidang PPA I
	Pembinaan Akuntansi Pemda	9 - 20 Maret 2020	Boalemo	Pengenalan Aplikasi CaLK Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Semester I ke Bidang Akuntansi Pemda Boalemo. Peserta Pegawai BKAD Boalemo.	Bidang PPAK
	Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai pada KPPN Gorontalo	11 Maret 2020	KPPN Gorontalo	Pemantauan Kode Etik dan Kepatuhan Pegawai KPPN Gorontalo metode Sidak	Bidang SKKI
	Focus Group Discussion Profil Keuangan Daerah	12 Maret 2020	Aula/Ruang Rapat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	Penyelenggaraan Focus Group Discussion dalam rangka mensosialisasikan hasil penyusunan Profil Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo kepada seluruh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.	Bidang PPA II
	DKO Bulanan	12 Maret 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	DKO Bulan Februari 2020	Bagian Umum
	Pendampingan SAKTI WEB TWI KE KPPN GORONTALO MARET 2020	19 Maret 2020	AULA KPPN Gorontalo	Kegiatan ini adalah kegiatan sinkronisasi dan pengawasan implementasi modul admin dan modul penganggaran Aplikasi SAKTI WEB 2020.	Bidang SKKI
	Monitoring dan Verifikasi dokumen ZI-WBK/WBBM	20 Maret 2020	KPPN Gorontalo	Pemantauan terkait Monitoring dan Verifikasi dokumen ZI-WBK/WBBM pada KPPN Gorontalo	Bidang SKKI
	Rakorwil Semester I	21-22 Maret 2020	Kota Gorontalo	Rapat Koordinasi antara Kanwil DJPb Gorontalo, KPPN Gorontalo, dan KPPN Marisa Semester I Tahun 2020	Bagian Umum
	Kegiatan FGD EPA TW I	23 - 27 Maret 2020	Aula Kanwil DJPB Prov. Gorontalo	Kegiatan One On One Meeting dengan Beberapa Satker terpilih dengan tingkat capaian rendah realisasi dan Output dan nilai IKPA rendah	Bidang PPA I
Rapat Pembahasan RKT dan anggaran Triwulan II TA	30 - 31 Maret 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	Koordinasi antara Bagian Umum dan Seluruh Bidang untuk memastikan tercapainya IKU KPA dan IKPA.	Bagian Umum	
	Pembinaan Akuntansi Pemda	1 - 3 April 2020	BKAD Kab. Gorontalo Utara	Monitoring dan Pembinaan Penerapan Aplikasi Persediaan dan CaLK Semester I 2020 yang diimplementasikan Pada Pemda Gorontalo Utara. Peserta Pegawai BKAD Gorut.	Bidang PPAK
	Rapat Unit Pengendali Resiko (Upr)	3 Apr 2020	Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen Risiko terkait Pengendalian Risiko Triwulan I Tahun 2020 oleh Pengelola Risiko Bagian Umum, Bidang PPAK, Bidang PPA I, Bidang PPA II dan Bidang SKKI	Bidang SKKI
	Rakorev TW I 2020	6 - 10 April 2020	Ruang Rapat Kantor Gubernur Prov. Gorontalo	Rapat Koordinasi dengan seluruh Pimpinan Pemerintah Daerah dan Provinsi Terkait melibatkan Pimpinan Kanwil DJPb yang membahas mengenai Progres Pelaksanaan Anggaran rutin Triwulanan lingkup regional dan pencairan TKDD	Bidang PPA I

April	Bimbingan Teknis DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2020	7 Apr 2020	Aula/Ruang Rapat Kantor Wilayah Direktorat Jederal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	Penyelenggaraan bimbingan teknis DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2020 berupa pelatihan penggunaan Aplikasi OM SPAN DAK Fisik 2020 . Kegiatan ini diselenggarakan dengan mengundang para operator Pemda di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dan Narasumber dari kantor pusat.	Bidang PPA II
	Bimbingan Teknis Edukasi dan Komunikasi ke KPPN Marisa SEMESTER I 2020	7 - 9 April 2020	AULA KPPN Marisa	Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai IKU Cascading K-2 Indeks Efektivitas Edukom, Pada kegiatan ini seluruh pegawai KPPN Marisa akan diberikan edukasi dalam ranah Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Bidang SKKI
	DKO Triwulan I TA 2020	9 Apr 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	DKO Triwulan I TA 2020	Bagian Umum
	Bimbingan Teknis Aplikasi SIKP bersama dengan Dinas Koperasi Provinsi Gorontalo	13 Apr 2020	Aula/Ruang Rapat Kantor Wilayah Direktorat Jederal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	Kegiatan bimbingan teknis aplikasi SIKP diselenggarakan berupa pelatihan penggunaan Aplikasi SIKP kepada para operator SIKP di seluruh Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini diselenggarakan bersama dengan Dinas Koperasi Provinsi Gorontalo.	Bidang PPA II
	Monev PPDH/Renkas Ke KPPN	13 - 17 April 2020	KPPN Gorontalo	Kunjungan Ke KPPN Gorontalo untuk memantau perkembangan deviasi dan pelaksanaan PPDH/renkas selama satu Triwulan ke KPPN	Bidang PPA I
	Bimbingan Teknis Edukasi dan Komunikasi ke KPPN Gorontalo SEMESTER II 2020	15 - 16 April 2020	AULA KPPN Gorontalo	Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai IKU Cascading K-2 Indeks Efektivitas Edukom, Pada kegiatan ini seluruh pegawai KPPN Gorontalo akan diberikan edukasi dalam ranah Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Bidang SKKI
	Monitoring Akselerasi ZI-WBBK/WBBM KPPN Marisa	16 - 17 April 2020	KPPN Marisa	Pemantauan terkait Monitoring dan Verifikasi dokumen ZI-WBK/WBBM pada KPPN Marisa	Bidang SKKI
	Pembinaan dan Supervisi KPPN Marisa Semester I	20- 24 April 2020	KPPN Marisa	Pembinaan dan supervisi rutin yang dilakukan setiap semester dengan berpedoman pada KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN.	Bidang SKKI
	Forum Komunikasi Satker PNB	20 - 24 April 2020	Aula Kanwil DJPB Prov. Gorontalo	Kegiatan Tahunan kepada Seluruh Satker PNB Berupa Peraturan PNB sekaligus Diskusi mengenai Pelaksanaan pengelolaan PNB pada Satker PNB	Bidang PPA I
	Monitoring dan Evaluasi Implementasi ISO KPPN Marisa Semester I	23 - 24 April 2020	KPPN Marisa	Monev yang dilakukan untuk memastikan bahwa Implementasi ISO masih dilakukan atau diimplementasikan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-151/PB/2018 tentang Pedoman Implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN.	Bidang SKKI
Sosialisasi Register Hibah	27 - 30 April 2020	Aula Kanwil DJPB Prov. Gorontalo	Kegiatan Sosialisasi mengenai Peraturan mengenai Hibah dan tata cara pelaksanaannya kepada Satker yang sering dan berpotensi menerima Hibah baik Uang dan barang	Bidang PPA I	
Mei	FGD Satker BLU	4 - 8 Mei 2020	Ruang Rapat Kanwil DJPb Prov. Gorontalo	Kegiatan FGD Satker BLU dengan mengundar Pakar BLU dari Pusat atau berupa FGD terkait materi terkini tentang BLU	Bidang PPA I
	DKO Bulanan	8 Mei 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	DKO Bulan April 2020	Bagian Umum
	Pembinaan BLU Smt I	11 - 15 Mei 2020	Lokasi Satker BLU	Pembinaan Rutin Semesteran ke dua Satker BLU di Gorontalo terkait permasalahan Kinerja Pengelolaan BLU, Aset, SPI, Remunerasi dll	Bidang PPA I
	Rekonsiliasi dan Koordinasi	11 - 15 Mei 2020	Tentatif	Rekonsiliasi Dana Transfer dan Pertemuan Bidang Akuntansi Triwulan II TA 2020 (Data Triwulan I) Dalam Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Peserta Seluruh Pegawai BKAD Se-Provinsi Gorontalo dan Pegawai Bidang PPAK.	Bidang PPAK
	Pembinaan dan Supervisi KPPN Gorontalo Semester I	11-15 Mei 2020	KPPN Gorontalo	Pembinaan dan supervisi rutin yang dilakukan setiap semester dengan berpedoman pada KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN.	Bidang SKKI
	Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai KPPN Gorontalo	13 Mei 2020	KPPN Gorontalo	Pemantauan Kode Etik dan Kepatuhan Pegawai KPPN Gorontalo metode <i>Blind Surveillance</i>	Bidang SKKI
	Monitoring dan Evaluasi Implementasi ISO KPPN Gorontalo Semester I	14-15 Mei 2020	KPPN Gorontalo	Monev yang dilakukan untuk memastikan bahwa Implementasi ISO masih dilakukan atau diimplementasikan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-151/PB/2018 tentang Pedoman Implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN.	Bidang SKKI
	Upacara Hari Lahir Pancasila	1 Jun 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	Upacara Hari Lahir Pancasila	Bagian Umum
	Monitoring Infrastruktur TIK Ke KPPN Gorontalo	2-4 Juni 2020	KPPN Gorontalo	Kegiatan ini adalah kegiatan monitoring Infrastruktur SPAN dan Sakti Semester I 2020. Dilakukan sebagai upaya pemenuhan IKU terkait.	Bidang SKKI
	DKO Bulanan	8 Jun 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	DKO Bulan Mei 2020	Bagian Umum

Juni	Monitoring Infrastruktur TIK Ke KPPN Marisa	8-10 Juni 2020	KPPN Marisa	Kegiatan ini adalah kegiatan monitoring Infrastruktur SPAN dan Sakti Semester I 2020. Dilakukan sebagai upaya pemenuhan IKU terkait.	Bidang SKKI
	Monitoring dan Evaluasi Kredit Program (KUR dan UMi)	8-12 Juni 2020	Pemda Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo	Salah satu pelaksanaan tugas bidang PPA II dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit program (KUR dan UMi) di wilayah Provinsi Gorontalo.	Bidang PPA II
	Monev Satker dg Capaian IKPA, Capaian Output strategis terendah	8 - 12 Juni 2020	Monev Ke Lokasi Satker	Monev langsung Ke Lokasi Satuan Kerja untuk dapat berdialog dan mendapatkan keterangan langsung dari Pejabat Perbendaharaan Satker terkait hasil Capaian IKPA dancapaian Output strategis Satker yang belum optimal	Bidang PPA I
	Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa Semester I	10-12 Juni 2020	KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa	Salah satu pelaksanaan tugas bidang PPA II dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh KPPN.	Bidang PPA II
	Pendampingan SAKTI WEB TWII KE KPPN GORONTALO JUNI 2020	16 Jun 2020	AULA KPPN Gorontalo	Kegiatan ini adalah kegiatan sinkronisasi dan pengawasan implementasi modul admin dan modul penganggaran Aplikasi SAKTI WEB TW II 2020.	Bidang SKKI
	Monitoring dan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	16-17 Juni 2020	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aloe Saboe	Salah satu pelaksanaan tugas bidang PPA II dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ada di Provinsi Gorontalo	Bidang PPA II
	Kegiatan FGD EPA TW II	22 - 26 Juni 2020	Aula Kanwil DJPB Prov. Gorontalo	Kegiatan One On One Meeting dengan Beberapa Satker terpilih dengan tingkat capaian rendah realisasi dan Output dan nilai IKPA rendah	Bidang PPA I
	Focus Group Discussion Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	25 Jun 2020	Aula/Ruang Rapat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	Penyelenggaraan <i>Focus Group Discussion</i> dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ada di Provinsi Gorontalo	Bidang PPA II
	Rapat Pembahasan RKT dan anggaran Triwulan III TA	29 - 30 Juni 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	Koordinasi antara Bagian Umum dan Seluruh Bidang untuk memastikan tercapainya IKU KPA dan IKPA.	Bagian Umum
Juli	FGD Inovasi Layanan	2 Jul 2020	Ruang Rapat Kanwil DJPb Gorontalo	Kegiatan ini adalah kegiatan rapat merumuskan Inovasi layanan KPPN dan Kanwil yang akan diajukan ke Pusat sebagai Inovasi Layanan 2020.	Bidang SKKI
	Focus Group Discussion Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah	2 Jul 2020	Aula/Ruang Rapat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	Penyelenggaraan <i>Focus Group Discussion</i> dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan APBN maupun APBD di Provinsi Gorontalo	Bidang PPA II
	Rapat Unit Pengendali Resiko (Upr)	3 Jul 2020	Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen Risiko terkait Pengendalian Risiko Triwulan II Tahun 2020 oleh Pengelola Risiko Bagian Umum, Bidang PPAK, Bidang PPA I, Bidang PPA II dan Bidang SKKI	Bidang SKKI
	Rakorev TW II 2020	6 - 10 Juli 2020	Ruang Rapat Kantor Gubernur Prov. Gorontalo	Rapat Koordinasi dengan seluruh Pimpinan Pemerintah Daerah dan Provinsi Terkait melibatkan Pimpinan Kanwil DJPb yang membahas mengenai Progres Pelaksanaan Anggaran rutin Triwulan lingkup regional dan pencairan TKDD	Bidang PPA I
	Rakor Sem II	6 - 10 Juli 2020	Kanwil DJPb	Rapat Koordinasi Penyusunan LKBUN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Untuk Seluruh KPPN Periode Semester I TA.2020. Peserta Pegawai Bidang PPAK, Pegawai SKKI, Seksi Vera KPPN Gorontalo, Seksi Vera KPPN Marisa.	Bidang PPAK
	DKO Triwulan II TA 2020	9 Jul 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	DKO Triwulan II 2020	Bagian Umum
	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020	13-14 Juli 2020	KPPN Gorontalo	Rapat koordinasi dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan Semester I tahun 2020	Bagian Umum
	Sosialisasi	13 - 17 Juli 2020	Kanwil DJPb	Sosialisasi untuk Satker DK/TP untuk Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020. Peserta Operator Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	Bidang PPAK
	Pengumpulan Bahan Laporan RPA smt I 2020	13 - 24 Juli 2020	Kunjungan ke beberapa Lokasi Satker yang memiliki kendala penyerapan anggaran yang kurang baik	Monev langsung Ke Lokasi Satuan Kerja untuk dapat berdialog dan mendapatkan keterangan langsung dari Pejabat Perbendaharaan Satker terkait kendala dan permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi untuk dapat memberikan solusi dan tindak lanjut agar lebih baik lagi	Bidang PPA I
	Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai KPPN Marisa	15 - 16 Juli 2020	KPPN Marisa	Pemantauan Kode Etik dan Kepatuhan Pegawai KPPN Marisa metode Sidak	Bidang SKKI
	Rekonsiliasi dan Koordinasi	20 - 24 Juli 2020	Tentatif	Rekonsiliasi Dana Transfer dan Pertemuan Bidang Akuntansi Triwulan III TA 2020 (Data Triwulan II) Dalam Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Peserta Seluruh Pegawai BKAD Se-Provinsi Gorontalo dan Pegawai Bidang PPAK.	Bidang PPAK
	Sosialisasi Peraturan Terkait Pelaksanaan Anggaran Terbaru	21 - 24 Juli 2020	Aula Kanwil DJPB Prov. Gorontalo	Sosialisasi Peraturan kebijakan Pelaksanaan Anggaran Terbaru ke Seluruh Satker	Bidang PPA I
Workshop Sosialisasi Implementasi ISO untuk KPPN Marisa dan KPPN Gorontalo	27 Jul 2020	Kanwil DJPb Gorontalo	Workshop sosialisasi Implementasi ISO dilaksanakan menjelang <i>audit surveillance</i> dari badan sertifikasi eksternal. Karena masa berlaku sertifikasi ISO 9001:2015 habis pada tahun 2020. Narasumber dari Kanwil. Apabila dimungkinkan, Kantor Pusat turut serta menjadi narasumber. (Menunggu nota dinas dari kantor pusat, perkiraan kegiatan bulan Juli atau Agustus)	Bidang SKKI	
Monev Satker PNB	3 - 14 Agustus 2020	Lokasi Satker PNB	Monev dengan mengunjungi langsung ke Lokasi satker PNB tidak terpusat dengan menghimpun segala permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan PNB dan juga memastikan semua penerimaan lgsung disetor ke kas negara, tidak ada pengendapan di rekening Bendahara Penerimaan	Bidang PPA I	

Agustus	Focus Group Discussion Kajian Fiskal Regional (KFR) Semester I Tahun 2020	4 Agustus 2020	Aula/Ruang Rapat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	Penyelenggaraan <i>Focus Group Discussion</i> dalam rangka pemantapan hasil KFR semester I 202 Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini diselenggarakan dengan mengundang para pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dan Narasumber dari pihak eksternal.	Bidang PPA II
	DKO Bulanan	10 Agustus 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	DKO Bulan Juli 2020	Bagian Umum
	Upacara Hari Kemerdekaan	17 Agustus 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	Bagian Umum	Bagian Umum
	Bimbingan Teknis Edukasi dan Komunikasi ke KPPN Gorontalo SEMESTER II 2020	18-19 Agustus 2020	AULA KPPN Gorontalo	Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai IKU Cascading K-2 Indeks Efektivitas Edukom, Pada kegiatan ini seluruh pegawai KPPN akan diberikan edukasi dalam ranah Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Bidang SKKI
	Workshop Sosialisasi WBK- WBBM dan Manajemen Risiko	21 Agustus 2020	Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	<i>Sharing Knowledge</i> terkait WBK-WBBM dan Manajemen Risiko	Bidang SKKI
	Monev PPDH/Renkas Ke KPPN	24 - 28 Agustus 2020	KPPN Gorontalo	Kunjungan Ke KPPN Gorontalo untuk memantau perkembangan deviasi dan pelaksanaan PPDH/renkas selama satu Triwulan ke KPPN	Bidang PPA I
	Asistensi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	25-27 Agustus 2020	RSUD Pohnuato dan RSUD Dunda	Salah satu pelaksanaan tugas bidang PPA II dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ada di Provinsi Gorontalo	Bidang PPA II
September	Pembinaan Akuntansi Pemda	1 - 4 September 2020	BKAD Kab. Gorontalo Utara	Monitoring dan Pembinaan Penerapan Aplikasi Persediaan dan CaLK Semester II 2020 yang diimplementasikan Pada Pemda Gorontalo Utara. Peserta Pegawai BKAD Gorut.	Bidang PPAK
	Focus Group Discussion Konsolidasi Fihak Ketiga	3 Sep 2020	Aula/Ruang Rapat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	Penyelenggaraan <i>Focus Group Discussion</i> dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan potongan fihak ketiga	Bidang PPA II
	Focus Group Discussion	7 - 11 September 2020	Kanwil DJPb	FGD GFS dan Pembinaan PSAPD. Tujuan untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder tentang pentingnya memberikan data LKPD dan menggunakan informasi keuangan dalam Laporan GFS. Peserta Kanwil, BPS, BI, BKAD Se-Propinsi Gorontalo, Mahasiswa.	Bidang PPAK
	Treasury Award 2020	8 - 11 September 2020	Aula Kanwil DJPB Prov. Gorontalo/Hotel di Gorontalo	Pemberian Penghargaan dan apresiasi kepada Satuan Kerja, Pemda dan Lembaga Jurnalis di Gorontalo dengan nilai capaian yang baik berupa IKPA, LKPP, PNPB dll	Bidang PPA I
	DKO Bulanan	9 September 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	DKO Bulan Agustus 2020	Bagian Umum
	Monitoring dan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	16 Sep 2020	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aloe Saboe	Salah satu pelaksanaan tugas bidang PPA II dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ada di Provinsi Gorontalo	Bidang PPA II
	Monitoring dan Evaluasi Kredit Program (KUR)	21-22 September 2020	Pemda Kabupaten Pohnuato dan Boalemo	Salah satu pelaksanaan tugas bidang PPA II dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit program (KUR) di wilayah Provinsi Gorontalo.	Bidang PPA II
	Kegiatan FGD EPA TW III	28 - 30 September 2020	Aula Kanwil DJPB Prov. Gorontalo	Kegiatan One On One Meeting dengan Beberapa Satker terpilih dengan tingkat capaian rendah realisasi dan Output dan nilai IKPA rendah	Bidang PPA I
	Rapat Pembahasan RKT dan anggaran Triwulan IV TA	28 - 30 September 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	Koordinasi antara Bagian Umum dan Seluruh Bidang untuk memastikan tercapainya IKU KPA dan IKPA.	Bagian Umum
	Pendampingan SAKTI WEB TWIII KE KPPN GORONTALO September 2020	30 Sep 2020	AULA KPPN Gorontalo	Kegiatan ini adalah kegiatan sinkronisasi dan pengawasan implementasi modul admin dan modul penganggaran Aplikasi SAKTI WEB TW III 2020.	Bidang SKKI
Oktober	Pembinaan BUN	1-2 Oktober 2020	Kab. Pohnuato	Diseminasi LKBUN Untuk Peningkatan Kapasitas Penyusun LKBUN dan Sosialisasi Satker Untuk Operator UAKPA di Marisa. Peserta pegawai seksi Vera KPPN Marisa dan Operator Lingkup KPPN Marisa.	Bidang PPAK
	Upacara Hari Kesaktian Pancasila	1 Okt 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	Upacara Hari Kesaktian Pancasila	Bagian Umum
	Rapat Unit Pengendali Resiko (UPR)	2 Okt 2020	Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen Risiko terkait Pengendalian Risiko Triwulan III Tahun 2020 oleh Pengelola Risiko Bagian Umum, Bidang PPAK, Bidang PPA I, Bidang PPA II dan Bidang SKKI	Bidang SKKI
	Pembinaan dan Supervisi KPPN Marisa Semester I	5-9 Oktober 2020	KPPN Marisa	Pembinaan dan supervisi rutin yang dilakukan setiap semester dengan berpedoman pada KEP-261/ PB/ 2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN.	Bidang SKKI
	Rakorev TW III 2019	5 - 9 Oktober 2020	Ruang Rapat Kantor Gubernur Prov. Gorontalo	Rapat Koordinasi dengan seluruh Pimpinan Pemerintah Daerah dan Provinsi Terkait melibatkan Pimpinan Kanwil DJPb yang membahas mengenai Progres Pelaksanaan Anggaran rutin Triwulan regional dan pencairan TKDD	Bidang PPA I
	Rekonsiliasi	5 -9 Oktober 2020	Tentatif	Rekonsiliasi Dana Transfer dan Pertemuan Bidang Akuntansi Triwulan IV TA 2020 (Data Triwulan III) Dalam Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Peserta Seluruh Pegawai BKAD Se-Propinsi Gorontalo dan Pegawai Bidang PPAK.	Bidang PPAK
	DKO Triwulan III	8 Okt 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	Dialog Kinerja Organisasi Triwulan III TA 2020	Bagian Umum
	Monitoring dan Evaluasi Implementasi ISO KPPN Marisa Semester II	8-9 Oktober 2020	KPPN Marisa	Monev yang dilakukan untuk memastikan bahwa Implementasi ISO masih dilakukan atau diimplementasikan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-151/PB/2018 tentang Pedoman Implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN.	Bidang SKKI
	Pembinaan dan Supervisi KPPN Gorontalo Semester I	12-16 Oktober 2020	KPPN Gorontalo	Pembinaan dan supervisi rutin yang dilakukan setiap semester dengan berpedoman pada KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN.	Bidang SKKI
	Pembinaan Akuntansi Pemda	12 -16 Oktober 2020	BKAD Kab. Boalemo	Penguatan Aplikasi CaLK Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Semester II ke Bidang Akuntansi Pemda Boalemo. Peserta Pegawai BKAD Boalemo.	Bidang PPAK

	Monev Satker dg Capaian IKPA, Capaian Output strategis terendah	12 - 23 Oktober 2020	Monev Ke Lokasi Satker	Monev langsung Ke Lokasi Satuan Kerja untuk dapat berdialog dan mendapatkan keterangan langsung dari Pejabat Perbendaharaan Satker terkait hasil Capaian IKPA dan capaian Output strategis Satker yang belum optimal	Bidang PPA I
	Monitoring dan Evaluasi Implementasi ISO KPPN Gorontalo Semester II	15-16 Oktober 2020	KPPN Gorontalo	Monev yang dilakukan untuk memastikan bahwa Implementasi ISO masih dilakukan atau diimplementasikan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-151/PB/2018 tentang Pedoman Implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN.	Bidang SKKI
	Seminar Kajian Fiskal Regional (KFR)	22 Okt 2020	Aula/Ruang Rapat Kantor Wilayah	Penyelenggaraan seminar dalam rangka sosialisasi Kajian Fiskal Regional Semester I Tahun 2020 Provinsi Gorontalo.	Bidang PPA II
	Monitoring Infrastruktur TIK Ke KPPN Marisa	26-28 Oktober 2020	KPPN Marisa	Kegiatan ini adalah kegiatan monitoring Infrastruktur SPAN dan Sakti Semester II 2020. Dilakukan sebagai upaya pemenuhan IKU terkait.	Bidang SKKI
	Peringatan HORI ke-74 Tahun 2020	30 Okt 2020	Kota Gorontalo	Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-74	Bagian Umum
November	Survei SBM Th 2022	2 November 2020 6 November 2020	Survei Harga SBM ke beberapa tempat	Kegiatan tahunan berupa survei ke beberapa Lokasi yang ditentukan untuk mengetahui standart harga dan biaya di Gorontalo yang diperlukan untuk menyusun SBM Tahun mendatang	Bidang PPA I
	Monitoring dan Evaluasi Kredit Program (KUR dan UMi)	2-10 November 2020	Pemda Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo	Salah satu pelaksanaan tugas bidang PPA II dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit program (KUR dan UMi) di wilayah Provinsi Gorontalo.	Bidang PPA II
	Monitoring Infrastruktur TIK Ke KPPN Gorontalo	4-6 Nopember 2020	KPPN Gorontalo	Kegiatan ini adalah kegiatan monitoring Infrastruktur SPAN dan Sakti Semester II 2020. Dilakukan sebagai upaya pemenuhan IKU terkait.	Bidang SKKI
	DKO Bulanan	8 Nov 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	Dialog Kinerja Organisasi Bulan Oktober 2020	Bagian Umum
	Seminar HORI 2020	9 November 2020 13 November 2020 (tentative mengikuti Penetapan APBN 2021)	Hotel di Gorontalo	Kegiatan Serminar APBN 2021 dan Kilas Balik Pelaksanaan Anggaran 2020 untuk menyemarakkan peringatan Hari Oeang dan juga memperkenalkan Kebijakan APBN Tahun 2021 ke Seluruh Masyarakat	Bidang PPA I
	Upacara Hari Pahlawan	10 Nov 2020	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	Upacara Hari Pahlawan	Bagian Umum
	Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai KPPN Gorontalo	13 Nov 2020	KPPN Gorontalo	Pemantauan Kode Etik dan Kepatuhan Pegawai KPPN Gorontalo metode Sidak	Bidang SKKI
	Rakernas	9 - 13 November 2020	Jakarta	Rapat Kerja Nasional Akuntansi 2020 di Kantor Pusat, Jakarta. Kegiatan Dihadiri oleh Kepala Kanwil dan Kabid PPAK Seluruh Indonesia. Tujuan untuk membangun sinergi dan komitmen untuk terus mempertahankan opini WTP untuk LKGL dan LKPD dan bersama-sama bertukar informasi untuk pemanfaatan laporan keuangan.	Bidang PPAK
	Pembinaan BLU	16 - 20 November 2020	BLU Bandara Kab. Gorontalo	Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satker BLU Bandara. Peserta Pegawai Bidang PPAK dan Pegawai Satker Bandara.	Bidang PPAK
	Pembinaan BLU	16 - 20 November 2020	BLU UNG Kota Gorontalo	Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satker BLU UNG. Peserta Pegawai Bidang PPAK dan Pegawai Satker UNG.	Bidang PPAK
	Rakorwil Semester II	21-22 November 2020 (Tentatif)	Kota Gorontalo	Rapat Koordinasi antara Kanwil DJPb Gorontalo, KPPN Gorontalo, dan KPPN Marisa Semester II Tahun 2020	Bagian Umum
	Penyerahan DIPA 2021	23 November 2020 - 27 November 2020 (tentative mengikuti Penyerahan DIPA Pusat)	Hotel di Gorontalo	Penyerahan DIPA Ke Seluruh Satker Lingkup Provinsi Gorontalo dan Alokasi TKDD ke Seluruh Pemerintah Daerah dan Provinsi yang rutin dilaksanakan setiap tahun	Bidang PPA I
	FGD Penerimaan Negara	26 Nov 2020	Kanwil DJPb Gorontalo	Rapat koordinasi dengan Bank/Pos Persepsi, KPPN dan KPP lingkup Provinsi Gorontalo	Bidang SKKI
	Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa Semester II	26-27, 30 November 2020	KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa	Pelaksanaan tugas bidang PPA II dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh KPPN.	Bidang PPA II
	Rapat Koordinasi LLAT	27 Nov 2020	Kanwil DJPb Gorontalo	Rapat koordinasi dengan KPPN lingkup Provinsi Gorontalo	Bidang SKKI
	Konsultasi	1 - 4 Desember 2020	Jakarta	Konsultasi LKBUN dalam Rangka Mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi Seluruh Indonesia Semester II 2020 di Jakarta	Bidang PPAK
	Pembinaan BLU Smt II	1 Desember 2020 8 Desember 2020	Lokasi Satker BLU	Pembinaan Rutin Semesteran ke dua Satker BLU di Gorontalo terkait permasalahan Kinerja Pengelolaan BLU, Aset, SPI, Remunerasi dll	Bidang PPA I
Monev dan Supervisi Akhir Tahun Anggaran Ke KPPN	15 Desember 2020 - 31 Desember 2020	KPPN Gorontalo & Satker Terpilih	Monev Kegiatan Akhir Tahun Ke KPPN dan Satker untuk melihat secara langsung situasi terkini satker dan memberikan solusi dan pemecahan masalah terkait pencairan anggaran di Akhir Tahun anggaran	Bidang PPA I	
Spending Review Efektifitas 2021	1 Desember 2020 Januari 2021	Kanwil DJPB Prov.	Membuat Laporan Spending Review 2020 pada wilayah kerja Gmasing-masing dalam rangka peningkatan kualitas belanja Pemerintah	Bidang PPA I	
Focus Group Discussion Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah	2 Des 2020	Aula/Ruang Rapat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	Penyelenggaraan Focus Group Discussion dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan APBN maupun APBD di Provinsi Gorontalo	Bidang PPA II	
Monitoring dan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	3-4 Desember 2020	RSUD Aloe Saboe dan RSUD Dunda	Salah satu pelaksanaan tugas bidang PPA II dalam rangka mewujudkan tata kelola yang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ada di Provinsi Gorontalo	Bidang PPA II	

Desember	Monev Tindak Lanjut Penyelesaian LHP, Pulbaket dan Pendampingan Saksi	10 Desember 2020	KPPN Gorontalo	Monev Tindak Lanjut Penyelesaian LHP, Pulbaket dan Pendampingan Saksi	Bidang SKKI
	DKO Bulanan	8 Desember	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	Dialog Kinerja Organisasi Bulan November 2020	Bagian Umum
	Pembinaan Akuntansi Pemda	7 - 11 Desember 2020	BKAD Kab. Boalemo	Pembinaan Aplikasi Pertanggungjawaban Bendahara (SiRekam) dan Rekonsiliasi Aset (SINGKAP) Semester II 2020 di Pemkab. Boalemo. Peserta Pegawai BKAD Boalemo.	Bidang PAPP
	Pemantauan Rutin Kepegawaian dan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun	14 - 18 Desember	Kanwil DJPb Prov Gorontalo	Melakukan Pemantauan Rutin Kepegawaian dan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun	Bagian Umum
	Uji Petik Kepatuhan Bank/Pos Persepsi	31 Des 2020	Bank/Pos Persepsi	Monev uji petik yang dilakukan untuk memonitor bank terutama jam buka atau tutup layanan.	Bidang SKKI

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN

KODE	NAMA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
015.08.09	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	101.451.332	370.268.900	418.362.500	379.497.250	228.337.250	419.835.050	288.918.100	279.851.400	354.994.000	531.159.158	370.768.673	379.073.387	4.122.517.000
1706	Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah	101.451.332	370.268.900	418.362.500	379.497.250	228.337.250	419.835.050	288.918.100	279.851.400	354.994.000	531.159.158	370.768.673	379.073.387	4.122.517.000
1706.003	Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah	11.712.000	16.426.000	11.644.000	11.666.000	7.099.000	4.099.000	29.058.000	7.159.000	19.505.000	17.562.000	16.225.000	14.763.000	166.918.000
1706.003.001	Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah	10.662.000	11.336.000	1.200.000	7.657.000	4.219.000	4.099.000	26.178.000	4.099.000	1.500.000	11.029.000	15.902.000	10.879.000	108.760.000
051	Konsultasi, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	10.662.000	11.336.000	1.200.000	7.657.000	219.000	4.099.000	26.178.000	4.099.000	1.500.000	11.029.000	15.902.000	8.879.000	102.760.000
052	Penyusunan LK Kuasa BUN Tingkat Wilayah	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
053	Analisis Hasil Telaahan Laporan UAPPA-W, UAKBUN Daerah, dan LK BLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
1706.003.002	Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah	1.050.000	5.090.000	10.444.000	4.009.000	2.880.000	0	2.880.000	3.060.000	18.005.000	6.533.000	323.000	3.884.000	58.158.000
051	Koordinasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan/atau BLUD	1.050.000	2.880.000	0	2.899.000	2.880.000	0	2.880.000	3.060.000	0	2.863.000	0	0	18.512.000
052	Pembinaan SAP pada Pemerintah Daerah	0	2.210.000	10.444.000	1.110.000	0	0	0	0	0	0	0	1.748.000	15.512.000
053	Analisis Hasil Telaahan Laporan Pemerintah Daerah, dan LK BLUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	323.000	1.227.000	2.000.000
054	Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000	3.220.000	0	20.000	4.000.000
055	Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Bimtek/FGD	0	0	0	0	0	0	0	0	17.245.000	0	0	889.000	18.134.000
1706.004	Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah	3.640.000	12.610.000	13.392.000	14.901.000	3.640.000	10.368.000	19.060.000	6.037.000	38.492.000	20.816.000	5.512.000	25.816.000	174.284.000
1706.004.001	Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat	0	7.110.000	6.700.000	6.099.000	0	5.768.000	8.123.000	3.077.000	35.000.000	10.192.000	0	10.223.000	92.292.000
051	Pelaksanaan Spending Review	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	14.884.000	0	0	4.800.000	24.184.000
052	Reviu Pelaksanaan Anggaran	0	2.610.000	0	0	0	0	3.094.000	0	0	0	0	4.690.000	10.394.000
053	Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	0	0	4.300.000	0	0	4.620.000	0	0	5.000.000	0	0	0	13.920.000
054	Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	15.116.000	0	0	0	17.216.000
055	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	0	0	2.400.000	300.000	0	0	300.000	0	0	3.400.000	0	732.000	7.132.000
056	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kas	0	0	0	300.000	0	1.148.000	2.306.000	3.077.000	0	0	0	1.000	6.832.000
057	Monitoring dan Evaluasi PNPB	0	0	0	5.499.000	0	0	323.000	0	0	6.792.000	0	0	12.614.000
1706.004.002	Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah	3.640.000	5.500.000	6.692.000	8.802.000	3.640.000	4.600.000	10.937.000	2.960.000	3.492.000	10.624.000	5.512.000	15.593.000	81.992.000
051	Penyusunan Kajian Fiskal Regional	0	4.120.000	0	1.880.000	0	0	7.965.000	2.960.000	0	10.624.000	0	45.000	27.594.000
052	Penyusunan Profil keuangan Daerah	3.640.000	1.380.000	6.692.000	0	0	1.160.000	0	0	0	0	0	4.504.000	17.376.000
053	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah	0	0	0	1.972.000	0	0	2.972.000	0	0	0	0	6.272.000	11.216.000
054	Pembinaan dan Monitoring atas Investasi Pemerintah, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	0	0	0	4.950.000	3.640.000	300.000	0	0	0	0	3.640.000	4.772.000	17.302.000
055	Monitoring atas Dana Transfer dan Dana Desa	0	0	0	0	0	3.140.000	0	0	0	0	1.872.000	0	5.012.000
056	Konsolidasi data perhitungan pihak ketiga dan tuntutan ganti rugi	0	0	0	0	0	0	0	0	3.492.000	0	0	0	3.492.000
1706.005	Hasil Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah	1.671.500	1.276.000	2.250.000	37.750.000	6.602.000	8.608.000	6.196.000	12.766.500	8.304.000	29.496.000	7.288.000	2.528.000	124.736.000
1706.005.001	Tanpa Sub Output	1.671.500	1.276.000	2.250.000	37.750.000	6.602.000	8.608.000	6.196.000	12.766.500	8.304.000	29.496.000	7.288.000	2.528.000	124.736.000
051	Supervisi Proses Bisnis KPPN	0	0	0	28.340.000	0	7.330.000	0	0	0	28.352.000	0	0	64.022.000
052	Supervisi Teknis Aplikasi	0	0	900.000	5.304.000	6.380.000	900.000	1.044.000	1.800.000	600.000	0	6.388.000	0	23.316.000
053	Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	1.371.500	1.276.000	1.350.000	4.106.000	222.000	378.000	5.152.000	3.862.500	900.000	1.144.000	900.000	428.000	21.090.000
054	Uji Petik Kepatuhan Bank/ Pos Persepsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
055	Pembinaan Jabatan Fungsional Perbendaharaan	300.000	0	0	0	0	0	0	7.104.000	6.804.000	0	0	0	14.208.000
1706.009	Dokumen Hasil Layanan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah	0	23.300.000	9.000.000	5.800.000	8.394.000	5.852.000	8.200.000	6.912.000	600.000	0	50.259.000	6.205.000	124.522.000
1706.009.001	Dokumen Hasil Layanan Pelaksanaan Anggaran Pusat	0	23.300.000	8.400.000	5.800.000	7.350.000	0	8.200.000	0	0	0	50.259.000	3.705.000	107.014.000
051	Penyerahan DIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.218.000	2.000	45.220.000
052	Penyelesaian Pengesahan Revisi DIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
053	Pelaksanaan Survei Bahan Sumbangan Standar Biaya Masukan	0	11.564.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.035.000	1.000	14.600.000
054	Pengelolaan Register Hibah	0	0	0	5.800.000	697.000	0	2.057.000	0	0	0	0	0	8.554.000

055	Pelaksanaan pembinaan Satuan Kerja BLU	0	0	0	0	6.653.000	0	0	0	0	0	2.701.000	9.354.000	
056	Pelaksanaan Pembinaan terkait Peraturan/Kebijakan Pelaksanaan Anggaran	0	11.736.000	8.400.000	0	0	0	6.143.000	0	0	0	2.006.000	1.000	28.286.000

1706.009.002	Dokumen Hasil Layanan Pelaksanaan Anggaran Daerah	0	0	600.000	0	1.044.000	5.852.000	0	6.912.000	600.000	0	0	2.500.000	17.508.000
051	Layanan Pelaksanaan Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman	0	0	0	0	1.044.000	0	0	0	0	0	0	0	1.044.000
052	Asistensi/Pembinaan Pelaksanaan Keuangan BLU Daerah	0	0	600.000	0	0	5.852.000	0	6.912.000	600.000	0	0	2.500.000	16.464.000
1706.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0	64.227.100	102.067.000	50.375.000	2.275.000	212.238.700	2.275.000	7.065.900	1.891.000	185.015.700	27.254.600	0	654.685.000
1706.951.001	Tanpa Sub Output	0	64.227.100	102.067.000	50.375.000	2.275.000	212.238.700	2.275.000	7.065.900	1.891.000	185.015.700	27.254.600	0	654.685.000
995	Pengadaan Kendaraan Bermotor	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	10.147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.147.000
997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	22.815.000	0	23.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.915.000
998	Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan	0	31.265.100	102.067.000	2.275.000	2.275.000	212.238.700	2.275.000	7.065.900	1.891.000	185.015.700	27.254.600	0	573.623.000
1706.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	7.173.500	18.620.000	65.321.000	2.600.000	15.158.000	1.600.000	22.600.000	13.020.000	44.300.000	87.600.000	79.032.000	11.226.500	368.251.000
1706.970.001	Tanpa Sub Output	7.173.500	18.620.000	65.321.000	2.600.000	15.158.000	1.600.000	22.600.000	13.020.000	44.300.000	87.600.000	79.032.000	11.226.500	368.251.000
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	12.500.000
052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	8.004.000	600.000	600.000	600.000	600.000	14.004.000
053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	0	0	0	0	0	0	13.608.000	0	0	0	0	0	13.608.000
054	Pengelolaan Kepegawaian	0	13.620.000	64.721.000	0	9.558.000	0	1.392.000	2.016.000	37.200.000	0	77.432.000	2.200.000	208.139.000
055	Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Kehumasan	6.573.500	1.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	7.000.000	3.000.000	2.000.000	87.000.000	1.000.000	8.426.500	120.000.000
1706.994	Layanan Perkantoran	77.254.332	233.809.800	214.688.500	256.405.250	185.169.250	177.069.350	201.529.100	226.891.000	241.902.000	190.669.458	185.198.073	318.534.887	2.509.121.000
1706.994.001	Tanpa Sub Output	77.254.332	233.809.800	214.688.500	256.405.250	185.169.250	177.069.350	201.529.100	226.891.000	241.902.000	190.669.458	185.198.073	318.534.887	2.509.121.000
001	Gaji dan Tunjangan	0	57.832.000	48.832.000	50.332.000	50.832.000	35.332.000	50.832.000	51.832.000	47.832.000	51.832.000	49.832.000	102.664.000	597.984.000
002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	77.254.332	175.977.800	165.856.500	206.073.250	134.337.250	141.737.350	150.697.100	175.059.000	194.070.000	138.837.458	135.366.073	215.870.887	1.911.137.000